

**ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAMARINDA**



**Oleh :**

**RUKMINI**

**NPM : 2004.11.0029**

**NIRM : 2004.11.311.401100.00021**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH**

**SAMARINDA**

**2008**



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH S A M A R I N D A

TERAKREDITASI BAN-PT DEPDIKNAS NOMOR : 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007  
Kampus : Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Telp. No : (0541) 7070289, 743459 - Fax No : (0541) 7434  
Samarinda 75124 - Kalimantan Timur. E-mail [stie\\_muhammadiyah@yahoo.co.id](mailto:stie_muhammadiyah@yahoo.co.id)

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Tahun 2008/2009 Sarjana Ekonomi Muhammadiyah Samarinda, setelah melaksanakan ujian pada hari *Sabtu* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Sembilan* bertempat di kampus STIE Muhammadiyah Samarinda :

- Dengan Mengingat :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikti No.02/Dikti/Kep/1991 tanggal 29 Januari 1991;
  2. Surat Keputusan Ketua STIE Muhammadiyah Samarinda Nomor 86/II.3.AU/KEP/V/2008;
  3. Buku Pedoman Pendidikan STIE Muhammadiyah Samarinda tahun 1991 ;

### MEMPERHATIKAN

1. Jawaban dan Sanggahan yang diberikan selama ujian berlangsung ;
2. Hasil Ujian yang dicapai dalam skripsi dengan Susunan Anggota Panitia Penguji ;

NO	N A M A	TANDA TANGAN
1	M. KISWANTO, SE, M.Si	1.
2	MISRANSYAH, SE	2.
3	DRS. H. SUYATMAN, S.Pd, MM, M.Pd	3.
4	DARMINTO, S.Pd, SE, M.Pd	4.

### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :  
 N A M A : RUKMINI  
 N I M : 2004.11.0029  
 N P M : 2004.11.311.401101.00021  
 JURUSAN/PS : MANAJEMEN  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAMARINDA

DENGAN NILAI :  
 DINYATAKAN : LULUS / TIDAK LULUS

Samarinda, 28 Februari 2009

### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,  
  
Suradiyanto, SH, SE, M. Hum

Sekretaris,  
  
M. Senopati, SE

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN  
PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAMARINDA

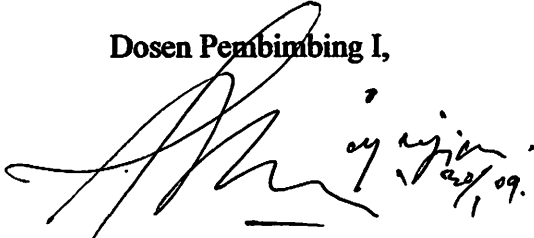
Nama Mahasiswa : RUKMINI

NIRM : 2004.11.311.401100.00021

NPM : 2004.11.0029

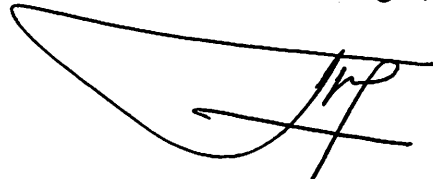
Menyetujui :

Dosen Pembimbing I,



M. Kiswanto, S.E, M.Si

Dosen Pembimbing II,



H. Sunarso, S.E, M.M

Mengesahkan,

**Ketua STIE Muhammadiyah Samarinda**

Drs. H. Suyatman, S.Pd, M.M, M.Si  
KTAM. 498 353

## RINGKASAN

RUKMINI, 2009, Analisis Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dibawah bimbingan Bapak Kiswanto, S.E, M.Si dan Bapak H. Sunarso, S.E, M.M

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diduga Pendapatan Pajak Daerah memberikan kontribusi rata – rata diatas 35 % terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis laksanakan pada Dinas Pendapatan Kota Samarinda dan hasil perhitungan bahwa prosentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2004 serta mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata – rata tingkat kontribusinya ditargetkan 38% dengan tingkat realisasinya rata- rata 37%

Target kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda berfluktuasi yaitu pada tahun 2003 sebesar 36,60% dengan realisasi 37,81%, di tahun 2004 ditargetkan berkontribusi sebesar 36,20% dengan realisasi naik menjadi 39,62%, sedangkan tahun 2005 target kontribusi 37,63% dan realisasi pada tahun itu hanya sebesar 37,72%, dan pada tahun 2006 ditargetkan naik kontribusinya pada 46,42% namun hanya terealisasi 37,83%, di tahun 2007 target kontribusi 36,61% dengan realisasi hanya sebesar 32,77%. Jadi, rata – rata kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk

targetnya adalah sebesar 38,69% dengan rata – rata realisasi kontribusi sebesar 37,15%

Rata – rata besaran nilai persentase target kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda yang memiliki nilai target kontribusi tertinggi selama 5 tahun adalah pada tahun 2006 sebesar 46,42 % sedangkan untuk realisasi yang memberikan kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2004 yaitu sebesar 39,62 %

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

1. Nama Penulis : RUKMINI
2. Tempat /Tanggal Lahir : Demak, 15 April 1983
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Anak ke : 8 ( Delapan )
5. Agama : Islam.
6. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
7. Alamat : Jl. PM.Noor  
Perum Tepian Blok VIII No.09
8. Riwayat Pendidikan : 1.Tamat SDN Tegowanu 1 Demak Tahun 1994  
2. Tamat SMP Muhammadiyah 3 di Samarinda  
Tahun 2000  
3. Tamat SMKN 4 di Samarinda Tahun 2003  
4. Kuliah di STIE Muhammadiyah Samarinda  
Tahun 2004 s/d sekarang.

### **B. DATA KELUARGA**

9. Nama Suami : Didik Sochiffan.
10. Nama Anak : Latisya Naila Nurul Izzah.

### **C. DATA ORANG TUA**

11. Nama Bapak : Sumono
12. Nama Ibu : Kamsinah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan juga junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : “ Analisa Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli Daerah ( PAD ) Kota Samarinda ” guna untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan akhir di STIE Muhammadiyah Samarinda.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima segala saran, petunjuk, dan kritik dari pembaca atas penulisan hasil penelitian demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala erendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Suyatman, SPd, MM, Msi selaku Ketua STIE Muhammadiyah Samarinda beserta Staf Dosen dan segenap Civitas Akademia.
2. Bapak Kiswanto, SE, Msi selaku Pembimbing I dan juga kepada Bapak H.Sunarso SE, MM selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan

petunjuk, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

3. Bapak Drs.H.Ali Fitri Noor, MM selaku Pimpinan Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda beserta staf yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk memperoleh data dan informasi instansi tersebut bagi penyusunan skripsi ini.
4. Suami Didik Sochiffan dan anakku tercinta “ Latisya Naila Nurul Izzah ” yang telah membantu dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi dan studi ini.
5. Kakak tercinta “Jumeno & Rosana ” serta seluruh keluarga yang telah banyak membantu, mendorong dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Kepada teman – teman kuliah dan semua yang tidak bisa tersebut namanya penulis ucapkan terma kasih sebesar – besarnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga kepada semua pembaca.

Samarinda, Januari 2009

Penulis

RUKMINI



## DAFTAR ISI

		Halaman
	JUDUL .....	i
	HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
	RINGKASAN .....	iv
	RIWAYAT HIDUP .....	vi
	KATA PENGANTAR .....	vii
	DAFTAR ISI .....	ix
	DAFTAR TABEL .....	xi
	DAFTAR GAMBAR .....	xii
	DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Penulisan .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	4
	C. Batasan Masalah .....	4
	D. Tujuan Penulisan .....	5
	E. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Definisi Pajak .....	7
	B. Fungsi Pajak .....	9
	C. Pengelompokan Pajak .....	10
	D. Pengertian Pajak Daerah.....	12
	E. Jenis Pajak Daerah. ....	12
	F. Retribusi Daerah .....	14
	G. Hipotesis .....	17
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Definisi Operasional .....	18
	B. Rincian Data Yang Diperlukan .....	19
	C. Tehnik Pengumpulan Data .....	20
	D. Alat Analisis .....	21
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	
	Gambaran Umum Instansi Pemerintah.	
	1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda .....	22
	2. Pengertian, Fungsi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah .....	24
	3. Struktur Organisasi .....	27

	B. Penyajian Data .....	39
BAB V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
	A. Analisis .....	41
	1. Perhitungan Kontribusi Target Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2003 s/d 2007.....	42.
	2. Analisis Kontribusi Target Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2003 s/d 2007	44.
	3. Perhitungan Kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2003 s/d 2007.....	46.
	4. Analisis Kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2003 s/d 2007.....	48.
	B. Pembahasan .....	49
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. KESIMPULAN .....	56
	B. SARAN - SARAN .....	59
REFERENSI	.....	62

**DAFTAR TABEL**

Nomor	Tubuh Utama	Halaman
1	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2003 s/d 2007 .....	40
2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2003 s/d 2007 .....	40
3	Target Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 s/d 2007 .....	44
4	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tahun 2003 s/d 2007 .....	47

**DAFTAR GAMBAR**

Nomor	Tubuh Utama	Halaman
1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda .....	28
2	Grafik Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 s/d 2007 ( berdasarkan persentase ) .....	50
3	Grafik Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 s/d 2007 (berdasarkan nilai) .....	50

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Nomor</b>	<b>Tubuh Utama</b>	<b>Halaman</b>
1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 .....	63
2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2004 .....	64
3	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 .....	65
4	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 .....	66
5	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2007 .....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penulisan

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah berupa pajak.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbarui lagi dan harga jual minyak dan gas bumi berfluktuasi, serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Keinginan Pemerintah Indonesia adalah tepat sebab sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintahan negara lain, terutama di negara maju, andalan utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Indonesia di masa depan juga mengandalkan penerimaannya pada pendapatan dari sektor pajak.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing – masing. Dalam upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang tersedia, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sebuah sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dari pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Sumber – sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli daerah ( PAD ) , Dana Perimbangan , pinjaman daerah dan lain – lain penerimaan yang sah, sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang positif disisi penerimaan dan peranannya dari tahun ketahun semakin meningkat.

Pajak sebagai sumber penghasilan negara, merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomis tersebut. Besar kecilnya penghasilan atau pendapatan dari pajak sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Peningkatan pendapatan dari pajak sangat mempengaruhi kemampuan negara dalam meningkatkan pembangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya sumber – sumber Pendapatan Asli daerah ( PAD ) yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah dan usaha – usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diadakan pemungutan pajak yang hasilnya digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA ). Pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD ) yang komponen – komponennya terdiri dari : Pajak Kendaraan



Bermotor ( PKB ), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ), Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT - AP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir, denda pajak, retribusi daerah dan lain-lain.

Dari beberapa sumber pendapatan daerah pajak daerah merupakan salah satu komponen andalan yang selama ini menjadi tulang punggung yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Pemerintah Kota Samarinda . Dan Pajak Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini menunjukkan seiring dengan meningkatnya pembangunan, semakin baik fasilitas sarana dan prasarana pendukung usaha, banyaknya investor baru yang bermunculan dan meningkatnya kemampuan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang penulis tetapkan adalah : "Berapa Besar Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda ?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis hanya menitik beratkan

pada data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda pada tahun 2003 sampai tahun 2007.

#### **D. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan dari laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.
2. Ingin mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007.

Dan manfaat dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana media informasi kepada pihak publik tentang hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda
2. Sebagai bahan dalam menyusun Anggaran dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun selanjutnya, oleh Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda
3. Menambah daftar buku hasil penelitian yang digunakan sebagai buku Perpusatakaan pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari laporan yang penulis buat ini, maka penulis akan menguraikan garis besar dari laporan ini yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan**

Mengemukakan pendahuluan yang secara umum meliputi : Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Mengemukakan dasar teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada, hipotesis serta definisi konseptual

## **Bab III Metode Penelitian**

Mengemukakan definisi operasional, perincian data yang diperlukan, tehnik pengumpulan data, serta, analisis dan pengujian hipotesis.

## **Bab IV Hasil Penelitian**

Mengemukakan sejarah berdirinya instansi, struktur organisasi, penugasan, temuan masalah, penyajian data yang diperlukan terhadap permasalahan yang dikemukakan.

## **BAB V Analisis dan Pembahasan**

Mengemukakan, menguraikan tentang analisa dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan

## **BAB VI Kesimpulan dan Saran**

Mengemukakan kesimpulan atas hasil penelitian atas topik permasalahan yang diangkat,serta mengemukakan juga saran – saran penulis dimana diharapkan berguna bagi pembaca dan khususnya pada upaya peningkatan Pendapatan Pajak Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah serta bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD ) Kota Samarinda.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang dapat memberikan kontribusi cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pemerintah pusat dan daerah.

Peningkatan pendapatan dari pajak sangat mempengaruhi kemampuan negara dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diadakan pemungutan pajak yang hasilnya digunakan untuk masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu menjadi pokok bahasan dalam laporan ini adalah masalah pajak, maka terlebih dahulu akan diberikan penjelasan tentang pengertian pajak. Pajak adalah iuran negara dari rakyat yang mewajibkan membayarnya karena undang-undang, dapat dipaksakan, dan pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

#### **A. Definisi Pajak**

##### **1. Menurut *Prof. Dr. P.J.A. Adriani* :**

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".(Atep Adya Barat,1995:1)

2. Menurut *Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH* :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum". (Mardiasmo, 2000 : I )

3. Menurut *Dr. Soeparman Soemahadidjaja* dalam desertasinya yang berjudul

" *Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong* " :

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". (Santoso Brotodihardjo, 1998 : 5)

Dari ketiga pendapat diatas jelas terlihat adanya kesamaan pemahaman dalam menempatkan timbulnya hubungan dan kegunaan pajak dalam suatu masyarakat baik dari segi hukum, ekonomi, sosial, maupun dari segi tugas negara.

Definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas jelas terlihat adanya pemahaman yang telah disesuaikan dengan kondisi fungsi pajak dalam iklim perpajakan Indonesia.

Dari definisi di atas dapat dikaji bahwa :

- a. Pajak merupakan setoran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Sifat pemungutan pajak dipaksakan terus menerus, tidak mendapat prestasi kembali secara langsung.
- c. Penerimaan pajak oleh negara dipakai untuk pengeluaran - pengeluaran negara dalam melayani kepentingan masyarakat.
- d. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu *regulated* (mengatur).

## **B. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi menjadi 2 (dua) jenis fungsi, yaitu :

### **1. Fungsi *Budgeter***

“yaitu fungsi pajak yang bertujuan untuk memasukan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan”.

### **2. Fungsi *Regulered* (mengatur)**

“yaitu fungsi pajak yang secara tidak langsung untuk memasukan uang sebanyak mungkin, tetapi pajak dipakai sebagai alat untuk menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif karena adanya fasilitas-fasilitas pajak, maka hal demikian dapat menumbuhkan obyek pajak dan subyek pajak baru yang lebih banyak lagi, sehingga tumbuhnya basis pajak lebih meningkat ". (Mardiasmo, 2000: 2)

## C. Pengelompokan Pajak

### 1. Menurut Golongannya

#### a. Pajak *Langsung*.

“Pajak *Langsung* yaitu pajak-pajak yang pembebanannya langsung dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan atas obyek pajak yang merupakan penghasilannya dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain“.

#### b. Pajak *Tidak Langsung*.

“ Pajak *Tidak Langsung* yaitu pajak-pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan atau digeserkan kepada pihak lain. Pada umumnya para produsen dapat melimpahkan beban pajaknya kepada konsumen yang merupakan pergeseran ke depan “.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

### 2. Menurut Lembaga Pengaturannya

#### a. *Pajak Pusat*

“ *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya di bawah wewenang langsung Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Sedangkan pelaksanaan di daerah di bawah wewenang kantor wilayah Inspeksi pajak setempat “.

Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan.

### b. *Pajak Daerah*

“ *Pajak Daerah* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah ”.

*Pajak Daerah* terdiri atas :

#### 1.) *Pajak Daerah Propinsi.*

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ), Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT - AP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

#### 2.) *Pajak Daerah Kabupaten / Kota.*

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir

### 3. Menurut Sifatnya

#### a. *Pajak Subyektif*

" *Pajak Subyektif* yaitu jenis pajak yang dalam proses pemungutannya bertitik tolak pada diri orangnya sebagai wajib pajak secara subjektif Dengan demikian besar kecilnya hutang pajak yang harus dibayar tergantung kepada status subyek dari wajib pajak tersebut yang merupakan kemampuan daya pikul masing-masing. Misalnya pada pemungutan pajak penghasilan tergantung kepada status wajib pajak dalam jabatannya yang mempengaruhi jumlah penghasilannya ".



#### b. Pajak Objektif

" *Pajak Objektif* yaitu pajak yang proses pemungutannya bertitik tolak pada objeknya, dimana jumlah besarnya objek pajak ini yang terjadi dan dilakukan di dalam wilayah Indonesia, dengan tidak memperhatikan domisili dan subjek pajak. Misalnya pajak atas bunga deposito, pajak deviden, royalti dan cukai ". (Mardiasmo, 2000: 6-7)

#### D. Pengertian Pajak Daerah.

1. Menurut Rimsky.K.Judiseno, Perpajakan, Gramedia Pustaka Utama (1996:15) Pajak Daerah adalah "Pajak yang pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri".
2. Menurut Drs Azahari A Samudra Msi, Perpajakan di Indonesia, gramedia Pustaka Utama (1995: 61) mendefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah "Pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik".
3. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.(*Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah*)

Dari ketiga sumber diatas jelas terlihat adanya kesamaan pemahaman dalam menempatkan timbulnya hubungan dan kegunaan pajak daerah dalam suatu masyarakat baik dari segi hukum, ekonomi, sosial, maupun dari segi tugas Pemerintah Daerah sehingga penulis dapat menyimpulkan tentang pengertian tentang pajak daerah. Pengertian Pajak Daerah adalah Pajak negara yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik

Ciri – ciri yang menyertai dalam pajak daerah dapat dihtisarkan sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. Penyerahan dilakukan dengan berdasarkan Undang – undang
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang – undang dan atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan – urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

#### **E. Jenis Pajak Daerah.**

##### *1. Pajak Hotel.*

*Pajak Hotel* adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan hotel dimana hotel dimaksud adalah termasuk juga rumah

penginapan yang memunggut bayaran. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan., fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

## 2. *Pajak Restoran.*

*Pajak Restoran* adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan di restoran, rumah makan, café, bar dan sejenisnya meliputi penjualan makanan / minuman di restoran atau rumah makan termasuk penyediaan untuk makanan / minuman yang diantar atau dibawa pulang

## 3. *Pajak Hiburan*

*Pajak Hiburan.* adalah Pajak Daerah yang dipungut pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran

## 4. *Pajak Reklame.*

*Pajak Reklame.* adalah Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah terkait orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame papan, reklame megatron (LED), reklame kain, reklame stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/ slide maupun reklame peragaan.

## 5. *Pajak Penerangan Jalan.*

*Pajak Penerangan Jalan* adalah. Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah terkait penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah yang meliputi penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan oleh PLN maupun bukan PLN.

#### 6. *Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C*

*Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C* adalah Pajak Daerah atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku baik diambil dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan

#### 7. *Pajak Parkir*

*Pajak Parkir* adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memunggut bayaran.

### **F. Retribusi Daerah**

Selain dari Pajak Daerah sumber Pendapatan Asli Daerah dapat juga berasal dari Retribusi Daerah, yang memiliki pengertian :

1. Menurut Agus Santosa, Perpajakan Indonesia, (1993:4) Satya Wacana Semarang yang memberikan pengertian bahwa "Retribusi adalah jenis pungutan yang diselenggarakan pemerintah pada umumnya yang

memiliki hubungan langsung dengan kontraprestasinya secara perorangan “

2. Menurut pendapat dari Drs Azahari A Samudra Msi, Perpajakan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama (1995:273) “Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau jasa yang diberikan daerah “.
3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, yang memiliki pengertian sebagai pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah)

Dengan melihat pengertian – pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha, atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Ciri – ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah/
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjukkan.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang telah disediakan oleh daerah

Objek dan Golongan Retribusi terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan Contoh : Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta  
Contoh : Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Terminal.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

## **G. HIPOTESIS**

Dari penjelasan pada tinjauan teori diatas maka dapat dibuat jawaban sementara pada permasalahan yang diangkat yaitu :

“Diduga bahwa pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi lebih dari 35 % terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Definisi Operasional**

Disini penulis akan menyampaikan komponen-komponen yang digunakan dalam pembahasan yaitu antara lain :

1. Kontribusi adalah iuran/sumbangan pajak daerah yang diterima oleh Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007.
2. Pendapatan adalah hasil yang telah diterima oleh Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007.
3. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah
4. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber – sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ( Pemerintah Kota Samarinda ).
5. Target adalah jumlah yang diharapkan / direncanakan diterima oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
6. Realisasi adalah jumlah pajak / retribusi yang terhimpun oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

7. Pendapatan Asli Daerah adalah kumpulan dari hasil pengolahan sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan dari daerah.
8. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda merupakan instansi pemerintah yang bertugas menarik, menghimpun, membagi, serta mengelola Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda.

#### **B. Rincian Data Yang Diperlukan**

Untuk mempermudah dalam menganalisa, pemecahan masalah, penulis memerlukan data – data yang benar – benar dapat digunakan dan membantu dalam pemecahan masalah.

Data – data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Pajak Daerah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007
2. Realisasi penerimaan anggaran Pajak Daerah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2007.
3. Target Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2007.
4. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2007.
5. Gambaran umum mengenai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
6. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda.
7. Data-data (lampiran-lampiran) yang mendukung laporan penulisan ini.



### C. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan penjelasan dan hal-hal yang berhubungan dengan cara ditempuh oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan.

Adapun cara yang ditempuh penulis untuk memperoleh data-data tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. *Interview / Wawancara*

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara dan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah pengumpulan dana dan pengkreditan serta pihak-pihak yang mengerti tentang Pajak Daerah.

#### 2. *Observasi*

Observasi adalah pengamatan secara langsung, metode ini digunakan untuk mendapatkan atau memperoleh data yang lebih nyata dengan cara melakukan secara langsung dengan maksud untuk mendapatkan data secara lengkap.

#### 3. *Studi Pustaka*

Untuk mendukung isi kelengkapan dari laporan ini, maka penulis mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti sebagai dasar pemecahan masalah penelitian dalam penulisan laporan ini

#### D. Alat Analisis

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam penulisan ini menggunakan alat analisis yang bersifat kuantitatif, dalam penulisan ini penulis ingin mengetahui seberapa besar kenaikan pendapatan pajak daerah Kantor Dinas Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda., maka alat analisisnya adalah menggunakan rumus. adapun alat analisis yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

Perhitungan persentase kontribusi pajak daerah Kantor Dinas Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang didasarkan pada rumus perhitungan kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang digunakan oleh BPS Kota Samarinda dan Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda.

##### Kontribusi Target Pajak Daerah terhadap Target PAD

$$\frac{\text{Target Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

##### Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

( Prof.DR.Abdul Rachim.AF :Perspektif Pendapatan Daerah,BPS Samarinda, 2005:255 )

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.**

##### **a. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda**

Pada awalnya Dinas Pendapatan Kota Samarinda berada dibawah naungan SubDit Keuangan disebut Seksi Pajak yang berada di lingkungan Kota Samarinda.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.19/14/44 tanggal 09 September 1972 dijelaskan bahwa kegiatan dibidang pemungutan Pajak dan Pendapatan Daerah tidak diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 1972 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Sekretaria Daerah dan menginstruksikan agar Bupati Walikota Daerah yang bersangkutan membentuk Dinas Daerah untuk mengelola kegiatan tersebut di daerah masing - masing

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut maka diterbitkan Surat Keputusan WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 14/SK/SPRD-Komas /1974 tanggal 16 April 1974 disebut Dinas Perpajakan dan Pendapatan Daerah Tingkat II Samarinda.

Namun dalam perkembangannya untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan peranan Dinas Pendapatan Daerah maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41=101, tanggal 06 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Nomor 05 Tahun 1980 dengan Pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19/L-II/1980 tanggal 02 September 1980, sebagai tindak lanjut pelaksanaannya adalah dengan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 14/SK/HOT DIPENDA/1981, tanggal 07 Maret 1981.

Mengingat Surat Keputusan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 14/SK/HOT DIPENDA/1981 dipandang tidak sesuai lagi dengan peraturan, keadaan dan perkembangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan yang lama dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 06 Tahun 1990 tanggal 22 Mei 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.

Seiring dengan era reformasi dan otonomi daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Susunan

Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu tindak lanjut pelaksanaannya didaerah dengan penrbitan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 23 Februari 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda menjadi seperti sekarang ini.

Personalia dan nama-nama yang pernah menduduki jabatan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda adalah:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Drs. H.Asmuni Alie        | dari tahun 1970 s/d 1971     |
| 2. H. Syarwani.Bsc           | dari tahun 1971 s/d 1979     |
| 3. Drs.H.Saleh Salman        | dari tahun 1979 s/d 1986     |
| 4. Drs.H Fauzi Ahmad         | dari tahun 1986 s/d 1989     |
| 5. Drs H. Syamsiar Syamsudin | dari tahun 1989 s/d 1992     |
| 6. H.Djaelani Hakim SH       | dari tahun 1992 s/d 1996     |
| 7. Drs.H Sabaruddin Syukur   | dari tahun 1996 s/d 1998     |
| 8. DR.H.Abd.Rachim.AF,SE,Msi | dari tahun 1998 s/d 2007     |
| 9. Drs.H.Ali Fitri Noor, MM  | dari tahun 2007 s/d sekarang |

**b. Pengertian, Fungsi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah**

**1). Pengertian Dinas Pendapatan Daerah**

Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda

## 2). Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a). Menyelenggarakan dan mengkoordinir seluruh usaha-usaha di bidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b). Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi wewenang maupun pungutan dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah guna menciptakan atau mendapatkan sistem yang lebih baerdaya guna dan berhasil guna.
- c). Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan dan pengumpulan pemasukan Kas Daaerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- d). Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan Bagian Ketujuh pasal 181 Keputusan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, maka dapat

disimpulkan bahwa kedudukan Dinas pendapatan adalah sebagai berikut :

- a.) Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Daerah Kota Samarinda dibidang Pendapatan Daerah
- b.) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

### 3.) Tugas Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a.) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan mengolah kegiatan untuk erencanaan, mempersiapkan dan mengolah serta menyusun rumusan kebijakan teknis serta program kerja.
- b.) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c.) Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- d.) Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.

- e.) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk pelaksanaan tugas pokok yang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah serta Peraturan Daerah yang berlaku.

### **C. Struktur Organisasi.**

Agar mudah dalam melaksanakan koordinasi dengan bawahan, maka setiap perusahaan pasti mempunyai struktur organisasi, baik itu pada perusahaan swasta maupun pada instansi pemerintah, begitu juga halnya dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang memiliki suatu struktur organisasi, yang mana struktur organisasi garis dan staf menjadi pilihan bentuknya.

Berikut ini digambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda :





Didalam struktur organisasi Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda terdiri dari :

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- 1.) Membantu Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2.) Melaksanakan tugas memimpin, merencanakan, mengorganisasikan , membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan dinas Pendapatan Daerah, Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis dinasnya serta mengkoordinasikan dengan Instansi Pengelola Pendapatan Daerah.

**b. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- 1.) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas, serta pemeliharaan kelengkapan kantor.
- 2.) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- 3.) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengadaan Benda Berharga, Blanko, Alat Tulis Kantor dan Barang Inventaris

4.) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan

**c. Sub Dinas Program dan Penyuluhan**

Sub Dinas Program dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan Pendapatan Daerah serta Penyuluhan Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pendapatan lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.) Sub Dinas Program dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a.) Melakukan perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari PBB. Melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk pada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lainnya serta pemungutan PBB.
- b.) Melakukan kerja sama dengan instansi yang vertical dan instansi otonomi daerah lainnya.
- c.) Melakukan penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi, Pendapatan Lainnya dan PBB.
- d.) Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target Pendapatan Daerah.

2.) Seksi – seksi pada Sub Dinas Program dan Penyuluhan terdiri dari :

- a.) Seksi Penyusunan Program

mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Daerah dan melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana Pajak Daerah, Retribusi, dan Pendapatan Daerah lainnya.

**b.) Seksi Pemantauan dan Pengendalian**

mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah dan melakukan bimbingan teknis operasional pada unit kerja dan menyusun rencana Pendapatan Daerah serta rencana intensifikasi pemungutan Pendapatan Daerah.

**c.) Seksi Pengembangan Pendapatan**

mempunyai tugas menggali, mengumpulkan dan mengelola data semua sumber Pendapatan Daerah, merumuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.

**d.) Seksi Evaluasi / Pelaporan**

mempunyai tugas mengevaluasi hasil / laporan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi, Pendapatan Daerah lainnya dan Barang / Benda Berharga serta menyusun strategi pencapaian target Pendapatan Daerah

#### **d. Sub Dinas Pendataan dan Penilaian**

Sub Dinas Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendapatan dan penilaian subyek / obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya, dan membantu melaksanakan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan Kantor Pelayanan PBB Samarinda.

1.) Sub Dinas Pendapatan dan Penilaian mempunyai fungsi :

- a.) Melakukan pendataan subyek / obyek Pajak Daerah dan menerima setoran retribusi dari Dinas-Dinas Badan dan Lembaga Teknis Daerah menghimpun dan mengolah data subyek / obyek Pajak Daerah serta Pendapatan lainnya melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan / penilaian atas pengembalian SPT yang disampaikan.
- b.) Menyusun daftar induk subyek / obyek Pajak Daerah, Retribusi dan mengadministrasikan datanya.
- c.) Membantu melakukan penyampaian SPOP-PBB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Samarinda, kepada subyek / obyek PBB serta menerima kembali isian SPOP PBB tersebut.

2.) Seksi – seksi pada Sub Dinas Pendataan dan Penilaian terdiri dari :

a.) Seksi Pendataan

mempunyai tugas menghimpun, mencatat dan mengelola data subyek / obyek pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya.melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi dan melaporkan

hasilnya serta membuat daftar formulir SPT yang belum diterima kembali.

**b.) Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar induk subyek / obyek Pajak Daerah dan Retribusi serta pendapatan lainnya. mmeberi kartu mengenai NPWD menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan penilaian serta membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada subyek / obyek pajak dan menerima kembali isian SPOP PBB dari para wajib pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PBB Samarinda.

**c.) Seksi Penyampaian dan Pengembalian SPPT serta SPOP , PBB**

mempunyai tugas mendistribusikan SPT Pajak Daerah,Retribusi serta Pendapatan lainnya dan SPOP PBB,serta mencatat nama dan alamat wajib pajak dan retribusi daerah / Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**d.) Seksi Pemeriksaan / Penilaian Data**

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan hasil SPT pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

**e. Sub Dinas Perhitungan dan Penetapan**

Sub Dinas Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah keteapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya, yang terhutang serta menghitung besarnya

angsuran atas permohonan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang menagihnya dilimpahkan kepada daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran(DHPP) PBB.

1.) Sub Dinas Perhitungan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a.) melakukan perhitungan, penetapan Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya.
- b.) melakukan perhitungan, jumlah angsuran / pembayaran / penyeteroran atas permohonan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang disetujui
- c.) menertibkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang berkaitan dengan penetapan
- d.) membantu melakukan penerimaan SPPT/PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Samarinda, yang mendistribusikan kepada subyek wajib pajak dan kepada Unit lain yang terkait

2.) Seksi – seksi pada Sub Dinas Perhitungan dan Penetapan terdiri dari :

- a.) Seksi Verifikasi dan Penetapan  
mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak daerah dan retribusi serta pendapatan lainnya
- b.) Seksi Penatausahaan/ Penerbitan SKPD/SKRD/SPPT-PBB

mempunyai tugas mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi serta membantu Kantor Pelayanan PBB Samarinda mengarsipkan dokumen PBB serta Pendapatan lainnya.

c.) Seksi Angsuran dan Evaluasi SKPD/SKRD/SPPT-PBB

mempunyai tugas menerima surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran serta mengevaluasi SKPD/ SKRD/SPPT PBB yang disampaikan.

e.) Seksi Penyampaian SKPD/SKRD/SPPT-PBB

mempunyai tugas mengkoordinir penyampaian SKPD/SKRD/SPPT PBB dan mengadministrasikannya.

**f. Sub Dinas Penagihan dan Penegakan Hukum**

Sub Dinas Penagihan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta penegakan hukum

1.). Sub Dinas Penagihan dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi :

- a.) Melakukan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b.) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai kewenangan.



- c.) Melakukan proses pemeriksaan hokum terhadap pelanggar Peraturan Daerah.
- d.) Membantu instansi lain dalam proses penagihan dan penegakan hukum.
- e.) Melaksanakan penagihan. memonitoring terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melalui petugas PBB di Kelurahan.

2.) Seksi – seksi pada Sub Dinas Penagihan dan Penegakan Hukum :

a.) Seksi Penagihan

mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan. Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui Surat Peringatan, Surat Teguran dan Surat Paksa.

b.) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

mempunyai tugas menerima dan mengelola surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya juga menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding.

c.) Seksi Pendapatan Lain – Lain

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber – sumber pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d.) Seksi Penegakan Hukum

mempunyai tugas melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**g. Sub Dinas Pembukuan dan Bagi Hasil Pendapatan**

Sub Dinas Pembukuan dan Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah, Pendapatan lainnya serta PBB dan mengelola benda berharga, membuat laporan bagi hasil pajak dan bukan hasil pajak

1.) Sub Dinas Pembukuan dan Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi :

- a.) Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan / pembayaran / penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya kedalam kartu pajak jenis pajak dan retribusi daerah, kartu wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta kedalam kartu pengawasan pembayaran (KPPBB 4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran ).
- b.) Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pendapatan dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga.
- c.) Menyiapkan laporan realisasi penerimaan, tunggakan pemungutan / pembayaran / penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan barang berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan

serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya dan PBB

2). Seksi – seksi pada Sub Dinas Pembukuan dan Bagi Hasil Pendapatan :

a.) Seksi Pembukuan, Penerimaan, Pelaporan

mempunyai tugas menerima dan mencatat semua tugas SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya, serta SPPT PBB, yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan / pembayaran PBB serta menghitung tunggakan dan menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi, pendapatan lainnya dan PBB serta realisasi penerimaan benda berharga.

b.) Seksi Persediaan Benda Berharga

mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran / pengambilan benda berharga, pendapatan hasil pemungutan benda berharga serta evaluasi persediaan benda berharga.

c.) Seksi Bagi Hasil Pajak

mempunyai tugas mengkoordinasi dengan instansi terkait dan mencatat serta membukukan dan membuat laporan bagi hasil pajak.

d.) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan mencatat serta membukukan membuat laporan hasil bukan pajak

**h. Cabang Dinas**

adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan yang berada atau ditempatkan di kecamatan dengan tugas membantu atau kepanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah guna memaksimalkan penanganan dan pendekatan kepada obyek pajak

**i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah**

adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan, mempunyai tugas :

- 1.) Melaksanakan tugas dinas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2.) Melaksanakan tugas membantu yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

**j. Kelompok Jabatan Fungsional**

unsur pelaksana operasional yang ada dan bertugas membantu pekerjaan teknis yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya di dalam Dinas Pendapatan Daerah, biasanya adalah tenaga – tenaga ahli dalam bidangnya contoh : Penera Pajak, PPNS dan lainnya

**B. Penyajian Data**

Pada pokok pembahasan ini, penulis menyajikan data untuk membantu menganalisa permasalahan yang ada, dari data penulis sajikan yaitu :

1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2003 s/d 2007
2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2003 s/d 2007

**TABEL 1 : TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH PADA KANTOR  
DINAS PENDAPATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2003 s/d  
2007**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
1	2003	19.800.000.000,00	22.141.530.040,63
2	2004	24.650.000.000,00	23.691.152.484,00
3	2005	26.350.000.000,00	27.550.246.915,00
4	2006	39.490.000.000,00	30.659.428.411,00
5	2007	35.660.600.000,00	35.043.429.432,00

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Samarinda

**TABEL 2 : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2003 s/d 2007**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
1	2003	54.102.000.000,00	58.562.119.231,00
2	2004	68.091.308.003,00	59.790.221.102,00
3	2005	70.031.502.000,00	73.041.802.739,00
4	2006	85.065.769.871,00	81.055.388.829,83
5	2007	97.409.067.120,00	106.922175.006,22

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Samarinda

## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. ANALISIS

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda, maka penulis memperoleh suatu gambaran kontribusi pendapatan dari Pajak Daerah mengalami kenaikan dan penurunan dalam tiap tahunnya terhadap pendapatan Asli Daerah.

Untuk mempermudah pembahasan yang akan dilaksanakan sesuai dengan alat analisis yang akan disajikan penulis, dengan menggunakan data diatas berupa Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rumus maka akan terlihat berapa besar tingkat kenaikan dan penurunan kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tabel yang disajikan.

Untuk melakukan perhitungan mengenai berapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka penulis akan menyajikan data dan rumus yang akan digunakan untuk menghitung besarnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari tahun 2003 s/d 2007.

#### Kontribusi Target Pajak Daerah terhadap Target PAD

Target Pendapatan Pajak Daerah

----- x 100%

Target PAD

Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

----- x 100%

Realisasi PAD

Adapun data yang akan digunakan untuk mencari besaran Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dalam bentuk prosentase dari tahun 2003 s/d 2007 seperti pada tabel 3.

Dengan menggunakan data yang telah disajikan pada Bab sebelumnya dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Kontribusi Target Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2003 s/d 2007.**

Kontribusi Target Pajak Daerah terhadap Target PAD

Target Pendapatan Pajak Daerah

----- x 100%

Target PAD

Tahun 2003

19.800.000.000,00

----- x 100% = 36,60 %

54,102.000.000,00

**Tahun 2004**

24.650.000.000,00

----- x 100% = 36,20 %

68.091.308.003,00

**Tahun 2005**

26.350.000.000,00

----- x 100% = 37,63 %

70.031.502.000,00

**Tahun 2006**

39.490.000.000,00

----- x 100% = 46,62 %

85.065.769.871,00

**Tahun 2007**

35.660.600.000,00

----- x 100% = 36,61 %

97.409.067.120,00

Untuk memperjelas hasil perhitungan Target Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada table berikut ini



**TABEL 3 : TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP  
TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2003 s/d 2007**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>	<b>TARGET PAD</b>	<b>%</b>
1	2003	19.800.000.000,00	54.102.000.000,00	36.60
2	2004	24.650.000.000,00	68.091.308.003,00	36.20
3	2005	26.350.000.000,00	70.031.502.000,00	37.63
4	2006	39.490.000.000,00	85.065.769.871,00	46.42
5	2007	35.660.600.000,00	97.409.067.120,00	36.61

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Samarinda dan diolah dari tabel 1 & 2

## **2. Analisis Kontribusi Target Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2003 s/d 2007**

Analisis ini menyajikan data target pendapatan pajak daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 hal ini untuk mengetahui rata – rata target kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

Rata – rata penerimaan pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 ditargetkan mengalami kenaikan. Hal ini dapat kita lihat dari tabel diatas bahwa

Pada tahun 2003 ditargetkan pendapatan pajak daerah Rp. 19.800.000.000,00 atau diharapkan memberikan kontribusi sebesar 36,60 % dari nilai target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapai pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 54.102.000.000,00 .

Pada tahun 2004 target kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ditargetkan tidak jauh dari sebelumnya yaitu hanya sebesar 36,20% dari nilai target pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 24.650.000.000,00 dan nilai Target Pendapatan Asli Daerah Rp.68.091.308.003,00.

Pada tahun 2005 target pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp. 26.350.000.000,00 yang diharapkan memberikan kontribusi sebesar 37,63 % terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang ditargetkan mencapai Rp. 70.031.502.000,00.

Namun pada tahun 2006 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada target Pendapatan Asli Daerah yang berada pada posisi Rp. 85.065.769.871,00 dan kontribusi yang diharapkan dari sektor pendapatan pajak daerah dapat memberikan kenaikan kontribusi sebesar 46,42 % dengan nilai target pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 39.490.000.000,00.

Kemudian pada tahun 2007 terjadi penurunan target pendapatan pajak daerah Rp 35.660.600.000,00 atau hanya berkontribusi sebesar 36,61% dari target Pendapatan Asli Daerah yang nilainya meningkat signifikan menjadi sebesar Rp. 97.409.067.120,00

**3. Perhitungan Kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2003 s/d 2007.**

Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

----- x 100%

Realisasi PAD

Tahun 2003

22.141.530.040,63

----- x 100% = 37,81 %

58.562.119.231,00

Tahun 2004

23.691.152.484,00

----- x 100% = 39,62 %

59.790.221.102,00

Tahun 2005

27.550.246.915,00

----- x 100% = 37,72 %

73.041.802.739,00

Tahun 2006

30.659.428.411,00

----- x 100% = 37,83 %

81.055.388.829,83

Tahun 2007

35.043.429.432,00

----- x 100% = 32,77 %

106.922175.006,22

Untuk memperjelas hasil perhitungan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 4 : REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2003 s/d 2007**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>	<b>REALISASI PAD</b>	<b>%</b>
1	2003	22.141.530.040,63	58.562.119.231,00	37.81
2	2004	23.691.152.484,00	59.790.221.102,00	39.62
3	2005	27.550.246.915,00	73.041.802.739,00	37,72
4	2006	30.659.428.411,00	81.055.388.829,83	37.83
5	2007	35.043.429.432,00	106.922.175.006,22	32.77

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Samarinda dan diolah dari tabel 1 & 2

#### **4. Analisis Kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2003 s/d 2007**

Analisis ini menyajikan data realisasi pendapatan pajak daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 hal ini untuk mengetahui rata – rata realisasi kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

Rata – rata penerimaan pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 ditargetkan mengalami kenaikan. Hal ini dapat kita lihat dari tabel diatas bahwa :

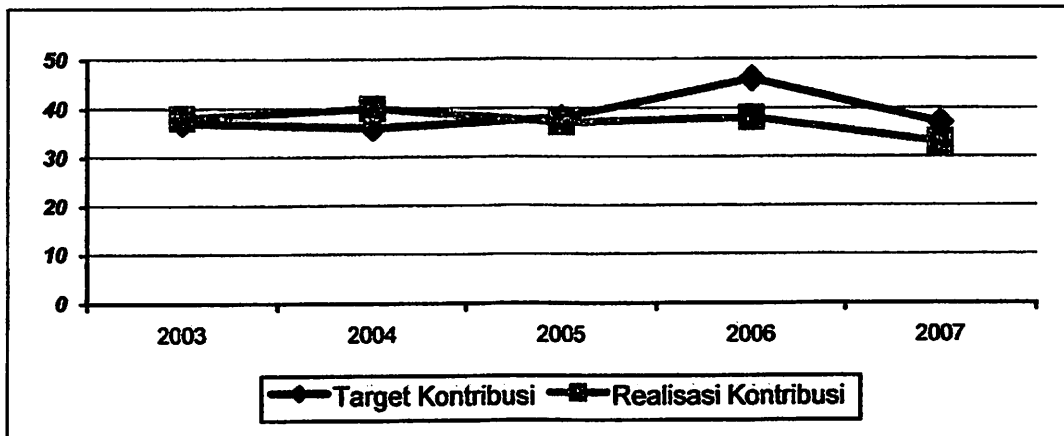
- Pada tahun 2003 realisasi pendapatan pajak daerah Rp. 22.141.530.040,63 atau memberikan kontribusi sebesar 37,81% dari nilai Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 58.562.119.231,00.
- Pada tahun 2004 realisasi kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah naik dari sebelumnya menjadi sebesar 39,62 % dari nilai realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 23.691.152.484,00 dan nilai Pendapatan Asli Daerah Rp. 59.790.221.102,00.
- Pada tahun 2005 realisasi pendapatan dari pajak daerah naik nilainya menjadi Rp.27.550.246.915,00 meskipun secara persentase kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi hanya sebesar 37,72 % sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda realisasinya mencapai Rp. 73.041.802.739,00

- Namun pada tahun 2006 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada Pendapatan Asli Daerah yang berada pada posisi Rp.81.055.388.829,83 dan kontribusi yang diharapkan dari sektor pendapatan pajak daerah hanya dapat memberikan kenaikan tipis dengan kontribusi sebesar 37,83% dengan nilai pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 30.659.428.411,00.
- Namun pada tahun 2007 terjadi kenaikan cukup besar pada sektor pendapatan pajak daerah menjadi Rp. 35.043.429.432,00 atau hanya berkontribusi sebesar 32,77 % dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang nilainya meningkat signifikan menjadi sebesar Rp. 106.922.175.006,22

## **B. PEMBAHASAN.**

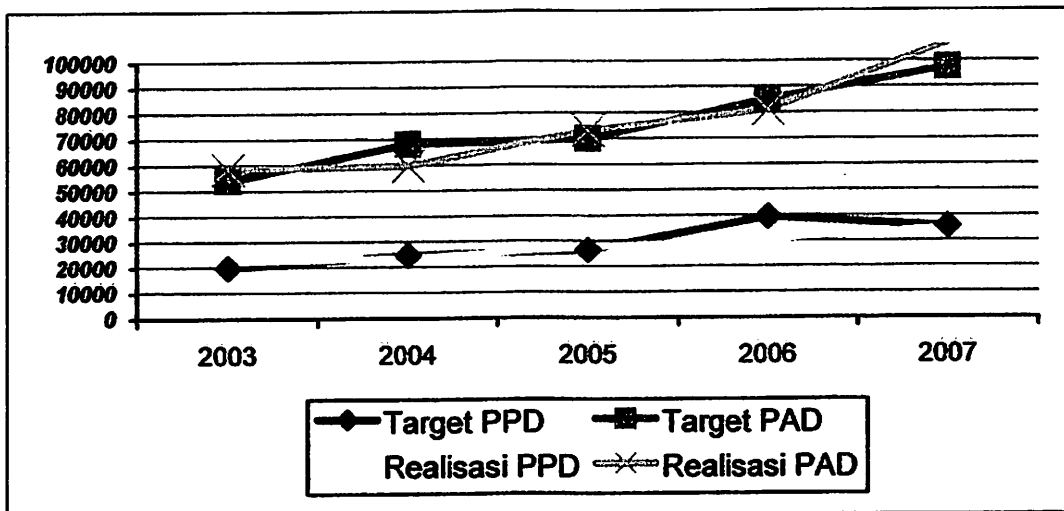
Untuk mempermudah memahami pokok masalah yang dibahas penulis menyajikan grafik yang akan menggambarkan grafik target dan realisasi besarnya kontribusi Pendapatan dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Dari grafik tersebut akan dapat terlihat dengan jelas tingkat kenaikan dan penurunan besarnya kontribusi dari Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2007

**GAMBAR 2 : GRAFIK TARGET DAN REALISASI KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2003 s/d 2007 BERDASARKAN PERSENTASE**



Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Samarinda dan diolah dari tabel 3 & 4

**GAMBAR 3 : GRAFIK TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2003 s/d 2007 BERDASARKAN NILAI**



Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Samarinda dan diolah dari tabel 3 & 4

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Samarinda dan diolah dari tabel 3 & 4

Setelah mengetahui besarnya target dan realisasi pendapatan pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah beserta komponen – komponennya selama kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2007, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang rata – rata kenaikan dan penurunan kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Pada tahun 2003 ditargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 54,102.000.000,00 dan Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah diharapkan adalah 36.60 % dari jumlah target yaitu sebesar Rp. 19.800.000.000,00. Namun pada realisasinya pada tahun 2003 tersebut Pendapatan Asli Daerah melebihi jauh diatas target awal yaitu sebesar Rp.58.562.119.231,00 dimana kontribusi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar 37,81 % dari jumlah tersebut yaitu senilai Rp. 22.141.530.040,63 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah tidak lepas dari adanya partisipasi dari masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan mulainya Kalimantan Timur khususnya Samarinda mulai dilirik oleh para investor untuk mulai membuka usaha baru.

Pada tahun 2004 ditargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 68.091.308.003,00 dan Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah diharapkan adalah 36.20 % dari jumlah target yaitu sebesar Rp. 24.650.000.000,00. Namun pada realisasinya pada tahun 2004 tersebut Pendapatan Asli Daerah melebihi jauh diatas target awal yaitu sebesar



Rp.59.790.221.102,00 dimana kontribusi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar 39,62 % dari jumlah tersebut yaitu senilai Rp. 23.691.152.484,00 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah keadaan perekonomian di Samarinda mulai membaik setelah krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, hal ini dipicu juga oleh mulai dibukanya kran otonomi daerah sehingga semakin merangsang para investor untuk membuka dan menanamkan modalnya di Samarinda.

Pada tahun 2005 ditargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.70.031.502.000,00 dan Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah diharapkan adalah 37,63 % dari jumlah target yaitu sebesar Rp.26.350.000.000,00 . Namun pada realisasinya pada tahun 2005 tersebut Pendapatan Asli Daerah melebihi jauh diatas target awal yaitu sebesar Rp.73.041.802.739,00 dimana kontribusi Pendapatan Pajak Daerah mengalami sedikit penurunan sebesar 37,72 % dari jumlah tersebut yaitu senilai Rp. 27.550.246.915,00 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah dikarenakan mulai dibangunnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung usaha membuat keadaan perekonomian di Samarinda sangat bagus sebagai tempat untuk membuka usaha – usaha baru dan hal inilah yang menarik investor untuk menanamkan modalnya, dimana dengan adanya usah –usaha baru itu diharapkan Pendapatan Pemerintah Daerah bisa meningkat guna percepatan program pembangunan di Kota Samarinda.

Pada tahun 2006 ditargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.85.065.769.871,00 dan Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah diharapkan adalah 46,42 % dari jumlah target yaitu sebesar Rp.39.490.000.000,00 . Namun pada realisasinya pada tahun 2006 tersebut Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan target awal yaitu sebesar Rp 81.055.388.829,83. meskipun kontribusi Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan tipis sebesar 37,83 % dari jumlah tersebut yaitu senilai Rp. 30.659.428.411,00 Penurunan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah dampak dari banyaknya sarana dan prasarana penunjang usaha banyak yang dibangun dan dibangun seperti jalan, jembatan, kompleks industri memadai sehingga sedikit menarik minat investor untuk membuka usaha di Kota Samarinda.

Pada tahun 2007 ditargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.97.409.067.120,00 dan Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah diharapkan adalah 36,61 % dari jumlah target yaitu sebesar Rp.35.660.600.000,00 . Namun pada realisasinya pada tahun 2007 tersebut Pendapatan Asli Daerah melebihi jauh diatas target awal yaitu sebesar Rp106.922.175.006,22. dimana kontribusi Pendapatan Pajak Daerah adalah menurun menjadi sebesar 37,77 % dari jumlah tersebut yaitu senilai Rp.35.043.429.432,00 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah keadaan perekonomian di Samarinda mulai bergerak

kembali sehingga semakin merangsang para investor untuk membuka dan menanamkan modalnya di Samarinda.

Dari hasil perhitungan tersebut jelas terlihat besaran Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang bervariasi pada setiap tahun anggarannya. Dan Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yang terealisasi tidak selalu lebih besar dari target yang diharapkan hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda belum maksimal dalam mengelola potensi Pendapatan Asli Daerahnya khususnya Pendapatan Pajak Daerah meskipun dalam angka selalu mengalami kenaikan yang signifikan nilainya namun secara prosentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan dalam hal pencapaian target. Adapun kontribusi yang paling besar terjadi adalah pada tahun 2004 sebesar 39,62 %

Jika kita amati maka prosentase terbesar Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 39,62 % yang nominalnya sebesar Rp. 23.691.152.484,00 akan tetapi jika secara jumlah uang (nominal) maka Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang paling besar nilainya adalah terjadi pada tahun 2007 yaitu dengan nilai Rp. 35.043.429.432,00 yang prosentasenya hanya pada posisi 32,77 %.

Oleh karena itu berbagai cara telah ditempuh untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari tahun ke tahun secara optimal dan maksimal agar

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah melalui pungutan pajaknya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang umum terjadi diantaranya :

1. Sistem Pelayanan yang masih kurang maksimal.
2. Kesadaran dan ketaatan dari wajib pajak yang masih kurang untuk memenuhi kewajibannya.
3. Lemahnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis laksanakan pada Dinas Pendapatan Kota Samarinda dan hasil perhitungan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa prosentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2004 serta mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata – rata tingkat kontribusinya ditargetkan 38% dengan tingkat realisasinya rata- rata 37% hal ini menjawab hipotesis penulis pada bab awal penelitian ini yang meduga bahwa tingkat kontribusi rata – rata pendapatan pajak daerah diatas 35 % terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota (PAD) Samarinda.

Adapun tingkat perkembangan Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yaitu :

- Tahun 2003

Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan prosentase realisasi kontribusi Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melebihi dari yang telah ditargetkan dikarenakan pemerintah telah menggalang pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta mulainya Kalimantan Timur khususnya Samarinda mulai dilirik oleh para investor untuk mulai membuka usaha baru.

- Tahun 2004

Mengalami kenaikan juga dari tahun sebelumnya dan prosentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melebihi dari yang telah ditargetkan karena adanya peran serta dari masyarakat dalam membayar pajak dan juga keadaan perekonomian di Samarinda mulai membaik setelah krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, hal ini dipicu juga oleh mulai dibukanya kran otonomi daerah sehingga semakin merangsang para investor untuk membuka dan menanamkan modalnya di Samarinda.

- Tahun 2005

Mengalami penurunan prosentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah namun ada kenaikan pada nilai uang (nominal) yang didapatkan dari tahun sebelumnya dikarenakan mulai dibangunnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung usaha membuat keadaan perekonomian di Samarinda sangat bagus sebagai tempat untuk membuka usaha – usaha baru dan hal inilah yang menarik investor untuk menanamkan modalnya, dimana dengan adanya usaha – usaha baru itu diharapkan Pendapatan Pemerintah Daerah bisa meningkat guna percepatan program pembangunan di Kota Samarinda..

- Tahun 2006

Mengalami penurunan prosentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah namun ada kenaikan pada nilai uang (nominal) yang didapatkan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan

dampak dari banyaknya sarana dan prasarana penunjang usaha banyak yang dibenahi dan dibangun seperti jalan, jembatan, kompleks industri memadai sehingga sedikit menarik minat investor untuk membuka usaha di Kota Samarinda.

-Tahun 2007

Mengalami penurunan prosentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah namun ada kenaikan pada nilai uang (nominal) yang didapatkan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan keadaan perekonomian serta dipilihnya Propinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda untuk menjadi tuan rumah Pekan OlahRaga Nasional ke XVII pada tahun 2008 sehingga membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Samarinda mulai bergerak kembali sehingga semakin menarik para investor untuk membuka dan menanamkan modalnya di Samarinda

Target kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda berfluktuasi yaitu pada tahun 2003 sebesar 36,60% dengan realisasi 37,81%, di tahun 2004 ditargetkan berkontribusi sebesar 36,20% dengan realisasi naik menjadi 39,62%, sedangkan tahun 2005 target kontribusi 37,63% dan realisasi pada tahun itu hanya sebesar 37,72%, dan pada tahun 2006 ditargetkan naik kontribusinya pada 46,42% namun hanya terealisasi 37,83%, di tahun 2007 target kontribusi 36,61% dengan realisasi hanya sebesar 32,77%. Jadi, rata – rata kontribusi Pajak

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk targetnya adalah sebesar 38,69% dengan rata – rata realisasi kontribusi sebesar 37,15%

Rata – rata besaran nilai persentase target kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda yang memiliki nilai target kontribusi tertinggi selama 5 tahun adalah pada tahun 2006 sebesar 46,42 % sedangkan untuk realisasi yang memberikan kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2004 yaitu sebesar 39,62 %

## **B. SARAN - SARAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan banyak kekurangan yang dapat mempengaruhi jalannya mekanisme pemungutan yang berdampak pada peningkatan penerimaan PAD. Maka dari itu, penulis akan memberikan saran-saran yang berguna bagi semua pihak. Dalam upaya meningkatkan PAD khususnya pajak daerah di Kota Samarinda, maka dapat ditempuh dengan cara:

1. Melakukan intensifikasi dalam bentuk perubahan tarif pajak daerah dan peningkatan pengelolaan pajak daerah.
2. Melakukan ekstensifikasi sebagai salah satu kebijaksanaan penciptaan sumber-sumber pajak daerah oleh pemerintah kabupaten dan kota.
3. Meningkatkan kualitas aparat pemungut antara lain dengan diadakannya pelatihan dan studi banding maupun diskusi-diskusi sehingga petugas dapat mengetahui dan lancar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan.



4. Mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat atas kewajibannya membayar pajak yang merupakan langkah penting dalam usaha meningkatkan laju pemasukan PAD.
5. Penempatan karyawan dalam instansi perlu memperhatikan keahlian yang dimiliki oleh masing - masing individu untuk menempati posisi yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
6. Melakukan penyederhanaan prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
7. Memperbaiki sistem pengumpulan pajak daerah agar dapat meningkatkan PAD yaitu dengan dimilikinya sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan telah di-posting ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan ada keamanan yang cukup dari bahaya pencurian, hilang atau salah hitung, pada setiap tahun sangat perlu bahwa catatan-catatan tersebut di cross-checked dan dilakukan pengecekan mendadak oleh staf senior secara acak, pelaporan hasil pengumpulan pajak daerah perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bila terjadi masalah, dan metode menghitung potensi pajak daerah yang efektif.

8. Memberikan sanksi yang tegas kepada aparat pemungut pajak yang melanggar atau memberikan pelayanan yang tidak semestinya dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau melebihi jangka waktu yang ditentukan.

## R E F E R E N S I

- ..... *Peraturan pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Tahun 2001, Penerbit Citra Umbara Bandung
- ..... *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989 Edisi ke II, Penerbit Balai Pustaka Jakarta.
- A.Azhari, Samudra., 1985. *Perpajakan Di Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Aini, Hamdan., 1993, *Perpajakan*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Barata, Atep Adya., 1999, *Perpajakan Jilid I*, Penerbit CV.Armico Bandung.
- Brotodiharja, Santoso., 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit PT. Refika Aditama Bandung.
- Judiseno Rimsky.K, 1996, *Perpajakan* Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo., 2003, *Perpajakan Edisi Revisi* , Penerbit Andi Yogyakarta.
- Priantara. Diaz., 2000, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Penerbit Djembatan Jakarta.
- Rachim Abdul. 2005, *Perpektif Pendapatan Daerah*, Penerbit BPS Kota Samarinda
- Samudra Azahari A. 1995, *Perpajakan di Indonesia* Penerbit Gramedia Pustaka Utama
- Santosa Agus ,1993, *Perpajakan Indonesia* Penerbit Satya Wacana Semarang
- Soemitro, Rochmat., 1987, *Azas dan Dasar Perpajakan I*, Penerbit PT.Eresco Bandung
- Siahaan Marihot P., 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada
- Salim Nasution, Agus. 1986. *Buku Materi Pokok Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit Karunika Universitas Terbuka

Sarjadi, Soegeng. 2001. *Otonomi Potensi Masa Depan Republik Indonesia*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sugiyono, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis* Penerbit Alfa Beta Bandung

**REKAPITULASI  
TARGET PENDAPATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2004**

thn. 2003.

No.	JENIS PENERIMAAN	JUMLAH ABT 2003 (Rp)	JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER 2003 (Rp)	%	JUMLAH TARGET 2004 (Rp)	KENAIKAN (6.-4) (Rp)..	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PENDAPATAN	639.736.229.000,00	605.085.144.497,71	94,58	646.525.499.000,00	41.440.354.502,29	6,35
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH :	54.102.000.000,00	58.562.119.231,20	108,24	62.523.000.000,00	3.960.880.768,80	6,76
	1.1. Pajak Daerah	19.800.000.000,00	22.141.530.040,63	111,83	24.150.000.000,00	2.008.469.959,37	9,07
	1.2. Retribusi Daerah	19.482.000.000,00	21.039.398.886,95	107,99	22.973.000.000,00	1.933.601.113,05	9,19
	1.3. Bagian Laba Badan Usaha Daerah	950.000.000,00			1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	
	1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.870.000.000,00	15.381.190.303,62	110,90	13.950.000.000,00	(1.431.190.303,62)	(9,30)
	2. DANA PERHIBANGAN :	585.634.229.000,00	546.523.025.266,51	93,32	584.002.499.000,00	37.479.473.733,49	6,86
	2.1. BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK / SUMBER DAYA ALAM						
	2.1.1. Bagi Hasil Pajak	53.500.000.000,00	47.637.632.752,00	89,04	60.000.000.000,00	12.362.367.248,00	25,95
	2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	250.250.000.000,00	231.592.066.662,45	92,54	257.750.000.000,00	26.157.933.337,55	11,29
	2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	220.000.000.000,00	200.423.817.500,00	91,10	207.502.499.000,00	7.078.681.500,00	3,53
	2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	634.229.000,00			500.000.000,00	500.000.000,00	
	2.4. Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Dari Propinsi	61.250.000.000,00	66.869.508.352,06	109,17	58.250.000.000,00	(8.619.508.352,06)	(12,89)
	3. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH						
B.	PEMBIAYAAN	98.490.961.882,00	6.250.961.882,22	6,35	44.195.410.334,00	37.944.446.451,76	607,02
	1. PENERIMAAN DAERAH						
	1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	86.250.961.882,00	6.250.961.882,22	7,25	31.955.410.334,00	25.704.448.451,78	411,21
	1.2. Transfer dari Dana Cadangan	12.240.000.000,00			12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	
	1.3. Penerimaan Pinjaman & Obligasi						
	1.4. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan						
C.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ( UKP )	16.313.368.271,00	18.130.804.600,00	111,14	15.000.000.000,00	(3.130.804.600,00)	(17,27)
	JUMLAH	754.540.559.153,00	629.466.910.979,93	83,42	705.720.909.334,00	76.253.998.354,07	12,11



TARGET PENDAPATAN  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2004

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ABT 2003	REALISASI S.D DESEMBER 2003	%	TARGET 2004	KURANG / LEBIH	%	INSTANSI PENUNGGUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>								
<b>PAJAK DAERAH</b>								
1 01 005 1 1 01 01	PAJAK HOTEL	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.314.393.938,00	105,15	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	40,00	DIPENDA
1 01 005 1 1 02 01	PAJAK RESTORAN	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 3.980.968.484,00	113,97	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	14,25	DIPENDA
1 01 005 1 1 03 01	PAJAK HIBURAN	Rp. 450.000.000,00	Rp. 539.862.794,00	119,97	Rp. 500.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	11,11	DIPENDA
1 01 005 1 1 04 01	PAJAK REKLAME	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.379.482.494,38	110,36	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	60,00	DIPENDA
1 01 005 1 1 05 01	PAJAK KONSUMSI LISTRIK :	Rp. 12.550.000.000,00	Rp. 14.198.097.230,75	113,13	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 2.450.000.000,00	19,52	
1 01 005 1 1 05 01	a. Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp. 12.500.000.000,00	Rp. 14.146.361.104,00	113,17	Rp. 14.950.000.000,00	Rp. 2.450.000.000,00	19,60	PT. PLN CAB. SAMARINDA
1 01 005 1 1 05 02	b. Genset / Generator	Rp. 50.000.000,00	Rp. 51.736.126,75	103,47	Rp. 50.000.000,00	Rp. -	-	DIPENDA
1 04 001 1 1 06 01	PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL C	Rp. 200.000.000,00	Rp. 238.643.649,50	119,32	Rp. 300.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	50,00	KTR FERTAMBANGAN & ENERGI
1 16 001 1 1 07 01	PAJAK PARKIR	Rp. 600.000.000,00	Rp. 482.081.450,00	80,35	Rp. 600.000.000,00	Rp. -	-	DINAS PERHUBUNGAN
<b>JUMLAH H.1.</b>								
		Rp. 19.800.000.000,00	Rp. 22.141.530.040,63	111,83	Rp. 24.150.000.000,00	Rp. 4.350.000.000,00	21,97	
<b>REtribusi DAERAH</b>								
1 10 001 1 2 01	RET. PELAYANAN KESEHATAN :	Rp. 815.000.000,00	Rp. 941.967.800,00	115,58	Rp. 920.000.000,00	Rp. 105.000.000,00	12,88	
1 10 001 1 2 01 01	a. Pelayanan Kesehatan	Rp. 800.000.000,00	Rp. 912.062.750,00	114,01	Rp. 900.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	12,50	DINAS KESEHATAN
1 10 005 1 2 01 07	b. Penerimaan Peserta PHB / ASKES	Rp. 15.000.000,00	Rp. 29.905.050,00	199,37	Rp. 20.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	33,33	PT. ASKES
1 01 005 1 2 02 01	RET. KEBERSIHAN KOTA (RIK)	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 1.853.021.556,47	92,65	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	12,50	DIPENSA/BANK/PLN/KOPERASI
1 18 001 1 2 03 01	RET. PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP & AKTA CAPIL	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.262.116.100,00	100,97	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. (250.000.000,00)	(20,00)	KANPENDUK
1 17 001 1 2 06 01	RET. PELAYANAN PEMAKAMAN dan PENGABUAN JENAZAH	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.715.000,00	106,14	Rp. 4.000.000,00	Rp. 500.000,00	14,29	K R P P
1 16 001 1 2 07 01	RET. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM :	Rp. 1.507.500.000,00	Rp. 1.149.532.900,00	76,25	Rp. 1.757.500.000,00	Rp. 250.000.000,00	16,58	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 07 01	a. ASDP / LLAJ	Rp. 7.500.000,00	Rp. 10.592.900,00	141,24	Rp. 7.500.000,00	Rp. -	-	
1 16 001 1 2 07 02	b. SAMSAT	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.138.940.000,00	75,93	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	15,67	
1 06 002 1 2 08	RET. PASAR :	Rp. 1.780.000.000,00	Rp. 1.687.418.398,00	94,80	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. (30.000.000,00)	(1,69)	
1 2 08 01	a. Dinas Pasar	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 1.669.918.398,00	95,42	Rp. 1.720.000.000,00	Rp. (30.000.000,00)	(1,71)	DINAS PASAR
1 2 08 02	b. Pasar Swadana Citra Niaga	Rp. 30.000.000,00	Rp. 17.500.000,00	58,33	Rp. 30.000.000,00	Rp. -	-	UNIT CITRA NIAGA
1 16 001 1 2 09	RET. PENGLUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp. 500.000.000,00	Rp. 805.235.000,00	161,06	Rp. 900.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	80,00	DINAS PERHUBUNGAN
1 14 002 1 2 10	RET. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 75.000.000,00	Rp. 61.629.500,00	82,17	Rp. 50.000.000,00	Rp. (25.000.000,00)	(33,33)	KTR. PEMADAM KEBAKARAN
1 2 10 01	a. Ret. Alat Pemadam Kebakaran	Rp. 25.000.000,00	Rp. 11.177.500,00	44,71	Rp. 10.000.000,00	Rp. (15.000.000,00)	(60,00)	
1 2 10 02	b. Rekomendasi Pemadam	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.452.000,00	100,90	Rp. 40.000.000,00	Rp. (10.000.000,00)	(20,00)	

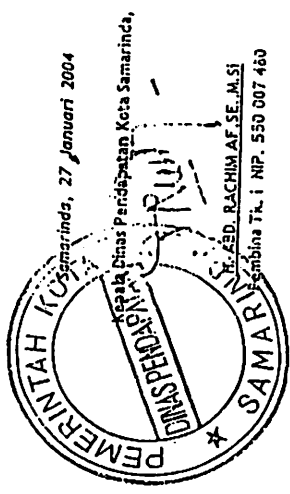
KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ABT 2003		REALISASI S.D DESEMBER 2003		%	TARGET 2004	KURANG / LEBIH	%	INSTANSI PENINGGUT
		3	4	5	6					
1 01 003 1 2 13 01	REK. PENERIMAAN KEMAJUAN URAHAT :	Rp. 150.000.000,00	Rp. 142.859.946,60	95,24	Rp. 195.000.000,00	Rp. 45.000.000	30,00			9
1 15 001 1 2 13 02	a. Izin Pemaknaan Tanah / Bangunan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 7.912.184,00	79,12	Rp. 40.000.000,00	Rp.				BAGIAN PERKOTAAN
1 16 004 1 2 13 18	b. Sewa Alat Berat	Rp. 30.000.000,00		-	Rp. 35.000.000,00	Rp. 5.000.000				
1 14 001 1 2 13 04	c. Pemaknaan Fasilitas Dermaga	Rp. 100.000.000,00	Rp. 124.968.600,00	124,97	Rp. 140.000.000,00	Rp. 40.000.000				DINAS PERHUBUNGAN
1 16 002 1 2 16	d. Sewa Rumah Dinas	Rp. 10.000.000,00	Rp. 9.979.162,60	99,79	Rp. 10.000.000,00	Rp.				DISKUMBANGKOT
1 17 001 1 2 19	RET. TERMINAL	Rp. 500.000.000,00	Rp. 384.121.450,00	76,82	Rp. 600.000.000,00	Rp. 100.000.000				DINAS PERHUBUNGAN
1 02 002 1 2 20	RET. PENYEDOTAN KAKUS	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.700.000,00	101,40	Rp. 52.500.000,00	Rp. 2.500.000				K K P P
1 03 001 1 2 21	RET. RUMAH POTONG HEWAN	Rp. 232.000.000,00	Rp. 230.119.000,00	99,19	Rp. 250.000.000,00	Rp. 18.000.000				KANTOR PETERNAKAN
1 14 001 1 2 26	RET. TEMPAT Pendaratan Kapal	Rp. 200.000.000,00	Rp. 191.042.950,00	95,52	Rp. 225.000.000,00	Rp. 25.000.000				KANTOR PERIKANAN
1 14 001 1 2 26 01	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN :	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.625.111.166,48	120,84	Rp. 4.230.000.000,00	Rp. 1.230.000.000				
1 14 001 1 2 26 02	a. I M B	Rp. 2.600.000.000,00	Rp. 3.386.006.266,48	120,93	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 1.200.000.000				DISKUMBANGKOT
1 14 001 1 2 26 03	b. Urusan Perumahan / Perusahaan Fungsi	Rp. 190.000.000,00	Rp. 237.152.900,00	124,82	Rp. 225.000.000,00	Rp. 35.000.000				DISKUMBANGKOT
1 14 001 1 2 26 03	c. Surat Izin Pemukiman	Rp. 10.000.000,00	Rp. 1.952.000,00	19,52	Rp. 5.000.000,00	Rp. (5.000.000)				DISKUMBANGKOT
1 06 001 1 2 27	RET. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	Rp. 750.000.000,00	Rp. 568.778.000,00	75,84	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 250.000.000				
1 06 001 1 2 27 01	a. Izin Tempat	Rp. 50.000.000,00	Rp.	-	Rp. 50.000.000,00	Rp.				BAGIAN PERKOTAAN
1 06 001 1 2 27 02	b. Labeling	Rp. 700.000.000,00	Rp. 568.778.000,00	81,25	Rp. 950.000.000,00	Rp. 250.000.000				DISPERINDAG
1 01 003 1 2 28	RET. IZIN GANGGUAN ( H O )	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.446.941.257,50	120,58	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. (200.000.000)				BAGIAN PERKOTAAN
1 16 001 1 2 29	RET. IZIN TRAYEK	Rp. 100.000.000,00	Rp. 73.420.000,00	73,42	Rp. 75.000.000,00	Rp. (25.000.000)				DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 30	RET. IZIN ANGKUTAN ORANG	Rp. 50.000.000,00	Rp. 18.048.000,00	36,10	Rp. 49.500.000,00	Rp. (500.000)				DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 31	RET. IZIN ANGKUTAN BARANG	Rp. 80.000.000,00	Rp. 75.153.000,00	93,64	Rp. 87.500.000,00	Rp. 7.500.000				DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 32	RET. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI	Rp. 20.000.000,00	Rp. 25.254.000,00	126,27	Rp. 28.000.000,00	Rp. 8.000.000				DINAS PERHUBUNGAN
1 15 001 1 2 33	RET. GERObAK SORONG	Rp. 2.000.000,00	Rp. 3.200.000,00	160,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 8.000.000				DINAS PERHUBUNGAN
1 06 001 1 2 34	RET. IZIN PEMBUATAN BADAH KAPAL	Rp. 200.000.000,00	Rp. 160.500.199,00	80,25	Rp. 200.000.000,00	Rp.				DISPERINDAG
1 16 001 1 2 35	RET. MOBIL DEREK	Rp. 10.000.000,00	Rp. 8.740.000,00	87,42	Rp. 10.000.000,00	Rp.				DINAS PERHUBUNGAN
1 01 005 1 2 36	RET. TEMPAT PENCUCIAN KENDARAAN BERHOTOR	Rp. 25.000.000,00	Rp. 28.614.425,00	114,45	Rp. 35.000.000,00	Rp. 10.000.000				DIPENDA
1 18 001 1 2 37	RET. LEGES DAN BIAYA ADMINISTRASI	Rp. 125.000.000,00	Rp. 190.899.750,00	152,72	Rp. 135.000.000,00	Rp. 10.000.000				KANPENDUK / DIPENDA
1 17 001 1 2 38	RET. LIMBAH DOMESTIK / LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 25.000.000,00	Rp. 16.900.000,00	67,60	Rp. 25.000.000,00	Rp.				BAPEDALA
1 05 001 1 2 39	RET. PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 5.061.065.746,50	126,53	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000				CAB. DINAS KEMUTYAHAN
1 01 003 1 2 40	RET. TEMPAT PENUMPUNGAN KAYU BUNDAH / KAYU									
1 02 002 1 2 41	MASAK DAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	Rp. 10.000.000,00	Rp.	-	Rp. 15.000.000,00	Rp. 5.000.000				KTR SATPOL PP
1 06 001 1 2 42	RET. USAHA PETERNAKAN, PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS	Rp. 9.500.000,00	Rp. 19.080.000,00	200,84	Rp. 10.000.000,00	Rp. 500.000				KANTOR PETERNAKAN
1 09 001 1 2 43 01	SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS, TELUR UNGGAS	Rp. 300.000.000,00	Rp. 304.475.000,00	101,49	Rp. 350.000.000,00	Rp. 50.000.000				DISPERINDAG
1 09 001 1 2 43 01	RET. IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	Rp. 150.000.000,00	Rp. 181.833.400,00	121,22	Rp. 250.000.000,00	Rp. 100.000.000				DISMAKER





KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ABT 2003		REALISASI S.D DESEMBER 2003		TARGET 2004		KURANG / LEBIH		%	INSTANSI PEMUNGUT	
		3	4	5	6	7	8					
1 01 003 2 1 01 03	PAJAK PENGHASILAN :	Rp.	22.000.000.000,00	Rp.	12.990.682.500,00	59,05	Rp.	22.500.000.000,00	Rp.	500.000.000	2,27	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	a. Pasal 21	Rp.	19.500.000.000,00	Rp.	12.572.317.500,00	64,47	Rp.	20.000.000.000,00	Rp.	500.000.000	2,56	
	b. Pasal 25 / 29	Rp.	2.500.000.000,00	Rp.	418.365.000,00	16,73	Rp.	2.500.000.000,00	Rp.	-	-	
	JUMLAH 2.1.01	Rp.	53.500.000.000,00	Rp.	47.637.632.752,00	89,04	Rp.	60.000.000.000,00	Rp.	6.500.000.000,00	12,15	
1 01 003 2 1 02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SUMBER DAYA ALAM	Rp.	750.750.000.000,00	Rp.	734.507.044.447,45	97,84	Rp.	750.000.000.000,00	Rp.	750.000.000.000	2,14	
	SUMBER DAYA ALAM :	Rp.	15.000.000.000,00	Rp.	13.805.748.869,56	92,04	Rp.	10.000.000.000,00	Rp.	(5.000.000.000)	(33,33)	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	a. Sektor Kehutanan :	Rp.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	Rp.	-	-	
	- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	Rp.	15.000.000.000,00	Rp.	13.805.748.869,56	92,04	Rp.	10.000.000.000,00	Rp.	(5.000.000.000)	(33,33)	
	- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp.	20.000.000.000,00	Rp.	25.939.787.136,89	129,70	Rp.	27.500.000.000,00	Rp.	7.500.000.000	37,50	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	b. Sektor Pertambangan Umum :	Rp.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	Rp.	-	-	
	- Iuran Tetap (Landrent)	Rp.	5.000.000.000,00	Rp.	6.113.120.803,89	122,26	Rp.	5.000.000.000,00	Rp.	-	-	
	- Iuran Eksplorasi	Rp.	15.000.000.000,00	Rp.	19.826.666.333,00	132,18	Rp.	22.500.000.000,00	Rp.	7.500.000.000	50,00	
	- Iuran Eksploitasi (Royalty)	Rp.	250.000.000,00	Rp.	190.919.913,00	76,37	Rp.	250.000.000,00	Rp.	-	-	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	c. Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp.	150.000.000.000,00	Rp.	41.614.727.087,00	27,74	Rp.	60.000.000.000,00	Rp.	(90.000.000.000)	(60,00)	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	d. Pungutan Hasil Perikanan	Rp.	65.000.000.000,00	Rp.	150.040.883.656,00	230,83	Rp.	160.000.000.000,00	Rp.	95.000.000.000	146,15	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	e. Minyak Bumi	Rp.	250.250.000.000,00	Rp.	231.592.066.682,45	92,54	Rp.	257.750.000.000,00	Rp.	7.500.000.000,00	3,00	
	f. Gas Alam	Rp.	270.000.000.000,00	Rp.	200.423.817.500,00	91,10	Rp.	207.502.499.000,00	Rp.	(12.497.501.000)	(5,68)	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	JUMLAH 2.2	Rp.	270.000.000.000,00	Rp.	200.423.817.500,00	91,10	Rp.	207.502.499.000,00	Rp.	(12.497.501.000)	(5,68)	
	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Rp.	534.229.000,00	Rp.	-	-	Rp.	509.060.000,00	Rp.	(134.229.000)	(21,15)	DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Rp.	634.229.000,00	Rp.	-	-	Rp.	500.000.000,00	Rp.	(134.229.000)	(21,16)	
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) / Reboisasi	Rp.	27.250.000.000,00	Rp.	25.859.508.352,06	94,93	Rp.	38.250.000.000,00	Rp.	11.050.000.000	40,37	DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
	BAGI HASIL PAJAK & BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	Rp.	13.000.000.000,00	Rp.	6.006.676.414,00	46,21	Rp.	15.000.000.000,00	Rp.	2.000.000.000	15,38	DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
	BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	Rp.	3.500.000.000,00	Rp.	8.359.872.424,00	240,00	Rp.	10.000.000.000,00	Rp.	6.500.000.000	193,71	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	BANTUAN KEUANGAN BERMOTOR (BKNB)	Rp.	10.000.000.000,00	Rp.	10.764.794.121,61	107,65	Rp.	12.500.000.000,00	Rp.	2.500.000.000	25,00	
	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Rp.	750.000.000,00	Rp.	698.165.392,45	93,09	Rp.	750.000.000,00	Rp.	-	-	
	BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR	Rp.	34.000.000.000,00	Rp.	41.000.000.000,00	120,59	Rp.	20.000.000.000,00	Rp.	(14.000.000.000)	(41,18)	
	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBKB)	Rp.	34.000.000.000,00	Rp.	41.000.000.000,00	120,59	Rp.	20.000.000.000,00	Rp.	(14.000.000.000)	(41,18)	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	PAJAK PENGAMBILAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH	Rp.	61.250.000.000,00	Rp.	66.869.508.352,06	109,17	Rp.	58.250.000.000,00	Rp.	(3.000.000.000)	(4,90)	
	PAJAK PENGAMBILAN & PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	Rp.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	Rp.	-	-	
	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	Rp.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	Rp.	-	-	
	BANTUAN KEUANGAN / SUBSIDI PEMBANGUNAN PROPINSI	Rp.	61.250.000.000,00	Rp.	66.869.508.352,06	109,17	Rp.	58.250.000.000,00	Rp.	(3.000.000.000)	(4,90)	
	JUMLAH 2.4	Rp.	61.250.000.000,00	Rp.	66.869.508.352,06	109,17	Rp.	58.250.000.000,00	Rp.	(3.000.000.000)	(4,90)	
	BAKUPEN PERUBAHAN YANG SAH	Rp.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	Rp.	-	-	
	BANTUAN DANA KONTIJENSIPENYEMBAH DARI PEMERINTAH	Rp.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	Rp.	-	-	DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
	BANTUAN	Rp.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	Rp.	-	-	DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
	JUMLAH 3.1	Rp.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	Rp.	-	-	DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA

REKENING		JENIS PENERIMAAN		ABT 2003	REALISASI S.D DESEMBER 2003	%	TARGET 2004	KURANG / LEBIH	%	INSTANSI PEJUANGUT
1		2		3	4	5	6	7	8	9
01	003	01	03							
DANA DARURAT										
1	01	003	3 1 03							
01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam				Rp.			Rp.			
1	01	003	3 1 03							
02 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Sosial				Rp.			Rp.			DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPE
JUMLAH 3.1.				Rp.			Rp.			
PEMBIAYAAN										
PENERIMAAN DAERAH										
3	01	003	1 1 1							
3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Ini				Rp.	6.250.961.882,22	111,14	Rp. 31.955.410.334,00	Rp. (54.295.551.548)	(62,95)	
3	01	003	1 2							
3 Transfer dari Dana Cadangan				Rp.			Rp.			
3	01	003	1 3							
3 Penerimaan Pinjaman & Obligasi				Rp.			Rp.			
1	01	003	1 4							
1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan				Rp.			Rp.			
JUMLAH PEMBIAYAAN				Rp.	6.250.961.882,22	6,35	Rp. 44.195.410.334,00	Rp. (54.295.551.548,00)	(55,13)	
URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN										
URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ( UKP )										
JUMLAH UKP				Rp.	16.313.368.271,00	111,14	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. (1.313.368.271)	(8,05)	
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH				Rp.	16.313.368.271,00	111,14	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. (1.313.368.271,00)	(8,05)	
JUMLAH DANA PERIMBANGAN				Rp.	54.102.000.000,00	108,24	Rp. 62.523.000.000,00	Rp. 8.421.000.000	15,57	
JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH				Rp.	585.634.229.000,00	93,32	Rp. 584.002.499.050,00	Rp. (1.631.730.000)	(0,28)	
JUMLAH PEMBIAYAAN				Rp.	98.450.961.882,00	6,35	Rp. 44.195.410.334,00	Rp. (54.295.551.548)	(55,13)	
JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ( UKP )				Rp.	16.313.368.271,00	111,14	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. (1.313.368.271)	(8,05)	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				Rp.	754.540.559.153,00	83,42	Rp. 705.720.909.334,00	Rp. (48.819.649.819)	(6,47)	



TARGET DAN REALISASI  
PENDAPATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2004

thn. 2004.

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENDAPATAN 2004	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2004	%	UNITS MILYAR PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN ASLODAERAH</b>				
	<b>PAJAK DAERAH</b>				
1 01 005 1 1 01 01	PAJAK HOTEL	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 1.805.529.027,00	103,17	DIPENDA
1 01 005 1 1 02 01	PAJAK RESTORAN	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.133.390.802,00	103,33	DIPENDA
1 01 005 1 1 03 01	PAJAK HIBURAN	Rp. 500.000.000,00	Rp. 1.013.673.637,00	202,73	DIPENDA
1 01 005 1 1 04 01	PAJAK REKLAME	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 1.933.635.656,00	96,68	DIPENDA
1 01 005 1 1 05	PAJAK KONSUMSI LISTRIK :	Rp. 15.500.000.000,00	Rp. 13.961.464.544,00	90,07	
1 01 005 1 1 05 01	a. Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp. 15.450.000.000,00	Rp. 13.943.798.940,00	90,25	PT. PLN CAB. SAMARINDA
1 01 005 1 1 05 02	b. Genset / Generator	Rp. 50.000.000,00	Rp. 17.665.604,00	35,33	DIPENDA
1 04 001 1 1 06 01	PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL C	Rp. 300.000.000,00	Rp. 204.451.093,00	68,15	KTR PERTAMBANGAN & ENERGI
1 16 001 1 1 07 01	PAJAK PARKIR	Rp. 600.000.000,00	Rp. 639.007.725,00	106,50	DINAS PERHUBUNGAN
	<b>JUMLAH 1.1.</b>	Rp. 24.650.000.000,00	Rp. 23.691.152.484,00	96,11	
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>				
1 10 001 1 2 01	RET. PELAYANAN KESEHATAN :	Rp. 920.000.000,00	Rp. 1.102.271.571,00	119,81	
1 10 001 1 2 01 01	a. Pelayanan Kesehatan	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.071.826.596,00	119,09	DINAS KESEHATAN
1 10 005 1 2 01 07	b. Penerimaan Peserta PHS / ASKES	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.444.975,00	152,22	PT. ASKES
1 01 005 1 2 02 01	RET. KEBERSIHAN KOTA (RKK)	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 2.346.747.721,00	104,30	DIPENDA/BANK/PLN/KOPERASI
1 18 001 1 2 03 01	RET. PENGANTIAN BIAYA CETAK KTP & AKTA CAPIL	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.534.244.119,00	127,85	KANPENDUK
1 17 001 1 2 06 01	RET. PELAYANAN PEMAKAMAN dan PENGABUAN JENAZAH	Rp. 4.000.000,00	Rp. 3.500.000,00	87,50	K K P P
1 16 001 1 2 07 01	RET. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM :	Rp. 1.757.500.000,00	Rp. 1.530.717.800,00	87,10	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 07 01 a	ASDP / LLAJ	Rp. 7.500.000,00	Rp. 12.627.800,00	168,37	
1 16 001 1 2 07 02	b. SAMSAT	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 1.518.090.000,00	86,75	
1 06 002 1 2 08	RET. PASAR :	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 1.654.296.698,00	94,53	
1 2 08 01	a. Dinas Pasar	Rp. 1.720.000.000,00	Rp. 1.634.296.698,00	95,02	DINAS PASAR
1 2 08 02	b. Pasar Swadana Citra Niaga	Rp. 30.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	66,67	UNIT CITRA NIAGA
1 16 001 1 2 09	RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.011.299.500,00	112,37	DINAS PERHUBUNGAN
1 14 002 1 2 10	RET. PEKERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 50.000.000,00	Rp. 93.345.500,00	186,69	KTR. PEMADAM KEBAKARAN
1 2 10 01	a. Ret. Alat Pemadam Kebakaran	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.431.500,00	114,32	
1 2 10 02	b. Rekomendasi Pemadam	Rp. 40.000.000,00	Rp. 81.914.000,00	204,79	
1 2 12	RET. PEMAJUAN KEKAYAAN DAERAH :	Rp. 195.000.000,00	Rp. 342.013.198,00	175,39	
1 01 003 1 2 13 01	a. Izin Pemakalan Tanah / Bangunan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 182.296.900,00	1.822,97	BAGIAN PERKOTAAN
1 15 001 1 2 13 02	b. Sewa Alat Berat	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.610.000,00	101,74	DINAS BINA MARGA & PENGAIRAN
1 14 001 1 2 13 04	c. Sewa Rumah Dinas	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.389.998,00	113,90	DISKUNBANGKOT
1 16 004 1 2 13 18	d. Pemakalan Fasilitas Dermaga	Rp. 140.000.000,00	Rp. 112.716.300,00	80,51	DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING		JENIS PENERIMAAN		TARGET	REALISASI	%	INSTANSI PEMUNGUT
1		2		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1 16 003 1 2 16	RET. TERMAHAL	Rp.	600.000.000,00	Rp.	403.358.700,00	67,23	DINAS PERHUBUNGAN
1 17 001 1 2 19	RET. PENYEDOTAN KAKUS	Rp.	52.500.000,00	Rp.	54.325.000,00	103,86	K K P P
1 03 001 1 2 20	RET. PERALIHAN PERUSAHAAN	Rp.	200.000.000,00	Rp.	200.000.000,00	100,00	KARTUUK PELIKSIANAKAN
1 03 001 1 2 21	RET. TEMPAT Pendaratan KAPAL	Rp.	225.000.000,00	Rp.	227.198.300,00	-100,98	KANTOR PERIKAMAN
1 14 001 1 2 26	RET. IZIN MEMORIKAN BANGUNAN :	Rp.	4.455.000.000,00	Rp.	5.959.035.394,64	133,76	
1 14 001 1 2 26 01	a. I.M 8	Rp.	4.200.000.000,00	Rp.	5.617.501.894,64	133,75	DISKOMBANGKOT*
1 14 001 1 2 26 02	b. Urusan Perumahan / Perubahan Fungsi	Rp.	250.000.000,00	Rp.	340.583.500,00	136,23	DISKOMBANGKOT
1 14 001 1 2 26 03	c. Surat Izin Pemukiman (SIP)	Rp.	5.000.000,00	Rp.	950.000,00	19,00	DISKOMBANGKOT
1 06 001 1 2 27	RET. IZIN TEMPAT PERJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	Rp.	1.000.000.000,00	Rp.	860.500.000,00	86,05	
1 06 001 1 2 27 01	a. Izin Tempat	Rp.	50.000.000,00	Rp.	101.700.000,00	203,40	BAGIAN PERKOTAAN
1 06 001 1 2 27 02	b. Labeling	Rp.	950.000.000,00	Rp.	758.800.000,00	79,87	DISPERINDAG
1 01 003 1 2 28	RET. IZIN GANGGUAN (H.O)	Rp.	1.100.000.000,00	Rp.	1.286.020.890,00	116,91	BAGIAN PERKOTAAN
1 16 001 1 2 29	RET. IZIN TRAYEK	Rp.	75.000.000,00	Rp.	72.870.000,00	97,16	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 30	RET. IZIN ANGRUTAN ORANG	Rp.	49.500.000,00	Rp.	22.074.000,00	44,59	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 31	RET. IZIN ANGRUTAN BARANG	Rp.	87.500.000,00	Rp.	138.485.500,00	158,27	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 32	RET. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI	Rp.	28.000.000,00	Rp.	36.123.100,00	129,01	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 33	RET. GERObAK SORONG	Rp.	10.000.000,00	Rp.	480.000,00	4,80	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 34	RET. IZIN PEMBUATAN BADAN KAPAL	Rp.	200.000.000,00	Rp.	178.822.410,00	89,41	DISPERINDAG
1 16 001 1 2 35	RET. MOBIL DEREK	Rp.	10.000.000,00	Rp.	8.357.000,00	83,57	DINAS PERHUBUNGAN
1 01 005 1 2 36	RET. TEMPAT PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp.	35.000.000,00	Rp.	35.116.375,00	100,33	DIPENDA
1 18 001 1 2 37	RET. LEGES DAN BIAYA ADMINISTRASI	Rp.	160.000.000,00	Rp.	180.774.000,00	112,98	KANPERDUK / DIPEYDA
1 17 001 1 2 38	RET. LUBAH DOMESTIK / LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	25.000.000,00	Rp.	18.100.000,00	72,40	BAPEDALDA
1 03 001 1 2 39	RET. PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN	Rp.	5.000.000.000,00	Rp.	4.350.838.970,75	91,02	CAB. DINAS KEHUTANAN
1 01 003 1 2 40	RET. TEMPAT PENUNJUKAN KAYU BUNDAK / KAYU MASAK DAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	Rp.	15.000.000,00	Rp.	9.800.000,00	65,33	KTR SATPOL PP
1 02 002 1 2 41	RET. USAHA PETERNAKAN, PEMAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS, TELUR UNGGAS	Rp.	10.000.000,00	Rp.	14.233.750,00	142,34	KANTOR PETERNAKAN
1 06 001 1 2 42	RET. IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	Rp.	350.000.000,00	Rp.	342.186.000,00	97,77	DISPERINDAG
1 09 001 1 2 43 01	RET. PELAYANAN KETENAGAKERJAAN	Rp.	250.000.000,00	Rp.	131.486.200,00	52,59	DISHAKER
1 12 001 1 2 44	RET. IZIN KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp.	10.000.000,00	Rp.	11.315.700,00	113,16	KANTOR SOSIAL
1 22 001 1 2 45	RET. IZIN USAHA PIVELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN PROMOSI	Rp.	30.000.000,00	Rp.	49.250.000,00	164,17	KTR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1 02 001 1 2 46	RET. PELAYANAN PERZINAN USAHA LAHAN PERTANAHAN DAN PENGGUNAAN / PENGLUJIAN ALAT PERTANAHAN	Rp.	2.000.000,00	Rp.	1.820.000,00	91,00	KANTOR PERTANAHAN
1 16 003 1 2 47	RET. PELABURAN UDARA	Rp.	165.000.000,00	Rp.	231.473.000,00	140,29	PERUMH PELUD
1 11 001 1 2 48	RET. IZIN PENDIRIAN DAN DAFTAR ULANG LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SERTA PELAYANAN PENINGKATAN PENDIDIKAN	Rp.	25.000.000,00	Rp.	5.800.000,00	23,20	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
1 07 001 1 2 49	RET. PELAYANAN JASA USAHA KOPERASI	Rp.	17.500.000,00	Rp.	17.753.000,00	101,45	KTR KOPERASI & UKM

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENDAPATAN 2004	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2004	%	INSTANSI PEMUNGUT
1 15 0001 1 2 50	RET. SILU KONSTRUKSI	Rp. 15.000.000,00	Rp. 21.950.000,00	146,33	BINA MARGA & PENGURAHAN
1 16 0003 1 2 51	RET. SERTIFIKASI KAPAL SUNGAI	Rp. 26.000.000,00	Rp. 17.305.000,00	66,56	DINAS PERHUBUNGAN
1 01 0003 1 2 52	RET. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH :	Rp. 130.000.000,00	Rp. 181.037.980,00	139,26	
1 01 0003 1 2 52 00	a. SK Hak Atas Tanah				
1 01 0003 1 2 52 00	b. Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Daftar Isian Di Bidang Pertanahan				
1 01 0003 1 2 52 01	c. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	Rp. 130.000.000,00	Rp. 181.037.980,00	139,26	BAGIAN PERKOTAAN
1 20 0001 1 2 53 01	RET. USUHA KEPARIBHASAAN	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.151.000,00	100,30	KANTOR PARIBHASATA
1 04 0001 1 2 54 01	RET. PERTAMBAHAN UMUM	Rp. 38.500.000,00	Rp. 16.456.000,00	42,74	KTR. PERTAMBAHAN & ENERGI
	<b>J U M L A H 1.2.</b>	Rp. 23.523.000.003,00	Rp. 25.018.799.387,39	106,36	
	<b>BAGIAN LAIN LAIN DAERAH</b>				
1 01 0003 1 3 02 01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 2.328.979.996,75	105,77	B P D / BAG. KEUANGAN
1 01 0003 1 3 01 01	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	Rp. -	Rp. -		PDAM / BAG. KEUANGAN
1 01 0003 1 3 01 02	PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN	Rp. 500.000.000,00	Rp. -		PD.P2B / BAG. KEUANGAN
	<b>J U M L A H 1.3.</b>	Rp. 2.700.000.000,00	Rp. 2.328.979.996,75	86,18	
	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN</b>				
1 01 0005 1 4 01 01	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YG TIDAK DIPISAHKAN	Rp. 4.718.308.000,00	Rp. 7.715.524.904,74	163,52	BAG. PERLENGKAPAN
1 01 0005 1 4 01 03	ANGSURAN CICILAN RUMAH DINAS	Rp. 50.000.000,00	Rp. 98.471.100,00	196,94	BAG. KEUANGAN
1 01 0005 1 4 01 04	ANGSURAN CICILAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp. 50.000.000,00	Rp. 3.740.000,00	7,48	
1 01 0005 1 4 01 09	PENGEMBALIAN MODAL KOPERASI	Rp. -	Rp. 50.988.151,00		KTR KOPERASI & UKA
1 01 0005 1 4 01 10	KONTRIBUSI PELABURAN LAUT (PT. PELINDO)	Rp. 350.000.000,00	Rp. 378.226.205,00	108,06	PT. PELINDO
1 01 0003 1 4 01 12	<b>PENERIMAAN LAIN - LAIN</b>	Rp. 4.268.308.000,00	Rp. 7.184.099.448,74	168,31	BAGIAN KEUANGAN
	a. Kontra Pes	Rp. -	Rp. 791.925.564,00		
	b. Sisa UUPP	Rp. -	Rp. -		
	c. Penerimaan Lain-Lain	Rp. 4.268.308.000,00	Rp. 5.306.819.528,24	124,33	
	d. Pembayaran Bunga Pinjaman	Rp. -	Rp. 945.065.136,50		
	e. Sotoran Hartang Pinjaman	Rp. -	Rp. -		
	f. Mess Perwakilan Jakarta	Rp. -	Rp. 65.980.934,00		
1 01 0003 1 4 02 01	<b>PENERIMAAN JASA GIRO</b>	Rp. 12.500.000.000,00	Rp. 1.018.747.020,54	8,15	BAGIAN KEUANGAN
1 01 0003 1 4 05 01	a. Jasa Giro	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 784.931.952,13	31,40	BAGIAN KEUANGAN
1 01 0005 1 4 06	b. Bunga Deposito	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 233.815.068,41	2,34	BAGIAN KEUANGAN
	DENDA	Rp. -	Rp. 19.017.309,00		BAGIAN KEUANGAN
	<b>J U M L A H 1.4.</b>	Rp. 17.218.308.000,00	Rp. 8.753.289.234,28	50,84	
	<b>DANA PERUBAHAN</b>				
	<b>BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>				
	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>				
1 01 0005 2 1 01 01	<b>PAJAK BUKU DAN BANGUNAN ( P B B ) :</b>	Rp. 71.500.000.000,00	Rp. 54.433.234.723,00	76,13	
	a. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	Rp. 35.000.000.000,00	Rp. 30.547.444.718,00	87,28	KP-PBB / DIPENDA
	b. Bag. Darl Pemerintah Pusat	Rp. 33.000.000.000,00	Rp. 28.716.426.422,00	87,02	
1 01 0005 2 1 01 02	<b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) :</b>	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 1.631.018.296,00	81,55	
	a. Penerimaan Pemerintah Kota Samarinda	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 8.768.712.277,00	87,69	BPN / KP-PBB / DIPENDA
	b. Luncuran dari Bagian Pemerintah Pusat	Rp. 6.500.000.000,00	Rp. 7.470.289.145,00	114,33	
		Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 1.298.423.132,00	37,10	

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENDAPATAN 2004	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2004	%	INSTANSI PEMUNGUT
1	2	3	4	5	6
1 01 003 2 1 01 03	PAJAK PENGHASILAN :	Rp. 26.500.000.000,00	Rp. 15.119.077.728,00	57,05	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	a. Pasal 21	Rp. 24.000.000.000,00	Rp. 14.683.399.416,00	61,18	
	b. Pasal 25 / 29	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 435.678.312,00	17,42	
	J U M L A H 2.1.01	Rp. 71.500.000.000,00	Rp. 54.435.234.723,00	76,13	
	BAGI HASIL BEKAS PAJAK SUMBER DAYA ALAM				
1 01 003 2 1 02	SUMBER DAYA ALAM :	Rp. 305.250.000.000,00	Rp. 227.706.797.516,50	74,60	
	a. Sektor Kehutanan :	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 6.607.180.134,00	44,05	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	- Iuran Hak Pengusahaan Hutan ( IHPH )	Rp.	Rp.		
	- Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH )	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 6.607.180.134,00	44,05	
	b. Sektor Pertambangan Umum :	Rp. 40.000.000.000,00	Rp. 20.431.905.020,50	51,08	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	- Iuran Tetap ( Landrent )	Rp.	Rp.		
	- Iuran Eksplorasi	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 3.930.765.439,00	39,31	
	- Iuran Eksploitasi ( Royalty )	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 16.501.139.581,50	55,00	
	c. Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp. 250.000.000,00	Rp. 157.520.783,00	63,01	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	d. Pungutan Hasil Perikanan	Rp.	Rp.		
	e. Minyak Bumi	Rp. 67.500.000.000,00	Rp. 51.034.229.012,00	75,61	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	f. Gas Alam	Rp. 182.500.000.000,00	Rp. 149.475.962.567,00	81,90	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	J U M L A H 2.1.02	Rp. 305.250.000.000,00	Rp. 227.706.797.516,50	74,60	
	DANA ALOKASI UMUM ( DAU )				
1 01 003 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum ( DAU )	Rp. 207.502.499.000,00	Rp. 207.270.357.156,00	99,89	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	J U M L A H 2.2	Rp. 207.502.499.000,00	Rp. 207.270.357.156,00	99,89	
	DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK )				
1 01 003 2 3 01 01	Dana Alokasi Khusus ( DAK ) / Reboisasi	Rp. 500.000.000,00	Rp.	-	DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
	J U M L A H 2.3	Rp. 500.000.000,00	Rp.	-	
	BAGI HASIL PAJAK & BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI				
1 01 003 2 4 01	BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	Rp. 49.105.630.788,00	Rp. 34.107.961.472,00	69,46	DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
1 01 003 2 4 01 01	PAJAK KENDARAAN BERKOTOR ( PKB )	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 9.184.574.125,00	61,23	DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
1 01 003 2 4 01 02	PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR				DIPENDA / BAG. KEUANGAN
1 01 003 2 4 01 03	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERKOTOR ( BBKKB )	Rp. 20.855.630.788,00	Rp. 14.359.797.100,00	68,85	
1 01 003 2 4 01 04	BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR				DIPENDA / BAG. KEUANGAN
1 01 003 2 4 01 05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERKOTOR ( PBBKB )	Rp. 12.500.000.000,00	Rp. 10.226.313.000,00	81,81	
1 04 001 2 4 01 06	PAJAK PENGAMBILAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH				
1 04 001 2 4 01 07	PAJAK PENGAMBILAN & PEMANFAATAN AIR PERHAUKAN	Rp. 750.000.000,00	Rp. 337.327.247,00	44,98	
	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	Rp. 27.000.000.000,00	Rp. 26.000.000.000,00	96,30	
1 01 003 2 4 02 01	BANTUAN KEUANGAN / SUBSIDI PEMBANGUNAN PROPINSI	Rp. 27.000.000.000,00	Rp. 26.000.000.000,00	96,30	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	J U M L A H 2.4	Rp. 76.105.630.788,00	Rp. 60.107.961.472,00	78,98	

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENDAPATAN 2004	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2004	%	INSTANSI PEMANGGUT
1	2	3	4	5	6
1 01 003 3 1 02	BANTUAN DANA KONTJENSI/PENYEMBAWANG DARI PEMERINTAH	Rp.	Rp.		DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
1 01 003 3 1 02 01	BANTUAN	Rp.	Rp.		DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
JUMLAH 3.1.					
1 01 003 3 1 03	DANA DARURAT	Rp.	Rp.		DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
1 01 003 3 1 03 01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	Rp.	Rp.		
1 01 003 3 1 03 02	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Sosial	Rp.	Rp.		DIPENDA / BAG. KEU. / BAPPEDA
JUMLAH 3.					
3 01 003 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp. 32.055.410.334,00	Rp. 37.362.229.862,92	116,56	
3 01 003 1 2	Transfer dari Dana Cadangan	Rp.	Rp.		
3 01 003 1 3	Penerimaan Pinjaman & Obligasi	Rp. 12.240.000.000,00	Rp. 19.849.976.000,00	162,17	
1 01 003 1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	Rp.	Rp.		
JUMLAH PEMBAYAAAN					
URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN					
URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ( UKP )					
		Rp. 44.295.410.334,00	Rp. 57.212.205.862,92	129,16	
JUMLAH U K P					
		Rp. 16.313.368.271,00	Rp. 18.915.688.125,00	115,95	
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH					
		Rp. 16.313.368.271,00	Rp. 18.915.688.125,00	115,95	
JUMLAH DANA PERIMBANGAN					
		Rp. 68.091.308.003,00	Rp. 59.790.221.102,42	87,81	
JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH					
		Rp. 660.858.129.788,00	Rp. 549.520.350.867,50	83,15	
JUMLAH PEMBAYAAAN					
		Rp. 44.295.410.334,00	Rp. 57.212.205.862,92	129,16	
JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ( UKP )					
		Rp. 16.313.368.271,00	Rp. 18.915.688.125,00	115,95	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH					
		Rp. 789.558.216.396,00	Rp. 685.438.465.957,84	86,81	

Samarinda, 3 Januari 2005

Sekretaris Kota Samarinda,  
Selaku

Ketua Tim Intensifikasi Pendapatan Daerah,

Drs. H.M. Saill, M.Si.

Pembina Tk. I NIP. 550 006.829.





REKAPITULASI  
PREDIKSI PENYESUAIAN PENDAPATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2005

No.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2005				PENYESUAIAN
		TARGET	REALISASI	%		
	2	3	4	5	6	
A.	PENDAPATAN	Rp. 650.372.404.000,00	Rp. 272.024.653.473,96	41,83	Rp. 688.429.784.000,00	
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH :	Rp. 70.031.502.000,00	Rp. 35.937.618.969,96	51,37	Rp. 70.031.502.000,00	
	1.1. Pajak Daerah	Rp. 26.350.000.000,00	Rp. 13.470.563.743,00	51,12	Rp. 27.550.000.000,00	
	1.2. Retribusi Daerah :	Rp. 26.746.502.000,00	Rp. 12.734.682.312,50	47,61	Rp. 25.735.200.000,00	
	1.2.1. Retribusi Jasa Umum	Rp. 16.012.400.000,00	Rp. 6.778.268.661,00	42,33	Rp. 14.325.000.000,00	
	1.2.2. Retribusi Jasa Usaha	Rp. 1.458.902.000,00	Rp. 581.607.519,00	39,87	Rp. 1.330.000.000,00	
	1.2.3. Retribusi Perizinan Terentu	Rp. 9.275.200.000,00	Rp. 5.374.806.132,50	57,95	Rp. 10.080.200.000,00	
	1.3. Bagian Laba Badan Usaha Daerah	Rp. 3.750.000.000,00	Rp. 2.586.009.407,91	68,96	Rp. 4.250.000.000,00	
	1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 13.185.000.000,00	Rp. 7.146.263.506,55	54,20	Rp. 12.496.302.000,00	
	2. DANA PERIMBANGAN :	Rp. 566.838.902.000,00	Rp. 236.029.854.504,00	41,72	Rp. 605.838.902.000,00	
	2.1. BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK / SUMBER DAYA ALAM :	Rp. 308.250.000.000,00	Rp. 107.914.626.173,00	35,01	Rp. 335.750.000.000,00	
	2.1.1. Bagi Hasil Pajak	Rp. 62.500.000.000,00	Rp. 29.208.675.006,00	46,73	Rp. 62.500.000.000,00	
	2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	Rp. 245.750.000.000,00	Rp. 78.705.951.167,00	32,03	Rp. 273.250.000.000,00	
	2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 194.482.000.000,00	Rp. 113.447.833.331,00	58,33	Rp. 194.482.000.000,00	
	2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp. 8.356.902.000,00	Rp. -	-	Rp. 8.356.902.000,00	
	2.4. Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Dari Propinsi	Rp. 57.750.000.000,00	Rp. 13.667.395.000,00	23,67	Rp. 67.250.000.000,00	
	3. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH :	Rp. 11.502.000.000,00	Rp. 1.057.380.000,00	9,19	Rp. 12.559.380.000,00	
	3.1. Dana Kontijensi / Penyeimbang dari Pemerintah Pusat	Rp. 11.502.000.000,00	Rp. -	-	Rp. 12.559.380.000,00	
	3.2. Dana Pihakada dari Pemerintah Pusat	Rp. -	Rp. 1.057.380.000,00	-	Rp. -	
B.	PEMBIAYAAN	Rp. 59.260.765.131,00	Rp. 34.260.765.131,00	57,81	Rp. 59.260.765.131,00	
	1. PENERIMAAN DAERAH :	Rp. 34.260.765.131,00	Rp. 34.260.765.131,00	100,00	Rp. 34.260.765.131,00	
	1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp. -	Rp. -	-	Rp. -	
	1.2. Transfer dari Dana Cadangan	Rp. 25.000.000.000,00	Rp. -	-	Rp. 25.000.000.000,00	
	1.3. Penerimaan Pinjaman & Obligasi	Rp. -	Rp. -	-	Rp. -	
	1.4. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipsahkan	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 8.539.350.002,00	42,70	Rp. 20.000.000.000,00	
C.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ( UKP )	Rp. 729.633.169.131,00	Rp. 314.924.968.606,96	43,15	Rp. 767.890.549.131,00	
	JUMLAH	Rp. 729.633.169.131,00	Rp. 314.924.968.606,96	43,15	Rp. 767.890.549.131,00	

Samarinda, 14 Juli 2005  
Kepala Dinas Pendapatan Kota Samarinda.

Di: H. Abd. Rachum Al-  
Pembina Tk I T/TP 550.007. J60



PENYESUAIAN PENDAPATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2005

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2005				LEBIH (KURANG)	INSTANSI PEMUNGUT
		TARGET	REALISASI	%	PENYESUAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 005 1 1 01 01	PAJAK DAERAH	Rp. 70.031.902.000,00	Rp. 35.937.618.969,96	51,32	Rp. 70.031.902.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DIPENDA
1 01 005 1 1 02 01	PAJAK HOTEL	Rp. 26.350.000.000,00	Rp. 13.770.000.000,00	52,27	Rp. 26.350.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DIPENDA
1 01 005 1 1 03 01	PAJAK RESTORAN	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 961.840.559,00	48,09	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DIPENDA
1 01 005 1 1 04 01	PAJAK HIBURAN	Rp. 4.250.000.000,00	Rp. 2.326.727.801,00	54,75	Rp. 4.250.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DIPENDA
1 01 005 1 1 05 01	PAJAK REKLAME	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 519.785.277,00	51,98	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DIPENDA
1 01 005 1 1 06 01	PAJAK KONSUMSI LISTRIK :	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 556.531.717,00	24,73	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	PT. PLN CAB. SAMARINDA
1 01 005 1 1 07 01	a. Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp. 16.000.000.000,00	Rp. 8.739.369.334,00	54,62	Rp. 17.250.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DIPENDA
1 01 005 1 1 08 01	b. Genset / Generator	Rp. 15.975.000.000,00	Rp. 8.736.139.443,00	54,69	Rp. 17.235.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	KTR PERTAMBANGAN & ENERGI
1 04 001 1 1 06 01	PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	Rp. 200.000.000,00	Rp. 26.624.645,00	13,31	Rp. 150.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 1 07 01	PAJAK PARKIR	Rp. 650.000.000,00	Rp. 339.784.710,00	52,27	Rp. 650.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H 1.1.	Rp. 26.746.502.000,00	Rp. 13.470.663.743,00	51,12	Rp. 27.550.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	
	RETRIBUSI DAERAH	Rp. 26.746.502.000,00	Rp. 12.734.683.319,30	47,61	Rp. 25.738.200.000,00	Rp. 1.016.301.993,00	
	RETRIBUSI JASA UMUM						
1 10 001 1 2 01 01	RET. PELAYANAN KESEHATAN :	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 574.412.710,00	49,95	Rp. 1.175.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1 10 001 1 2 01 01 01	a. Pelayanan Kesehatan	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 557.776.950,00	50,71	Rp. 1.125.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	PT. ASKES
1 10 005 1 2 01 07	b. Pemeliharaan Peserta PHB / ASKES	Rp. 50.000.000,00	Rp. 16.635.760,00	33,27	Rp. 50.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DIPENDA/BANK/PLN/KOPERASI
1 01 005 1 2 02 01	RET. KEBERSIHAN KOTA (RKK)	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 1.159.091.000,00	46,36	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	KAMPENDUK
1 18 001 1 2 03 01	RET. PENGANTIAN BIAYA CETAK KTP & AKTA CARIL	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 870.809.000,00	54,43	Rp. 1.650.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	K K P P
1 17 001 1 2 04 01	RET. PELAYANAN PEMAKAMAN dan PENGABUAN JENAZAH	Rp. 5.000.000,00	Rp. 2.210.300,00	44,20	Rp. 5.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 001 1 2 07 01	RET. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM :	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 679.710.000,00	37,76	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	
1 15 001 1 2 07 01 a.	ASDP / LUJ	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	100	Rp. 10.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	
1 16 001 1 2 07 02 b.	SAMSAT	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 679.710.000,00	38,84	Rp. 1.490.000.000,00	Rp. 260.000.000,00	
1 06 002 1 2 08	RET. PASAR :	Rp. 1.630.000.000,00	Rp. 760.279.063,00	46,64	Rp. 1.630.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DINAS PASAR
1 2 08 01 a.	Dinas Pasar	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 747.779.063,00	46,74	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	UNIT CITRA NIAGA
1 2 08 02 b.	Pasar Swadana Citra Niaga	Rp. 30.000.000,00	Rp. 12.500.000,00	41,67	Rp. 30.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1 15 001 1 2 09	RET. PENGUNJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 589.712.000,00	23,59	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	KTR. PEMADAM KEBAKARAN
1 14 002 1 2 10	RET. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 100.000.000,00	Rp. 2.153.000,00	2,15	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	
1 2 10 01 a.	Alat Pemadam Kebakaran	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	100	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	
1 2 10 02 b.	Rekomendasi Pemadam	Rp. 35.000.000,00	Rp. 2.153.000,00	6,15	Rp. 50.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	
1 01 005 1 2 36	RET. TEMPAT PECHUCIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp. 50.000.000,00	Rp. 6.372.435,00	12,74	Rp. 50.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DIPENDA
1 05 001 1 2 39	RET. PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 2.130.872.953,00	47,35	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	CAB. DINAS KEHUTANAN
1 01 003 1 2 40	RET. TEMPAT PENUMPUNGAN KAYU BUNDAH / KAYU MASAK DAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	100	Rp. 10.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	KTR SAITPOL PP
1 02 002 1 2 41	RET. USAHA PETERNAKAN, PEMANGUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS, TELUR UNGGAS	Rp. 12.400.000,00	Rp. 2.646.500,00	21,34	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.400.000,00	KARTOR PETERNAKAN
1 09 001 1 2 43 01	RET. PELAYANAN KETENAGAKERJAAN	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	100	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	DISHAKER
	J U M L A H 1.2.1.	Rp. 16.312.400.000,00	Rp. 6.778.268.661,00	41,51	Rp. 14.325.000.000,00	Rp. 1.987.400.000,00	
	RETRIBUSI JASA USAHA						
1 2 13	RET. PEMAKSIAN KEKAYAAN DAERAH :	Rp. 200.000.000,00	Rp. 113.011.269,00	56,51	Rp. 215.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	BAGIAN PERKOTAAN
1 13 01 a.	Izin Pemeliharaan Tanah / Bangunan	Rp. 15.000.000,00	Rp. 29.750.000,00	198,33	Rp. 30.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	DINAS RINA MARGA B. PENGAIRAH
1 15 001 1 2 13 02 b.	Sewa Alat Berat	Rp. 35.000.000,00	Rp. 8.840.000,00	25,26	Rp. 35.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DISKIMBANGKOT
1 14 001 1 2 13 04 c.	Sewa Rumah Dinas	Rp. 10.000.000,00	Rp. 7.841.469,00	78,41	Rp. 10.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1 16 004 1 2 13 18 d.	Pemakaian Fasilitas Dermaga	Rp. 140.000.000,00	Rp. 66.579.800,00	47,56	Rp. 140.000.000,00	Rp. 1.230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	JENIS PENERMAAN	TAHUN 2005				LEBIH (KURANG)	INSTANSI PEMUNGUT
		TARGET	REALISASI	%	PENYESUAIAN		
1 16 003 1 2 16	RET. TERMINAL	Rp. 195.170.750,00	Rp. 30,03	Rp. 500.000.000,00	Rp. (150.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	
1 17 001 1 2 19	RET. PENYEDOTAN KAKUS	Rp. 62.500.000,00	Rp. 35.250.000,00	Rp. 56,40	Rp. 2.500.000,00	K R P P	
1 02 002 1 2 20	RET. RUMAH POTONG HEWAN	Rp. 243.402.000,00	Rp. 107.814.500,00	Rp. 44,29	Rp. 6.598.000,00	KANTOR PETERNAKAN	
1 03 001 1 2 21	RET. TEMPAT PENDERATAN KAPAL	Rp. 250.000.000,00	Rp. 105.768.000,00	Rp. 42,31	Rp. 250.000.000,00	KANTOR PERIKANAN	
1 16 001 1 2 35	RET. MOBIL DEREK	Rp. 10.000.000,00	Rp. 7.050.000,00	Rp. 70,50	Rp. (5.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	
1 17 001 1 2 40	RET. PELAYANAN JASA USAHA KOPERASI	Rp. 18.000.000,00	Rp. 14.222.000,00	Rp. 78,98	Rp. 2.000.000,00	BAPEDALDA	
1 07 001 1 2 49	RET. PELAYANAN JASA USAHA KOPERASI	Rp. 1.458.902.000,00	Rp. 581.607.519,30	Rp. 39,87	Rp. (128.991.273,00)	KTR KOPERASI & UJMA	
J U M L A H 1.2.2.							
1 14 001 1 2 26	RET. PERIZINAN TERTEK	Rp. 6.005.000.000,00	Rp. 3.193.902.642,50	Rp. 53,19	Rp. 297.500.000,00	DISKUANGKOT	
1 14 001 1 2 26 01	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN :	Rp. 5.500.000.000,00	Rp. 3.051.836.667,50	Rp. 55,49	Rp. 6.000.000.000,00	DISKUANGKOT	
1 14 001 1 2 26 02	a. I M B	Rp. 500.000.000,00	Rp. 140.685.975,00	Rp. 28,14	Rp. (200.000.000,00)	DISKUANGKOT	
1 14 001 1 2 26 03	b. Unsuran Perumahan / Perubahan Fungsi	Rp. 5.000.000,00	Rp. 1.380.000,00	Rp. 27,60	Rp. (2.500.000,00)	DISKUANGKOT	
1 01 003 1 2 27	c. Surat Izin Pemukiman (SIP)	Rp. 660.800.000,00	Rp. 418.000.000,00	Rp. 63,26	Rp. (35.000.000,00)	BAGIAN PERKOTAAN	
1 01 003 1 2 27 01	a. Izin Tempat	Rp. 60.000.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 0,83	Rp. (35.000.000,00)	DISPERINDAG	
1 06 001 1 2 27 02	b. Labeling	Rp. 600.800.000,00	Rp. 417.500.000,00	Rp. 69,49	Rp. 600.800.000,00	BAGIAN PERKOTAAN	
1 01 003 1 2 28	RET. IZIN GANGGUAN ( H O )	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 757.061.000,00	Rp. 60,56	Rp. 1.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1 16 001 1 2 29	RET. IZIN TRAYEK	Rp. 75.000.000,00	Rp. 68.460.000,00	Rp. 91,28	Rp. 75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1 16 001 1 2 30	RET. IZIN ANGKUTAN ORANG	Rp. 22.400.000,00	Rp. 21.048.000,00	Rp. 93,96	Rp. 40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1 16 001 1 2 31	RET. IZIN ANGKUTAN BARANG	Rp. 110.000.000,00	Rp. 83.296.000,00	Rp. 75,72	Rp. 150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1 16 001 1 2 32	RET. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI	Rp. 30.000.000,00	Rp. 19.244.500,00	Rp. 64,15	Rp. 30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1 16 001 1 2 33	RET. GEROBAK SORONG	Rp. 10.000.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 6,00	Rp. 50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1 06 001 1 2 34	RET. IZIN PEBUJUAN BADAN KAPAL	Rp. 200.000.000,00	Rp. 107.724.150,00	Rp. 53,86	Rp. 250.000.000,00	KANPENDUK / DIPENDA	
1 18 001 1 2 37	RET. LEGES DAN BIAYA ADMINISTRASI	Rp. 160.000.000,00	Rp. 135.405.000,00	Rp. 84,63	Rp. 40.000.000,00	DISPERINDAG	
1 06 001 1 2 42	RET. IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	Rp. 375.000.000,00	Rp. 241.225.000,00	Rp. 64,33	Rp. 75.000.000,00	KANTOR SOSIAL	
1 12 001 1 2 44	RET. IZIN KEHATIAN PENGUSAHAAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp. 10.000.000,00	Rp. 5.055.000,00	Rp. 50,55	Rp. 10.000.000,00	KTR INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
1 22 001 1 2 45	RET. IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN PROMOSI	Rp. 50.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Rp. 44,00	Rp. 50.000.000,00	KANTOR PERTANIAN	
1 02 001 1 2 46	RET. PELAYANAN PERIZINAN USAHA LAHAN PERTANIAN	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 100,00	Rp. 2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	
1 11 001 1 2 48	DAN PENGGUNAAN / PENGUNJIAN ALAT PERTANIAN	Rp. 10.000.000,00	Rp. 1.600.000,00	Rp. 16,00	Rp. 10.000.000,00	BINA MARGA & PENGAIRAN	
1 15 001 1 2 50	LUAR SEKOLAH SERTA PELAYANAN PENINGKATAN PENDIDIKAN	Rp. 15.000.000,00	Rp. 14.775.000,00	Rp. 98,50	Rp. 5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1 16 003 1 2 51	RET. SUIJ KONSTRUKSI	Rp. 30.000.000,00	Rp. 19.470.000,00	Rp. 64,90	Rp. 2.500.000,00	BAGIAN FERKOTAAN	
1 01 003 1 2 52	RET. IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH	Rp. 150.000.000,00	Rp. 148.959.340,00	Rp. 99,31	Rp. 100.000.000,00	KANTOR PARIWISATA	
1 20 001 1 2 53 01	RET. USAHA KEPARIWISATAAN	Rp. 50.000.000,00	Rp. 46.905.500,00	Rp. 93,81	Rp. 15.000.000,00	KTR PERTAMBANGAN & ENERGI	
1 04 001 1 2 54 01	REKOMENDASI EKSPLORASI PERTAMBANGAN UMUM	Rp. 60.000.000,00	Rp. 70.075.000,00	Rp. 116,79	Rp. 65.000.000,00	KTR PERTAMBANGAN & ENERGI	
J U M L A H 1.2.3.							
1 01 003 1 3 02 01	BAGIAN LABA-BADAN USAHA DAERAH	Rp. 9.275.200.000,00	Rp. 5.374.806.132,50	Rp. 57,95	Rp. 10.080.200.000,00	Rp. 805.000.000,00	
1 01 003 1 3 02 01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 3.750.000.000,00	Rp. 2.586.009.407,91	Rp. 68,96	Rp. 4.250.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	
1 01 003 1 3 01 01	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	Rp. 3.750.000.000,00	Rp. 2.586.009.407,91	Rp. 68,96	Rp. 4.250.000.000,00	B P D / BAG. KEUANGAN	
1 01 003 1 3 01 02	PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN	Rp. 3.750.000.000,00	Rp. 2.586.009.407,91	Rp. 68,96	Rp. 4.250.000.000,00	PDAM / BAG. KEUANGAN	
J U M L A H 1.3.							
1 01 003 1 4 01	LAIN-LAIN PENDAPATAN	Rp. 13.185.000.000,00	Rp. 7.146.243.506,55	Rp. 54,20	Rp. 12.496.307.000,00	Rp. 688.698.000,00	
1 01 005 1 4 01 01	HASE PENJUALAN ASET DAERAH YG TIDAK DIPISAHKAN	Rp. 13.185.000.000,00	Rp. 7.146.243.506,55	Rp. 54,20	Rp. 12.496.307.000,00	BAG. PERLENGKAPAN	
1 01 005 1 4 01 03	ANGSURAN CICILAN RUMAH DINAS	Rp. 50.000.000,00	Rp. 12.830.500,00	Rp. 25,66	Rp. 35.000.000,00	BAG. KEUANGAN	
1 01 005 1 4 01 04	ANGSURAN CICILAN KENDARAAN BERKOTOR	Rp. 250.000.000,00	Rp. 147.246.588,00	Rp. 58,90	Rp. 300.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	
1 01 005 1 4 01 09	PENGEMBALIAN MODAL KOPERASI	Rp. 50.000.000,00	Rp. 25.244.790,00	Rp. 50,49	Rp. 50.000.000,00	KTR KOPERASI & UJMA	

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2005					LEBIH (KURANG)	INSTANSI PEMUNGUT
		TARGET	REALISASI	%	PENYESUAIAN			
1 01 005 1 4 01 10	KONTRIBUSI PELABUHAN LAUT (PT. PELINDO)	Rp. 350.000.000,00	Rp. 214.914.000,00	61,40	Rp. 400.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	PT. PELINDO	
1 01 005 1 4 01 11	KONTRIBUSI PELABUHAN UDARA	Rp. 185.000.000,00	Rp. 88.500.000,00	47,84	Rp. 185.000.000,00	Rp. -	PERUM. PELUD	
1 01 003 1 4 01 12	PENERIMAAN LAIN - LAIN :	Rp. 5.800.000.000,00	Rp. 6.018.324.940,60	103,77	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	BAGIAN KEUANGAN	
	a. Kontra Pos	Rp. 150.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	103,33	Rp. 200.000.000,00	Rp. 50.000.000,00		
	b. Jasa Utang	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 2.844.780.474,60	56,90	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -		
	c. Penerimaan Lain-Lain	Rp. 500.000.000,00	Rp. 3.070.723.110,00	604,14	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00		
	d. Pembayaran Bunga Pinjaman	Rp. -	Rp. -	-	Rp. -	Rp. -		
	e. Sebaran Hutang Pinjaman	Rp. 50.000.000,00	Rp. 27.026.356,00	54,05	Rp. 50.000.000,00	Rp. -		
	f. Mess Perawatan Jakarta	Rp. 100.000.000,00	Rp. -	-	Rp. 50.000.000,00	Rp. -		
1 01 003 1 4 02	PENERIMAAN JASA GIRO :	Rp. 6.500.000.000,00	Rp. -	-	Rp. 50.000.000,00	Rp. (50.000.000,00)		
1 01 003 1 4 02 01	a. Jasa Giro	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 630.050.687,95	9,69	Rp. 2.726.302.000,00	Rp. (3.723.698.000,00)	BAGIAN KEUANGAN	
1 01 003 1 4 05 01	b. Bunga Deposito	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 612.206.852,36	30,61	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. (500.000.000,00)	BAGIAN KEUANGAN	
1 01 005 1 4 06	DENDA	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 17.843.835,59	0,40	Rp. 1.226.302.000,00	Rp. (3.273.698.000,00)	BAGIAN KEUANGAN	
	J U M L A H 1.4.	Rp. 13.185.000.000,00	Rp. 7.146.263.506,55	54,20	Rp. 12.496.302.000,00	Rp. (688.697.993,00)	BAGIAN KEUANGAN	
2 1	DANA PERUBAHAN	Rp. 568.838.902.000,00	Rp. 235.029.854.504,00	41,32	Rp. 605.838.902.000,00	Rp. 37.000.000.000,00		
2 1 01	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	Rp. 308.230.000.000,00	Rp. 107.914.626.173,00	35,01	Rp. 335.750.000.000,00	Rp. 27.500.000.000,00		
1 01 005 2 1 01 01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( P B B ) :	Rp. 35.000.000.000,00	Rp. 17.260.924.058,00	49,32	Rp. 35.000.000.000,00	Rp. -	RP-PBB / DIPENDA	
	a. Bag. Penerimaan Kota Samarinda	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 17.260.924.058,00	57,54	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. -		
1 01 005 2 1 01 02	b. Bag. Dari Pemerintah Pusat	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -	-	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -		
	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) :	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 4.718.920.892,00	47,19	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. -	BPH / KP-PBB / DIPENDA	
	a. Penerimaan Pemerintah Kota Samarinda	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 4.718.920.892,00	58,99	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. -		
1 01 003 2 1 01 03	b. Luncuran dari Bagian Pemerintah Pusat	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. -	-	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. -		
	PAJAK PENGHASILAN :	Rp. 17.500.000.000,00	Rp. 7.228.830.056,00	41,31	Rp. 17.500.000.000,00	Rp. -	DIPENDA / BAG. KEUANGAN	
	a. Pasal 21	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 6.973.998.182,00	46,49	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. -		
	b. Pasal 25 / 29	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 254.831.874,00	10,19	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. -		
	J U M L A H 2.1.1.	Rp. 62.500.000.000,00	Rp. 29.208.675.006,00	46,73	Rp. 62.500.000.000,00	Rp. -		
1 01 003 2 1 02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SUMBER DAYA ALAM	Rp. 245.750.000.000,00	Rp. 78.705.951.167,00	32,03	Rp. 273.250.000.000,00	Rp. 27.500.000.000,00		
	SUMBER DAYA ALAM :	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -	-	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -	DIPENDA / BAG. KEUANGAN	
	a. Sektor Kehutanan :	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -	-	Rp. -	Rp. -		
	i. Iuran Hak Pengusahaan Hutan ( IHPH )	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -	-	Rp. -	Rp. -		
	ii. Provisi Sumber Daya Hutan ( PSOH )	Rp. -	Rp. -	-	Rp. -	Rp. -		
	b. Sektor Pertambangan Umum :	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -	-	Rp. -	Rp. -		
	i. Iuran Tebap ( Landrent )	Rp. 15.500.000.000,00	Rp. 9.160.003.071,00	59,1	Rp. 18.000.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00		
	ii. Iuran Eksploitasi	Rp. -	Rp. -	-	Rp. -	Rp. -		
	c. Iuran Eksploitasi ( Royalty )	Rp. 250.000.000,00	Rp. 162.302.590,00	64,92	Rp. 250.000.000,00	Rp. -		
	d. Pungutan Pengusahaan Perikanan	Rp. 15.250.000.000,00	Rp. 753.700.481,00	4,94	Rp. 17.750.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00		
	e. Pungutan Hasil Perikanan	Rp. 250.000.000,00	Rp. -	-	Rp. 250.000.000,00	Rp. -		
	f. Minyak Bumi	Rp. 100.000.000.000,00	Rp. 19.083.485.304,00	19,08	Rp. 50.000.000.000,00	Rp. (50.000.000.000,00)		
	g. Gas Alam	Rp. 125.000.000.000,00	Rp. 58.706.462.792,00	46,97	Rp. 200.000.000.000,00	Rp. 75.000.000.000,00		
	J U M L A H 2.1.2.	Rp. 245.750.000.000,00	Rp. 78.705.951.167,00	32,03	Rp. 273.250.000.000,00	Rp. 27.500.000.000,00		
	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Rp. 194.482.000.000,00	Rp. 113.447.833.331,00	58,33	Rp. 194.482.000.000,00	Rp. -		
1 01 003 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum ( DAU )	Rp. 194.482.000.000,00	Rp. 113.447.833.331,00	58,33	Rp. 194.482.000.000,00	Rp. -	DIPENDA / BAG. KEUANGAN	
	J U M L A H 2.2.	Rp. 194.482.000.000,00	Rp. 113.447.833.331,00	58,33	Rp. 194.482.000.000,00	Rp. -		
1 01 003 2 3 01 01	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Rp. 8.356.902.000,00	Rp. -	-	Rp. 8.356.902.000,00	Rp. -	DIPENDA / BAG. KEUANGAN	
	a. D A K - DR	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. -	-	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. -	DIPENDA / BAG. KEUANGAN	
	b. D A K - Non DR	Rp. 5.856.902.000,00	Rp. -	-	Rp. 5.856.902.000,00	Rp. -	DIPENDA / BAG. KEUANGAN	

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN		TAHUN 2005				LEBIH (KURANG)	INSTANSI PEMUNGUT
	1	2	3	4	5	6		
1 01 003 2 4 01	BAGI HASIL PAJAK & BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI		Rp. 57.750.000.000,00	Rp. 13.667.395.000,00	23,87	Rp. 67.250.000.000,00	Rp. 9.500.000.000,00	
1 01 003 2 4 01 01	BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI		Rp. 32.750.000.000,00	Rp. 13.667.395.000,00	41,73	Rp. 35.250.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
1 01 003 2 4 01 03	PAJAK KENDARAAN BERKOTOR (PKB)		Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 3.487.369.000,00	34,87	Rp. 12.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
1 01 003 2 4 01 05	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERKOTOR (BBNKB)		Rp. 12.500.000.000,00	Rp. 5.580.257.000,00	44,64	Rp. 12.500.000.000,00	Rp.	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
1 01 003 2 4 01 05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERKOTOR (PBKKB)		Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 4.425.738.100,00	44,26	Rp. 10.000.000.000,00	Rp.	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
1 04 001 2 4 01 07	PAJAK PENGAMBILAN & PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN		Rp. 250.000.000,00	Rp. 174.031.000,00	69,61	Rp. 250.000.000,00	Rp.	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
1 01 003 2 4 02	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI		Rp. 25.000.000.000,00	Rp.		Rp. 32.000.000.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	
1 01 003 2 4 02 01	BANTUAN KEUANGAN / SUBSIDI PEMBANGUNAN PROPINSI		Rp. 25.000.000.000,00	Rp.		Rp. 32.000.000.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	DIPENDA / BAG. KEUANGAN
	J U M L A H 2.4.		Rp. 57.750.000.000,00	Rp. 13.667.395.000,00	23,87	Rp. 67.250.000.000,00	Rp. 9.500.000.000,00	
	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH							
1 01 003 3 1 02	BANTUAN DANA KONTJENSI/PENYEBANG DARI PEMERINTAH		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	
1 01 003 3 1 02 01	DANA KONTJENSI/PENYEBANG DARI PEMERINTAH PUSAT		Rp. 11.502.000.000,00	Rp.		Rp. 11.502.000.000,00	Rp.	
	DANA PILKADA DARI PEMERINTAH PUSAT		Rp.	Rp. 1.057.380.000,00		Rp. 1.057.380.000,00	Rp. 1.057.380.000,00	
1 01 003 3 1 03	DANA DARURAT		Rp. 11.502.000.000,00	Rp. 1.057.380.000,00	9,19	Rp. 12.559.380.000,00	Rp. 1.057.380.000,00	
1 01 003 3 1 03 01	Penanggulangan Korban/Musuh Akibat Bencana Alam		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	
1 01 003 3 1 03 02	Penanggulangan Korban/Musuh Akibat Bencana Sosial		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	
	J U M L A H 3.2.		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	
	PEMBAYARAN		Rp. 59.260.765.131,00	Rp. 34.260.765.131,00	57,81	Rp. 59.260.765.131,00	Rp.	
3 01 003 1	PENERIMAAN DAERAH		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	
3 01 003 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu		Rp. 34.260.765.131,00	Rp. 34.260.765.131,00	100,00	Rp. 34.260.765.131,00	Rp.	
3 01 003 1 2	Transfer dari Dana Cadangan		Rp. 25.000.000.000,00	Rp.		Rp. 25.000.000.000,00	Rp.	
3 01 003 1 3	Penerimaan Pinjaman E Oligasi		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	
1 01 003 1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	
	J U M L A H P E M B I A Y A A N		Rp. 59.260.765.131,00	Rp. 34.260.765.131,00	57,81	Rp. 59.260.765.131,00	Rp.	
	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN		Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 8.539.350.002,00	42,70	Rp. 20.000.000.000,00	Rp.	
	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ( UKP )		Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 8.539.350.002,00	42,70	Rp. 20.000.000.000,00	Rp.	
	J U M L A H U R K P		Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 8.539.350.002,00	42,70	Rp. 20.000.000.000,00	Rp.	
	J U M L A H P E N D A P A T A N A S L I D A E R A H		Rp. 70.031.502.000,00	Rp. 35.937.618.969,96	51,32	Rp. 70.031.502.000,00	Rp.	
	J U M L A H D A N A P E R I M B A N G A N		Rp. 568.838.902.000,00	Rp. 235.029.854.504,00	41,32	Rp. 605.838.902.000,00	Rp. 37.000.000.000,00	
	J U M L A H L A I N - L A I N P E N E R I M A A N Y A N G S A H		Rp. 11.502.000.000,00	Rp. 1.057.380.000,00	9,19	Rp. 12.559.380.000,00	Rp. 1.057.380.000,00	
	J U M L A H P E M B I A Y A A N		Rp. 59.260.765.131,00	Rp. 34.260.765.131,00	57,81	Rp. 59.260.765.131,00	Rp.	
	J U M L A H U R U S A N K A S D A N P E R H I T U N G A N ( U K P )		Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 8.539.350.002,00	42,70	Rp. 20.000.000.000,00	Rp.	
	J U M L A H P E N D A P A T A N D A E R A H		Rp. 779.633.169.131,00	Rp. 314.824.968.606,96	43,15	Rp. 767.690.549.131,00	Rp. 38.057.380.000,00	

Samarinda, 14 Juli 2005  
Kepala Dinas Pendapatan Kota Samarinda,

Dr. H. Abd. Rachim AF.  
Pembina Tk. I NIP. 550 007 480

REALISASI PENERIMAAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2006

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	DESEMBER 2006		%	SISA TARGET
			80 NOPEMBER 2006	80 DESEMBER 2006		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1	PAJAK DAERAH					
1.01	PAJAK HOTEL	Rp. 2.750.000.000,00	Rp. 348.878.191,00	Rp. 1.049.250.275,00	68,57	Rp. (451.893.534,00)
1.01.005	1.1.01.01	Rp. 4.750.000.000,00	Rp. 624.214.095,00	Rp. 4.801.632.915,00	110,02	Rp. 475.848.910,00
1.01.005	1.1.03.01	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 249.015.950,00	Rp. 1.298.087.467,00	96,19	Rp. (12.802.593,00)
1.01.005	1.1.04.01	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 308.300.163,00	Rp. 2.407.892.205,00	108,65	Rp. 216.282.388,00
1.01.005	1.1.05.01	Rp. 17.998.889.000,00	Rp. 1.029.140,00	Rp. 18.972.629.393,99	108,46	Rp. 83.629.399,99
1.01.005	1.1.05.02	Rp. 17.999.000.000,00	Rp. -	Rp. 18.002.307.602,00	102,40	Rp. 72.301.683,00
1.01.005	1.1.06.01	Rp. 250.000.000,00	Rp. 10.219.660,00	Rp. 10.229.599,00	0,00	Rp. 11.318.708,00
1.01.001	1.1.06.01	Rp. 750.000.000,00	Rp. 118.129.500,00	Rp. 608.208.575,00	49,65	Rp. (23.981.625,00)
1.01.001	1.1.07.01	Rp. 39.489.889.000,00	Rp. 1.489.474.639,89	Rp. 29.199.853.712,99	189,53	Rp. 189.428.411,86
1	JUMLAH 1.1					
1.2	RETRIBUSI DAERAH					
1.09	RETRIBUSI JASA UMUM					
1.09.001	1.2.01.01	Rp. 689.889.000,00	Rp. 6.949.500,89	Rp. 655.217.588,99	118,48	Rp. 62.987.009,80
1.09.005	1.2.01.07	Rp. 800.000.000,00	Rp. 6.949.500,00	Rp. 655.917.500,00	110,49	Rp. 62.987.000,00
1.09.005	1.2.01.07	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -
1.10	RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA (RKK)					
1.10.001	1.2.03.01	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 352.052.000,00	Rp. 1.373.826.000,00	68,31	Rp. (782.142.000,00)
1.15	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAMANAN DAN PENGALIHAN KEMAZAH					
1.15.002	1.2.06.01	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 164.108.000,00	Rp. 2.142.628.000,00	115,35	Rp. 306.637.000,00
1.16	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN URBAN					
1.16.001	1.2.07.01	Rp. 1.519.889.000,00	Rp. 71.250.000,00	Rp. 4.075.000,00	83,50	Rp. (325.000,00)
1.14	RETRIBUSI PASAR					
1.14.001	1.2.07.01	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 71.250.000,00	Rp. 959.990.000,00	68,55	Rp. (10.000.000,00)
1.08	DINAS PASAR					
1.08.002	1.2.08.01	Rp. 1.845.889.000,00	Rp. 121.811.657,89	Rp. 1.698.889.220,89	91,85	Rp. (117.989.223,89)
1.12	DINAS PERHUBUNGAN					
1.12.602	1.2.10.02	Rp. 45.000.000,00	Rp. 121.811.557,00	Rp. 1.578.599.220,00	94,52	Rp. (99.589.223,00)
1.12.602	1.2.10.01	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 112.635.500,00	Rp. 28.500.000,00	58,89	Rp. (19.500.000,00)
1.12.002	1.2.10.01	Rp. 188.889.000,00	Rp. 3.599.999,99	Rp. 28.494.000,00	29,49	Rp. (79.596.000,00)
1.12.002	1.2.10.02	Rp. 100.000.000,00	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. (100.000.000,00)
1.05	DINAS KESEHATAN					
1.05.001	1.2.38.01	Rp. 50.000.000,00	Rp. 14.315.000,00	Rp. 16.904.000,00	0,00	Rp. 31.219.000,00
1.01	UPTD KEHUTANAN					
1.01.003	1.2.40.01	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 208.755.268,25	Rp. 2.178.800.428,70	68,27	Rp. (1.110.844.304,05)
1.01.003	1.2.40.01	Rp. 10.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100,00	Rp. -
1.01	BANGLUNAN LAINNYA					
1.01.002	1.2.41.01	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.607.000,00	58,14	Rp. (2.093.000,00)
1.08	DINAS PERUMAHAN					
1.08.001	1.2.43.01	Rp. 13.425.870.800,00	Rp. 1.032.362.866,25	Rp. 11.189.16.692,85	83,35	Rp. (2.235.283.307,05)

REALISASI PENERIMAAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2006

KODE/REKENING	JENIS PEMERIKHAAN	TARGET	Agust 2006	Ag September 2006	Ag Desember 2006	%	SISA TANGKAI
1	RETRIBUSI JUKAM UMUM	Rp. 14.987.000,00	Rp. 14.987.000,00	Rp. 14.987.000,00	Rp. 14.987.000,00	100,00	
1.1	RETRIBUSI PEMAKSIAN KESEKUTUAN DAERAH	Rp. 225.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	100,00	
1.01	a. IZIN PEMAKSIAN TANPA BANGKALAN	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	100,00	
1.01	b. SEWA ALAT BERAT	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	100,00	
1.12	c. SEWA RUMAH DUMAS	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	100,00	
1.14	d. PEMAKSIAN FASILITAS DERAGA	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	100,00	
1.14	RETRIBUSI TERMINAL	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	100,00	
1.15	RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	100,00	
1.02	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Rp. 280.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	100,00	
1.03	RETRIBUSI TEMPAT PENGABATAN KAPAL	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100,00	
1.14	RETRIBUSI MOBIL DESERK	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100,00	
1.15	RETRIBUSI LAMBAH DOMESTIK/LINGKUNGAN HDUP	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100,00	
1.07	RET. PELAYANAN JASA USAHA KOPERASI	Rp. 1.228.998.898,00	Rp. 1.228.998.898,00	Rp. 1.228.998.898,00	Rp. 1.228.998.898,00	100,00	
<b>J U M L A H 1.2.2</b>							
1.1	RETRIBUSI PERUBAHAN TERKENTU	Rp. 19.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	100,00	
1.12	RETRIBUSI LAIN MEMORANDUM BANGUNAN	Rp. 8.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	100,00	
1.01	URUSAN PERUMAHAN / PERUBAHAN FUNGSI	Rp. 395.000.000,00	Rp. 395.000.000,00	Rp. 395.000.000,00	Rp. 395.000.000,00	100,00	
1.18	S/P (Sambutan Pemukiman)	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	100,00	
1.08	RETR. LAIN TEMPAT PENJUALAN MIKSIAN BERALKOHOL	Rp. 1.875.654.000,00	Rp. 1.875.654.000,00	Rp. 1.875.654.000,00	Rp. 1.875.654.000,00	100,00	
1.06	RETR. LAIN TEMPAT PENJUALAN MIRAMAN BERALKOHOL	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	100,00	
1.01	LABELING MINYAK BERALKOHOL	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	100,00	
1.01	RETRIBUSI LAIN GANGGUAN (HO)	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	100,00	
1.14	RETRIBUSI LAIN TRAYEK	Rp. 75.250.000,00	Rp. 75.250.000,00	Rp. 75.250.000,00	Rp. 75.250.000,00	100,00	
1.14	RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG	Rp. 45.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	100,00	
1.14	GERORAK SORONG / KERETA SORONG	Rp. 1.904.500,00	Rp. 1.904.500,00	Rp. 1.904.500,00	Rp. 1.904.500,00	100,00	
1.14	RETRIBUSI LAIN PEMBERANTAN BAHAN KAPAL	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	100,00	
1.16	RETRIBUSI LEGES DAN BAYAN ADMINISTRASI	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	100,00	
1.06	RET. IZIN KEGIATAN PENGUSHAHAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	100,00	
1.11	RET. IZIN KEGIATAN PENGUSHAHAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100,00	
1.01	RET. IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN PROMOSI	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	100,00	
1.02	RET. PELAYANAN PERIZINAN USAHA LAHAN PERTANIAN	Rp. 1.900.000,00	Rp. 1.900.000,00	Rp. 1.900.000,00	Rp. 1.900.000,00	100,00	
<b>J U M L A H 1.2.3</b>							
1.10	RET. IZIN PERDIORAN DAN DAFTAR ULANG LEMBARA PERDIORAN	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100,00	
1.13	RET. SILU KONSTRUKSI	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	100,00	
1.16	RET. SERTIFIKASI KAPAL SUNGAI	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	100,00	
1.01	RET. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	100,00	
1.20	RET. USAHA KEPARAWISATAAN	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	100,00	
1.04	REKOMENDASI EKSPLOKORASI PERTAMBANGAN UMUM	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	100,00	
<b>J U M L A H 1.2.4</b>							
1	BAGIAN LABA BAHAN USAHA DAERAH	Rp. 14.527.750.400,00	Rp. 14.527.750.400,00	Rp. 14.527.750.400,00	Rp. 14.527.750.400,00	100,00	
1.01	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINJAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	
1.01	PERUSAHAAN DAERAH PERLOJONGAN	Rp. 4.877.518.871,00	Rp. 4.877.518.871,00	Rp. 4.877.518.871,00	Rp. 4.877.518.871,00	100,00	
1.01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 9.649.231.529,00	Rp. 9.649.231.529,00	Rp. 9.649.231.529,00	Rp. 9.649.231.529,00	100,00	

REVISI 1.1.2006



REALISASI PERBUKUAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2008

KODE REKENING	URAIAN PERBUKUAN	DESEMBER 2008		NOVEMBER 2008		DESEMBER 2008		%	SISA TARGET
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN								
1.01	ANGSURAN CIKLAN KENDARAAN BERMOTOR								
1.01.005	1.4.01.00	Rp. 465,000,000.00	Rp. 65,847,840.00	Rp. 442,396,718.04	Rp. 488,243,958.04	107.03	Rp. 32,748,048.96		BAG. PERLENGKAPAN
1.01.005	1.4.01.01	Rp. 180,000,000.00	Rp. 13,988,988.00	Rp. 166,011,012.00	Rp. 172,841,058.00	91.98	Rp. 7,158,942.00		BAG. KEUANGAN
1.01.005	1.4.01.02	Rp. 28,000,000.00	Rp. -	Rp. 28,000,000.00	Rp. 8,884,000.00	27.66	Rp. 19,116,000.00		PT. PELINDO
1.01.005	1.4.01.03	Rp. 490,000,000.00	Rp. 37,010,000.00	Rp. 384,084,088.00	Rp. 391,084,088.00	86.91	Rp. 58,915,912.00		PT. PELINDO
1.01.005	1.4.01.04	Rp. 175,000,000.00	Rp. 9,500,000.00	Rp. 165,500,000.00	Rp. 164,500,000.00	94.00	Rp. 10,500,000.00		PELUJ
1.01.005	1.4.01.05	Rp. 5,457,888,000.00	Rp. 28,626,872.00	Rp. 5,429,261,128.00	Rp. 561,989,822.16	10.28	Rp. 4,867,271,295.84		BAG. KEUANGAN
1.01.005	1.4.01.06	Rp. 150,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. 150,000,000.00		BAG. KEUANGAN
1.01.005	1.4.01.07	Rp. 4,750,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. 4,750,000,000.00		BAG. KEUANGAN
1.01.005	1.4.01.08	Rp. 425,000,000.00	Rp. 24,935,522.00	Rp. 400,064,478.00	Rp. 435,053,748.78	102.37	Rp. 34,988,253.78		BAG. KEUANGAN
1.01.005	1.4.01.09	Rp. 7,500,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. 6,129,225.38	81.72	Rp. 1,370,774.62		BAG. KEUANGAN
1.01.005	1.4.01.10	Rp. 50,000,000.00	Rp. 3,880,880.00	Rp. 46,119,120.00	Rp. 56,639,848.00	113.28	Rp. 6,520,728.00		BAG. KEUANGAN
1.01.005	1.4.01.11	Rp. 75,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. 63,277,000.00	84.37	Rp. 11,723,000.00		BAG. KEUANGAN
1.01.003	1.4.02.01	Rp. 13,598,888,888.89	Rp. 1,741,389,614.45	Rp. 11,857,500,000.00	Rp. 18,519,751,789.34	137.12	Rp. 6,662,248,789.34		BAG. KEUANGAN
1.01.003	1.4.02.02	Rp. 3,500,000,000.00	Rp. 755,008,244.70	Rp. 2,744,991,755.30	Rp. 4,824,655,889.88	137.05	Rp. 1,324,655,889.88		BAG. KEUANGAN
1.01.005	1.4.06	Rp. 10,000,000,000.00	Rp. 988,301,388.75	Rp. 12,689,704,518.61	Rp. 13,688,095,889.38	138.88	Rp. 3,688,095,889.38		BAG. KEUANGAN
1.01.005	1.4.06	Rp. 2,500,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. 2,400,000.00	0.09	Rp. 2,497,500.00		DPENDA
1	JUMLAH 1.4	Rp. 28,226,888,888.89	Rp. 1,885,822,822.45	Rp. 26,341,066,666.41	Rp. 28,257,204,415.44	100.16	Rp. 32,424,415.44		
1	DANA PERMBAKSI								
1	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUNYAK PAJAK								
1	BAGI HASIL PAJAK								
1.01	2.1.01								
1.01.005	2.1.01.01	Rp. 70,000,000,000.00	Rp. 27,106,583,114.00	Rp. 56,855,338,664.88	Rp. 83,161,822,778.00	118.89	Rp. 13,161,822,778.00		KP-RBB / DPENDA
1.01.005	2.1.01.02	Rp. 65,000,000,000.00	Rp. 28,161,528,063.00	Rp. 54,309,683,134.00	Rp. 80,470,191,987.00	123.80	Rp. 15,470,191,987.00		KP-RBB / DPENDA
1.01.005	2.1.01.03	Rp. 5,000,000,000.00	Rp. 945,094,251.00	Rp. 1,748,687,532.00	Rp. 2,891,731,781.00	55.83	Rp. 2,398,259,249.00		KP-RBB / DPENDA
1.01.005	2.1.01.04	Rp. 18,888,888,888.89	Rp. 1,621,675,785.98	Rp. 10,333,850,111.68	Rp. 12,415,445,211.26	124.12	Rp. 2,081,595,101.58		KP-RBB / DPENDA
1.01.005	2.1.01.05	Rp. 6,000,000,000.00	Rp. 1,388,328,168.00	Rp. 9,787,113,152.00	Rp. 11,165,441,321.00	136.82	Rp. 3,165,441,321.00		KP-RBB / DPENDA
1.01.003	2.1.01.06	Rp. 2,000,000,000.00	Rp. 23,917,628.00	Rp. 1,202,758,284.00	Rp. 1,228,103,880.00	61.31	Rp. 773,896,110.00		
1.01.003	2.1.01.07	Rp. 16,888,888,888.89	Rp. 3,208,582,788.88	Rp. 5,258,584,416.88	Rp. 14,578,587,118.08	91.12	Rp. 1,400,402,881.88		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.01.08	Rp. 15,000,000,000.00	Rp. 8,787,712,634.00	Rp. 4,988,582,858.00	Rp. 13,754,305,292.00	91.70	Rp. 1,245,684,788.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.01.09	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. 532,870,098.00	Rp. 292,391,758.00	Rp. 625,281,627.00	62.53	Rp. 174,738,173.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.01.10	Rp. 58,000,000,000.00	Rp. 37,848,851,812.00	Rp. 72,304,194,488.88	Rp. 110,153,638,168.00	114.74	Rp. 14,153,638,168.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1	JUMLAH 2.1.01	Rp. 482,558,888,888.89	Rp. 132,915,855,874.00	Rp. 378,363,244,188.68	Rp. 511,173,760,024.00	103.82	Rp. 18,823,788,024.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01	2.1.02								
1.01.003	2.1.02.01	Rp. 2,600,000,000.00	Rp. 1,878,505,951.00	Rp. 2,513,383,028.00	Rp. 4,392,888,980.00	168.98	Rp. 1,792,888,980.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.02.02	Rp. 500,000,000.00	Rp. 165,339,840.00	Rp. 58,792,168.00	Rp. 224,132,008.00	44.83	Rp. 275,867,840.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.02.03	Rp. 38,500,000,000.00	Rp. 24,884,047,802.00	Rp. 30,565,582,853.00	Rp. 55,659,630,755.00	140.40	Rp. 15,959,630,755.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.02.04	Rp. 250,000,000.00	Rp. 42,880,181.00	Rp. 259,029,659.00	Rp. 300,878,840.00	120.35	Rp. 50,878,840.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.02.05	Rp. 688,888,888.89	Rp. 116,824,111,900.00	Rp. 344,988,248,548.88	Rp. 451,020,360,448.00	189.23	Rp. 1,020,369,448.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.02.06	Rp. 92,000,000,000.00	Rp. 26,543,158,008.00	Rp. 83,308,131,748.00	Rp. 111,851,267,748.00	121.50	Rp. 19,851,267,748.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.02.07	Rp. 358,000,000,000.00	Rp. 77,680,955,882.00	Rp. 291,688,116,800.00	Rp. 339,169,027,682.00	94.74	Rp. 19,680,927,308.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	2.1.02.08	Rp. 482,558,888,888.89	Rp. 132,915,855,874.00	Rp. 378,363,244,188.68	Rp. 511,173,760,024.00	103.82	Rp. 18,823,788,024.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1	JUMLAH 2.1.02	Rp. 207,880,000,000.00	Rp. 24,387,013,335.00	Rp. 207,880,000,000.00	Rp. 231,947,083,333.00	111.50	Rp. 24,087,083,333.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN
1.01	2.2								
1.01.003	2.2.01.01	Rp. 287,880,888,888.89	Rp. 24,087,013,335.00	Rp. 207,880,000,000.00	Rp. 231,947,083,333.00	111.51	Rp. 24,087,083,333.00		DPENDA / BAG. KEUANGAN

REALISASI PENYERAJAAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2006

KODE REVENUE	JENIS PEREMBAHAN	TARGET	30 NOVEMBER 2006	30 DESEMBER 2006	%	SSA TARGET
1. 1. 1. 1. 2. 13. 01	RETRIBUSI JASA USAHA :	Rp. 235.899.800,00	Rp. 14.987.488,89	Rp. 172.933.767,00	73,51	Rp. 62.191.293,00
1. 01. 003. 1. 2. 13. 01	RETRIBUSI PEMANGGULAN KEKAYAAN DAERAH	Rp. 50.000.000,00	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. 50.000.000,00
1. 01. 001. 1. 2. 13. 02	a. IZIN PEMANGGULAN TANAH BERBANGUNAN	Rp. 35.000.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. 36.180.000,00	103,28	Rp. 1.158.000,00
1. 12. 001. 1. 2. 13. 04	a. SEMA ALAT BERAT	Rp. 25.000.000,00	Rp. 1.781.600,00	Rp. 21.493.167,00	85,81	Rp. 6.596.833,00
1. 14. 001. 1. 2. 13. 18	a. PEMANGGULAN FASILITAS DESMAGA	Rp. 125.000.000,00	Rp. 11.048.000,00	Rp. 119.345.600,00	92,28	Rp. 6.854.460,00
1. 14. 001. 1. 2. 16. 01	RETRIBUSI TERNAKAL	Rp. 450.000.000,00	Rp. 32.847.100,00	Rp. 392.351.300,00	87,19	Rp. 57.848.700,00
1. 15. 002. 1. 2. 19. 01	RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS	Rp. 65.000.000,00	Rp. 5.300.000,00	Rp. 65.200.000,00	100,31	Rp. 200.000,00
1. 02. 002. 1. 2. 20. 01	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Rp. 250.000.000,00	Rp. 68.268.500,00	Rp. 258.980.500,00	103,58	Rp. 8.858.500,00
1. 03. 001. 1. 2. 21. 01	RETRIBUSI TEMPAT PENDEKATAN KAPAL	Rp. 280.000.000,00	Rp. 48.650.250,00	Rp. 282.412.000,00	100,86	Rp. 2.412.800,00
1. 14. 001. 1. 2. 35. 01	RETRIBUSI MOBIL PEREK	Rp. 10.000.000,00	Rp. -	Rp. 8.780.000,00	87,80	Rp. 6.220.000,00
1. 15. 001. 1. 2. 38. 01	RETRIBUSI LAMBAH DOMESTIK / LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 10.000.000,00	Rp. 2.700.000,00	Rp. 17.880.000,00	178,80	Rp. 6.220.000,00
1. 07. 001. 1. 2. 40. 01	RET. PELAYANAN JASA USAHA KOPERASI	Rp. 20.000.000,00	Rp. 881.000,00	Rp. 18.008.000,00	90,03	Rp. 7.887.000,00
	J U M L A H 1.2.2	Rp. 1.528.898.800,00	Rp. 173.822.510,88	Rp. 1.214.276.387,08	81,88	Rp. 105.723.833,00
1. 1. 1. 2. 26.	RETRIBUSI PERUMAHAN TERSTUTU	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 2.186.528.738,32	Rp. 18.443.484.167,84	184,43	Rp. 443.484.167,84
1. 12. 001. 1. 2. 28. 01	RETRIBUSI LEBI MEMOROKAN BANGUNAN	Rp. 9.800.000.000,00	Rp. 2.071.308.238,32	Rp. 10.944.155.847,84	104,63	Rp. 444.155.847,84
1. 01. 005. 1. 2. 02. 01	URUSAN PERUMAHAN / PERUBAHAN FANGSI	Rp. 305.000.000,00	Rp. 281.882.500,00	Rp. 384.782.500,00	99,94	Rp. 621.500,00
1. 19. 001. 1. 2. 02. 01	SIP ( Surat Izin Pemukiman )	Rp. 5.000.000,00	Rp. 280.000,00	Rp. 4.546.000,00	90,92	Rp. 454.000,00
1. 08. 001. 1. 2. 27. 01	RETR. IZIN TEMPAT PEMALAN MARIJUAN BERALKOHOL	Rp. 1.875.000.000,00	Rp. 38.980.800,00	Rp. 638.850.000,00	33,52	Rp. 435.158.000,00
1. 08. 001. 1. 2. 27. 02	RETR. IZIN TEMPAT PENJUALAN MARIJUAN BERALKOHOL	Rp. 75.000.000,00	Rp. -	Rp. 74.500.000,00	99,33	Rp. 500.000,00
1. 01. 003. 1. 2. 28. 01	RETRIBUSI LAIN GANGGUAN (H O)	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 535.350.000,00	53,54	Rp. 494.650.000,00
1. 14. 001. 1. 2. 28.	RETRIBUSI LAIN TRAYEK	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 140.311.000,00	Rp. 2.351.085.083,00	124,57	Rp. 491.408.083,00
1. 14. 001. 1. 2. 30.	RETRIBUSI ANGKUTAN ORANG	Rp. 76.250.000,00	Rp. 380.000,00	Rp. 74.890.000,00	97,95	Rp. 1.580.000,00
1. 14. 001. 1. 2. 31.	RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG	Rp. 20.000.000,00	Rp. 48.000,00	Rp. 20.488.000,00	102,42	Rp. 488.000,00
1. 14. 001. 1. 2. 32. 01	RETRIBUSI ANGKUTAN SUNGAI	Rp. 45.000.000,00	Rp. -	Rp. 42.750.500,00	95,00	Rp. 2.248.500,00
1. 14. 001. 1. 2. 33. 01	GERBOK SORONG / KERETA SORONG	Rp. 30.000.000,00	Rp. 3.194.500,00	Rp. 28.352.500,00	94,51	Rp. 648.000,00
1. 18. 001. 1. 2. 33. 01	RETRIBUSI LAIN PEMALUAN BADAN KAPAL	Rp. 1.500.000,00	Rp. 720.000,00	Rp. 2.180.000,00	144,00	Rp. 680.000,00
1. 08. 001. 1. 2. 37. 01	RETRIBUSI LEGES DAN BAYAN ADMINISTRASI	Rp. 100.000.000,00	Rp. -	Rp. 73.810.500,00	73,81	Rp. 28.188.500,00
1. 08. 001. 1. 2. 42. 01	RETRIBUSI LAIN USAHA PERDAGANGAN TANPA DAFTAR PERUSAHAAN	Rp. 250.000.000,00	Rp. 20.894.000,00	Rp. 218.832.000,00	87,53	Rp. 51.188.000,00
1. 11. 001. 1. 2. 44. 01	RET. IZIN KEKAYAAN PENGUSAHAAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp. 500.000.000,00	Rp. 41.800.000,00	Rp. 549.825.000,00	109,83	Rp. 49.825.000,00
1. 01. 008. 1. 2. 45. 01	RET. IZIN USAHA PENYELANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN PROMOSI	Rp. 10.000.000,00	Rp. -	Rp. 13.765.250,00	137,65	Rp. 3.765.250,00
1. 02. 001. 1. 2. 46. 01	RET. PELAYANAN PERIZINAN USAHA LAHAN PERTANIAN	Rp. 50.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 50.500.000,00	113,00	Rp. 6.500.000,00
	J U M L A H 1.2.3	Rp. 14.927.790.800,00	Rp. 2.948.061.236,32	Rp. 15.289.630.344,62	102,39	Rp. 365.848.188,64
	J U M L A H 1.3	Rp. 10.000.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 7.600.000,00	84,00	Rp. 1.600.000,00
1. 19. 001. 1. 2. 50.	RET. SIJU KONSTRUKSI	Rp. 20.000.000,00	Rp. -	Rp. 21.875.000,00	109,38	Rp. 1.875.000,00
1. 16. 003. 1. 2. 51.	RET. SERTIFIKASI KAPAL SUNGAI	Rp. 30.000.000,00	Rp. 4.325.000,00	Rp. 32.240.000,00	107,47	Rp. 2.240.000,00
1. 01. 003. 1. 2. 52. 01	RET. IZIN PERURTIKUAN PENGGUNAAN TANAH	Rp. 500.000.000,00	Rp. -	Rp. 371.055.000,00	74,21	Rp. 128.945.000,00
1. 20. 001. 1. 2. 53.	RET. USAHA KEPERAWISATAAN	Rp. 60.000.000,00	Rp. 1.700.000,00	Rp. 68.085.000,00	113,31	Rp. 7.885.000,00
1. 04. 001. 1. 2. 54.	REKOMENDASI EKSPLOKASI PERTAMBANGAN UMUM	Rp. 150.000.000,00	Rp. -	Rp. 123.585.700,00	82,39	Rp. 28.414.300,00
	J U M L A H 1.3	Rp. 14.927.790.800,00	Rp. 2.948.061.236,32	Rp. 15.289.630.344,62	102,39	Rp. 365.848.188,64
1. 01. 003. 1. 3. 01. 01	BAGIAN LABA BADAN USAHA DAERAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-	Rp. -
1. 01. 003. 1. 3. 01. 02	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINJAU	Rp. 4.677.519.871,00	Rp. 2.459.412.762,55	Rp. 2.459.412.762,55	52,59	Rp. 2.218.107.108.451,00
1. 01. 003. 1. 3. 02. 01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 6.677.519.871,00	Rp. 2.459.412.762,55	Rp. 2.459.412.762,55	51,58	Rp. 2.218.107.108.451,00
	J U M L A H 1.3	Rp. 6.677.519.871,00	Rp. 2.459.412.762,55	Rp. 2.459.412.762,55	51,58	Rp. 2.218.107.108.451,00



REALISASI PENERIMAAN DAEWAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2005

KODE REKENING	JENIS PEMERINTAH	DESEMBER 2004		NOVEMBER 2004		80 DESEMBER 2004		%	SMA TARGET
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN								
1.01	ANGSURAN CIKILAN RUMAH DIMAS	Rp. 465.500.000,00	Rp. 55.647.840,00	Rp. 442.395.716,84	Rp. 486.243.958,84	Rp. 465.500.000,00	Rp. 52.741.550,94	107,03	BAG. PERLENGKAPAN
1.01.005	ANGSURAN CIKILAN KEUANGAN BERMOTOR	Rp. 160.000.000,00	Rp. 13.568.998,00	Rp. 109.352.000,00	Rp. 122.941.058,00	Rp. 160.000.000,00	Rp. 27.058.944,00	81,86	BAG. KEUANGAN
1.01.005.1.4	PENGEMBALAN MODAL KOPEKASI	Rp. 25.000.000,00	Rp. -	Rp. 6.694.000,00	Rp. -	Rp. 25.000.000,00	Rp. -	27,59	BAG. KEUANGAN
1.01.005.1.4.01	KONTRIBUSI PELAJARAN LAUT	Rp. 450.000.000,00	Rp. 37.010.000,00	Rp. 354.084.088,00	Rp. 391.094.088,00	Rp. 450.000.000,00	Rp. 68.965.912,00	86,91	PT. PELINDO
1.01.005.1.4.01.01	KONTRIBUSI PELAJARAN UDARA	Rp. 175.000.000,00	Rp. 9.500.000,00	Rp. 155.000.000,00	Rp. 164.500.000,00	Rp. 175.000.000,00	Rp. (10.500.000,00)	94,00	PELIND
1.01.005.1.4.01.02	PENERIMAAN LAIN-LAIN	Rp. 5.487.999.999,99	Rp. 24.608.472,89	Rp. 52.473.451,16	Rp. 561.889.923,16	Rp. 5.487.999.999,99	Rp. (4.896.489.978,84)	10,28	BAG. KEUANGAN
a	KONTRIPA POS	Rp. 150.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 150.000.000,00	Rp. -	0,00	BAG. KEUANGAN
b	SISA UUDP	Rp. 4.750.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 4.750.000.000,00	Rp. -	0,00	BAG. KEUANGAN
c	PENERIMAAN LAIN-LAIN	Rp. 425.000.000,00	Rp. 24.608.472,89	Rp. 410.118.227,78	Rp. 435.953.749,78	Rp. 425.000.000,00	Rp. 10.051.169,78	102,37	BAG. KEUANGAN
d	JASA DAN/ATAU SETORAN MODAL	Rp. 7.500.000,00	Rp. -	Rp. 6.129.235,39	Rp. 6.129.235,39	Rp. 7.500.000,00	Rp. (1.378.774,62)	81,63	BAG. KEUANGAN
e	SETORAN MATAHANG PELUANG	Rp. 50.000.000,00	Rp. 3.690.950,00	Rp. 52.949.998,00	Rp. 56.639.949,00	Rp. 50.000.000,00	Rp. 6.639.949,00	113,29	BAG. KEUANGAN
f	MESS PERHANKLAH JAKARTA	Rp. 75.000.000,00	Rp. -	Rp. 63.277.000,00	Rp. 63.277.000,00	Rp. 75.000.000,00	Rp. (11.723.000,00)	84,37	BAG. KEUANGAN
1.01.005.1.4.02	PEREMAHAN JASA GERO	Rp. 13.500.000.000,00	Rp. 1.741.389.814,45	Rp. 16.769.442.174,89	Rp. 18.510.751.769,34	Rp. 13.500.000.000,00	Rp. 5.010.751.769,34	137,12	BAG. KEUANGAN
1.01.005.1.4.02.01	JASA GERO	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 755.000.244,79	Rp. 4.069.047.955,28	Rp. 4.824.655.899,98	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 1.324.655.899,98	137,85	BAG. KEUANGAN
1.01.005.1.4.02.02	BANGUN DEPOSTO	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 988.391.389,75	Rp. 12.699.794.519,61	Rp. 13.686.095.869,36	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 3.686.095.869,36	138,68	BAG. KEUANGAN
1.01.005.1.4.05	DEBDA	Rp. 2.900.000,00	Rp. -	Rp. 2.400.000,00	Rp. 2.400.000,00	Rp. 2.900.000,00	Rp. (106.000,00)	82,75	DIFENDA
J U M L A H 1.4		Rp. 28.225.949.999,99	Rp. 1.865.822.622,45	Rp. 18.372.641.622,69	Rp. 20.257.924.415,44	Rp. 28.225.949.999,99	Rp. 32.423.415,44	10	
1	DANA PERMBAHAN								
1.01	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BURUAN PAJAK								
1.01.005	BAGI HASIL PAJAK								
1.01.005.2.1	BAGI HASIL PAJAK								
1.01.005.2.1.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	Rp. 78.000.000.000,00	Rp. 27.166.533.114,99	Rp. 56.955.339.864,80	Rp. 63.161.921.778,98	Rp. 78.000.000.000,00	Rp. 13.161.921.778,98	118,88	RP-PBB / DIFENDA
1.01.005.2.1.01.01	a. BAG. KOTA SAMARINDA (84%)	Rp. 65.000.000.000,00	Rp. 28.181.528.863,00	Rp. 54.309.663.134,00	Rp. 60.470.191.967,00	Rp. 65.000.000.000,00	Rp. 15.470.191.967,00	123,60	RP-PBB / DIFENDA
1.01.005.2.1.01.02	b. BAG. DARI PEMERINTAH PUSAT (10%)	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 945.094,251,00	Rp. 1.746.667.530,00	Rp. 2.691.731.761,00	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 2.346.268.216,00	53,65	RP-PBB / DIFENDA
1.01.005.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Rp. 18.000.000.000,00	Rp. 1.821.675.785,60	Rp. 10.349.639.416,89	Rp. 12.411.545.211,68	Rp. 18.000.000.000,00	Rp. 2.411.545.211,68	135,62	BPHTB / RP-PBB / DIFENDA
1.01.005.2.1.01.02	a. PEREMAHAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 1.388.328.169,00	Rp. 9.797.113.152,00	Rp. 11.166.441.321,00	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 3.166.441.321,00	139,62	BPHTB / RP-PBB / DIFENDA
1.01.005.2.1.01.02	b. LUNCURAN DARI BANGUNAN PEMERINTAH PUSAT	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 23.347.626,00	Rp. 1.202.756.264,00	Rp. 1.228.103.890,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. (773.668.110,00)	61,31	
1.01.005.2.1.01.02	PAJAK PENGHASILAN	Rp. 16.000.000.000,00	Rp. 9.328.562.763,60	Rp. 5.258.834.416,69	Rp. 14.578.587.118,08	Rp. 16.000.000.000,00	Rp. (1.421.412.881,92)	91,12	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.005.2.1.01.02	a. PASAL 21	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 8.797.712.634,00	Rp. 4.968.592.656,00	Rp. 13.754.395.292,00	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. (1.245.604.708,00)	91,70	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.005.2.1.01.02	b. PASAL 25/29	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 532.870.069,00	Rp. 292.391.759,00	Rp. 625.291.827,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. (174.738.173,00)	82,53	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
J U M L A H 2.1.01		Rp. 96.000.000.000,00	Rp. 37.944.851.872,69	Rp. 72.304.184.436,69	Rp. 110.153.935.168,08	Rp. 96.000.000.000,00	Rp. 14.153.935.168,08	114,74	
1	BAGI HASIL BURUAN PAJAK								
1.01	SUMBER DAYA ALAM	Rp. 482.354.000.000,00	Rp. 132.975.855.874,99	Rp. 378.363.244.198,08	Rp. 511.173.760.024,08	Rp. 482.354.000.000,00	Rp. 18.823.760.824,08	103,82	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	SEKTOR KEHUTANAN : IURAN HAK PENGHASILAN HUTAN	Rp. 2.600.000.000,00	Rp. 1.879.505.951,00	Rp. 2.513.363.029,00	Rp. 4.392.688.980,00	Rp. 2.600.000.000,00	Rp. 1.792.688.980,00	168,96	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003.2.1	SEKTOR KEHUTANAN : IURAN TETAP (LANDRENT)	Rp. 500.000.000,00	Rp. 165.339.840,00	Rp. 58.792.168,00	Rp. 224.132.008,00	Rp. 500.000.000,00	Rp. (275.867.994,69)	44,83	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003.2.1.02	SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM : IURAN EKSPLORASI	Rp. 39.500.000.000,00	Rp. 24.864.047.802,00	Rp. 30.565.582.853,00	Rp. 55.459.630.755,00	Rp. 39.500.000.000,00	Rp. 15.959.630.755,00	140,40	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003.2.1.02.01	SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM : IURAN EKSPLORASI (ROYALTY)	Rp. 250.000.000,00	Rp. 42.850.161,00	Rp. 259.029.859,00	Rp. 300.878.940,00	Rp. 250.000.000,00	Rp. 50.878.940,00	120,35	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003.2.1.02.02	PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN	Rp. 458.000.000.000,00	Rp. 166.024.111.900,00	Rp. 344.556.248.549,00	Rp. 451.020.380.449,00	Rp. 458.000.000.000,00	Rp. 1.600.380.449,00	109,23	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003.2.1.02.03	a. MINYAK BUMI	Rp. 82.000.000.000,00	Rp. 28.543.196.006,00	Rp. 83.308.131.749,00	Rp. 111.851.287.797,00	Rp. 82.000.000.000,00	Rp. 19.851.287.797,00	121,56	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003.2.1.02.04	b. GAS ALAM	Rp. 358.000.000.000,00	Rp. 77.480.955.892,00	Rp. 261.688.116.800,00	Rp. 339.169.072.652,00	Rp. 358.000.000.000,00	Rp. (18.630.927.308,00)	84,74	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
J U M L A H 2.1.02		Rp. 482.354.000.000,00	Rp. 132.975.855.874,99	Rp. 378.363.244.198,08	Rp. 511.173.760.024,08	Rp. 482.354.000.000,00	Rp. 18.823.760.824,08	103,82	
1	DANA ALOKASI UMUM (DAU)								
1.01	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Rp. 207.880.000.000,00	Rp. 24.367.013.332,00	Rp. 207.880.000.000,00	Rp. 231.947.083.333,00	Rp. 207.880.000.000,00	Rp. 24.067.083.333,00	111,56	DIFENDA / BAG. KEUANGAN
1.01.003	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Rp. 207.880.000.000,00	Rp. 24.367.013.332,00	Rp. 207.880.000.000,00	Rp. 231.947.083.333,00	Rp. 207.880.000.000,00	Rp. 24.067.083.333,00	111,56	DIFENDA / BAG. KEUANGAN

DINAS PENDAPATAN-KOTA SAMARINDA

REALISASI-PENYERAHAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2006

KODE-PEMBERI	JENIS PENERIMAAN	DESEMBER 2005		800 NOVEMBER 2006		800 DESEMBER 2006		%	SSA TARGET
		TARGET							
1. 01. 003. 2. 3. 01. 01	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Rp. 24,893,875,490.00	Rp. 5,208,414,490.00	Rp. 6,324,659,199.00	Rp. 11,538,474,599.00	46.39	Rp. (13,362,000,001.00)	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
a. DAK - DR		Rp. 11,288,331,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. (11,288,331,000.00)	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
b. DAK - Non DR		Rp. 13,595,744,490.00	Rp. 5,208,414,490.00	Rp. 6,324,659,199.00	Rp. 11,538,474,599.00	94.60	Rp. (2,066,289,901.00)	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
	JUMLAH 2.3	Rp. 24,893,875,490.00	Rp. 5,208,414,490.00	Rp. 6,324,659,199.00	Rp. 11,538,474,599.00	46.33	Rp. (13,332,609,801.00)		
1. 01. 003. 2. 4. 01. 01	BAGI HASIL PAJAK & BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	Rp. 12,000,000,000.00	Rp. 3,788,578,000.00	Rp. 11,008,187,000.00	Rp. 14,795,783,000.00	123.30	Rp. 2,795,783,000.00	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
1. 01. 003. 2. 4. 01. 01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Rp. 10,000,000,000.00	Rp. 3,880,942,000.00	Rp. 10,999,897,000.00	Rp. 14,655,839,000.00	146.56	Rp. 4,655,839,000.00	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
1. 01. 003. 2. 4. 01. 05	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BNKB)	Rp. 18,500,000,000.00	Rp. 10,870,402,000.00	Rp. 30,358,594,300.00	Rp. 41,028,999,300.00	221.77	Rp. 22,528,999,300.00	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
1. 04. 001. 2. 4. 01. 07	PAJAK PENGAMBILAN & PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	Rp. 790,000,000.00	Rp. 46,721,000.00	Rp. 330,503,000.00	Rp. 378,224,000.00	50.56	Rp. (370,776,000.00)	KTR PERTAMBANGAN & EN	
1. 01. 003. 2. 4. 02.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	Rp. 131,062,589,900.00	Rp. 29,302,590,000.00	Rp. 189,009,000,899.00	Rp. 138,002,590,000.00	100.00	Rp. -	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
1. 01. 003. 2. 4. 02. 01	BANTUAN KEUANGAN/SUBSIDI PEMBANGUNAN PROPINSI	Rp. 130,002,500,000.00	Rp. 29,000,000,000.00	Rp. 190,000,000,000.00	Rp. 138,002,500,000.00	100.00	Rp. -	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
1	LAIN-LAIN PEREMAHAN YANG SAH	Rp. 178,252,589,900.00	Rp. 47,185,141,000.00	Rp. 181,665,181,399.00	Rp. 200,889,322,300.00	118.53	Rp. 29,897,872,310.00		
1	BANTUAN DANA								
1. 01. 003. 3. 1. 02.	BANTUAN DANA KONTIENSIPEMBAHANG DARI PEMERINTAH								
1. 01. 003. 3. 1. 02. 1	DANA PEYESLUSAN ADHOC	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
1. 1. 3. 3. 1. 2. 2	DANA PELAKSA DARI PEMERINTAH PUSAT	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	DPENDM / BAG. KELUANGAN	
3	PEMBAYARAN-PEREMAHAN DAERAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
3. 01. 003. 1. 1. 00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp. 188,495,393,472.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	100.00	Rp. -		
3. 01. 003. 1. 2. 00	TRANSFER DARI DANA CADANGAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
3. 01. 003. 1. 3. 00	PENERIMAAN PRUJAMAN & ORLOJASI	Rp. 35,087,878,671.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. (35,087,878,671.00)		
3. 01. 003. 1. 4. 00	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG DIPISAKAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
4	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 271,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (85,087,678,671.22)		
4. 01. 003. 1. 1. 00	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
4. 01. 003. 1. 1. 00	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH UKP	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. 231,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (35,087,678,671.22)		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. 231,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (35,087,678,671.22)		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. 231,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (35,087,678,671.22)		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. 231,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (35,087,678,671.22)		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. 231,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (35,087,678,671.22)		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. 231,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (35,087,678,671.22)		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. 231,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (35,087,678,671.22)		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. 231,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (35,087,678,671.22)		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	Rp. 231,583,078,143.00	Rp. -	Rp. 186,495,393,471.78	Rp. 186,495,393,471.78	84.85	Rp. (35,087,678,671.22)		
	JUMLAH URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (URP)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 85,085,789,871.00	Rp. 3,351,248,396.57	Rp. 71,695,161,333.31	Rp. 81,055,393,828.88	95.28	Rp. (4,610,301,941.12)		
	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN	Rp. 1,010,245,575,490.00	Rp. 247,283,148,919.00	Rp. 826,538,678,185.00	Rp. 1,073,654,676,364.00	107.33	Rp. 73,319,108,984.00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -		
	JUMLAH PENERIMA								

REALISASI PENERIMAAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2007

KODE REVENUS	JENIS PENERIMAAN	TARGET	DESEMBER 2007		90 NOVEMBER 2007		90 DESEMBER 2007		%	SSA TARGET	URUTAN PEMUNGUT
1	PENDAPATAN ABLI DAERAH										
1	PAJAK DAERAH										
1.004.1.1.01.01	PAJAK HOTEL	Rp. 344,220,000.00	Rp. 364,220,000.00	Rp. 2,317,050,154.00	Rp. 2,691,050,000.00	Rp. 2,691,050,000.00	Rp. 2,691,050,000.00	77.65	Rp. 703,111,177.00	DPEMDA	
1.004.1.1.02.01	PAJAK RESTORAN	Rp. 5,750,000,000.00	Rp. 261,163,502.00	Rp. 5,693,235,100.00	Rp. 5,694,420,270.00	Rp. 5,694,420,270.00	Rp. 5,694,420,270.00	104.00	Rp. 234,420,270.00	DPEMDA	
1.004.1.1.03.01	PAJAK RESTORAN	Rp. 2,900,000,000.00	Rp. 428,053,002.00	Rp. 2,080,002,052.00	Rp. 2,459,468,744.00	Rp. 2,459,468,744.00	Rp. 2,459,468,744.00	86.93	Rp. (10,541,258.00)	DPEMDA	
1.004.1.1.04.01	PAJAK REKLAME	Rp. 3,000,000,000.00	Rp. 330,597,012.00	Rp. 330,597,012.00	Rp. 2,459,468,744.00	Rp. 2,459,468,744.00	Rp. 2,459,468,744.00	92.85	Rp. (214,356,128.00)	DPEMDA	
1.004.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN	Rp. 20,000,000,000.00	Rp. 522,564.00	Rp. 19,991,251,774.00	Rp. 19,991,774,338.00	Rp. 19,991,774,338.00	Rp. 19,991,774,338.00	98.41	Rp. (118,225,662.00)	PT. PLU GAS SAMARINDA	
	a. PALAK PENERANGAN JALAN PLN		Rp. -	Rp. 19,872,562,065.00	Rp. 19,872,562,065.00	Rp. 19,872,562,065.00	Rp. 19,872,562,065.00	99.39	Rp. (127,417,335.00)	DISPENDA	
	b. GENSET / GENERATOR		Rp. 522,564.00	Rp. 6,689,108.00	Rp. 6,689,108.00	Rp. 6,689,108.00	Rp. 6,689,108.00	0.00	Rp. 9,191,073.00	KTR PERTAMBANGANENERGI	
1.004.1.1.06.01	PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL C	Rp. 215,000,000.00	Rp. 25,374,485.00	Rp. 289,055,050.00	Rp. 315,320,535.00	Rp. 315,320,535.00	Rp. 315,320,535.00	148.29	Rp. 99,720,535.00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.004.1.1.07.01	PAJAK PARKIR	Rp. 750,000,000.00	Rp. 24,434,000.00	Rp. 871,280,575.00	Rp. 895,716,175.00	Rp. 895,716,175.00	Rp. 895,716,175.00	119.43	Rp. 145,716,175.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	JUMLAH 1.1	Rp. 35,680,680,000.00	Rp. 1,485,730,000.00	Rp. 33,577,650,544.00	Rp. 35,943,620,432.00	Rp. 35,943,620,432.00	Rp. 35,943,620,432.00	98.27	Rp. (817,178,568.00)		
	Pa. Daerah										
1.004.1.2	RETRIBUSI DAERAH										
1.004.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM										
1.004.1.2.01.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	Rp. 200,000,000.00	Rp. 5,767,500.00	Rp. 239,449,000.00	Rp. 244,238,500.00	Rp. 244,238,500.00	Rp. 244,238,500.00	122.12	Rp. 44,238,500.00	DINAS KESEHATAN	
1.004.1.2.01.02	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAJIAPAN / KEBERSIHAN	Rp. 2,500,000,000.00	Rp. 100,091,000.00	Rp. 1,221,608,000.00	Rp. 1,322,297,000.00	Rp. 1,322,297,000.00	Rp. 1,322,297,000.00	52.89	Rp. (1,177,703,000.00)	DINAS KEBERSIHAN	
1.004.1.2.01.03	RETRIBUSI PENGANTIAN BAYU CETAK KIT & AKTA GABIL	Rp. 165,000,000.00	Rp. 3,150,000.00	Rp. 153,071,000.00	Rp. 157,101,000.00	Rp. 157,101,000.00	Rp. 157,101,000.00	95.21	Rp. (7,899,000.00)	DINAS CATATAN SIPIL	
1.004.1.2.01.04	RETRIBUSI PELAYANAN PELAYAMAN DAN PENGABULAN LEMAZAH	Rp. 5,000,000.00	Rp. 1,585,000.00	Rp. 4,135,000.00	Rp. 5,470,000.00	Rp. 5,470,000.00	Rp. 5,470,000.00	109.40	Rp. 470,000.00	KANTOR KES. SOSIAL	
1.004.1.2.01.05	RETRIBUSI PAKIR DI TERU JALAN UMUM	Rp. 1,500,000,000.00	Rp. 35,410,000.00	Rp. 655,760,000.00	Rp. 691,190,000.00	Rp. 691,190,000.00	Rp. 691,190,000.00	53.17	Rp. (608,610,000.00)	DINAS PERHUBUNGAN	
1.004.1.2.01.06	RETRIBUSI PELAYANAN PASBAR	Rp. 1,850,000,000.00	Rp. 152,856,000.00	Rp. 1,593,344,111.00	Rp. 1,712,000,132.00	Rp. 1,712,000,132.00	Rp. 1,712,000,132.00	92.54	Rp. (137,963,868.00)	DINAS PENGELOLA PASAR	
	a. DINAS PASBAR		Rp. 150,168,021.00	Rp. 1,533,844,111.00	Rp. 1,694,030,132.00	Rp. 1,694,030,132.00	Rp. 1,694,030,132.00	91.03	Rp. (195,891,888.00)	UNIT CITRA NIAGA	
	b. SWADAYA CITRA NIAGA		Rp. 2,500,000.00	Rp. 25,500,000.00	Rp. 29,000,000.00	Rp. 29,000,000.00	Rp. 29,000,000.00	104.00	Rp. 28,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.004.1.2.01.07	RETRIBUSI PENGLIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp. 1,300,000,000.00	Rp. 90,140,000.00	Rp. 1,269,421,000.00	Rp. 1,359,870,000.00	Rp. 1,359,870,000.00	Rp. 1,359,870,000.00	104.58	Rp. 59,570,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.004.1.2.01.08	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 100,000,000.00	Rp. 23,000,000.00	Rp. 51,992,000.00	Rp. 74,892,000.00	Rp. 74,892,000.00	Rp. 74,892,000.00	74.99	Rp. (25,008,000.00)	KTR PELAYANAN KEBAKARAN	
1.004.1.2.01.09	RETRIBUSI PENGANTIAN BAYU CETAK PETA	Rp. 25,000,000.00	Rp. -	Rp. 1,575,000.00	Rp. 1,975,000.00	Rp. 1,975,000.00	Rp. 1,975,000.00	6.30	Rp. (23,025,000.00)	DISKARBANKKOT	
1.004.1.2.01.10	RETRIBUSI PELAYANAN PENDOKAN	Rp. 11,000,000.00	Rp. 2,900,000.00	Rp. 6,890,000.00	Rp. 9,700,000.00	Rp. 9,700,000.00	Rp. 9,700,000.00	88.18	Rp. (1,300,000.00)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	
	JUMLAH 1.2.1	Rp. 7,454,000,000.00	Rp. 415,000,521.00	Rp. 4,163,073,111.00	Rp. 5,574,161,632.00	Rp. 5,574,161,632.00	Rp. 5,574,161,632.00	74.81	Rp. (1,877,838,368.00)		
	RETRIBUSI JASA USAHA										
1.004.1.2.02	RETRIBUSI PEMUKAM KEMAYAN DAERAH	Rp. 520,000,000.00	Rp. 6,224,274.00	Rp. 487,345,489.00	Rp. 493,565,763.00	Rp. 493,565,763.00	Rp. 493,565,763.00	94.92	Rp. (66,434,237.00)	BAGIAN PERKOTAAN	
1.004.1.2.02.01	RETRIBUSI PEMUKAM TANAH/BAKSELIN	Rp. 250,000,000.00	Rp. -	Rp. 246,866,000.00	Rp. 246,866,000.00	Rp. 246,866,000.00	Rp. 246,866,000.00	98.75	Rp. (3,134,000.00)	DINAS BINA MARGA/PENGABULAN	
	b. SEWA ALAT BERAT	Rp. 45,000,000.00	Rp. 2,125,000.00	Rp. 36,180,000.00	Rp. 38,285,000.00	Rp. 38,285,000.00	Rp. 38,285,000.00	85.09	Rp. (18,844,537.00)	DINAS PENDAPATAN	
	c. SEWA RUMAH DINAS	Rp. 25,000,000.00	Rp. 16,774.00	Rp. 6,134,888.00	Rp. 6,153,463.00	Rp. 6,153,463.00	Rp. 6,153,463.00	24.61	Rp. 156,300.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	d. SEWA RUMAH PERUMAHAN	Rp. 100,000,000.00	Rp. 4,076,500.00	Rp. 94,076,400.00	Rp. 100,156,300.00	Rp. 100,156,300.00	Rp. 100,156,300.00	100.16	Rp. 156,300.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	e. MESS PERUMAHAN JAKARTA	Rp. 100,000,000.00	Rp. -	Rp. 102,105,000.00	Rp. 102,105,000.00	Rp. 102,105,000.00	Rp. 102,105,000.00	102.11	Rp. 2,105,000.00	KANTOR PERUMAHAN	
1.004.1.2.02.03	RETRIBUSI TERPAK BEL ANGAN	Rp. 300,000,000.00	Rp. 99,828,750.00	Rp. 202,619,500.00	Rp. 301,046,250.00	Rp. 301,046,250.00	Rp. 301,046,250.00	100.35	Rp. 1,046,250.00	DINAS PERUMAHAN	
1.004.1.2.02.04	RETRIBUSI TERPAK BEL	Rp. 450,000,000.00	Rp. 24,438,800.00	Rp. 398,527,600.00	Rp. 412,864,500.00	Rp. 412,864,500.00	Rp. 412,864,500.00	91.77	Rp. (37,035,500.00)	DINAS KEBERSIHAN	
1.004.1.2.02.07	RETRIBUSI PENTIDUAN DAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS	Rp. 74,250,000.00	Rp. 5,450,000.00	Rp. 61,150,000.00	Rp. 68,600,000.00	Rp. 68,600,000.00	Rp. 68,600,000.00	98.70	Rp. (7,650,000.00)	DINAS KEBERSIHAN	
1.004.1.2.02.08	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	Rp. 380,000,000.00	Rp. 33,720,000.00	Rp. 345,410,500.00	Rp. 376,130,500.00	Rp. 376,130,500.00	Rp. 376,130,500.00	105.31	Rp. 18,130,500.00	KANTOR PETERNAKAN	
1.004.1.2.02.09	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABIHAN (PT. PELINDO)	Rp. 650,000,000.00	Rp. -	Rp. 274,820,350.00	Rp. 274,820,350.00	Rp. 274,820,350.00	Rp. 274,820,350.00	61.07	Rp. (175,179,650.00)	PT. PELINDO CAB. SAMARINDA	
1.004.1.2.02.12	RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	Rp. 20,000,000.00	Rp. 3,485,000.00	Rp. 20,101,000.00	Rp. 23,569,000.00	Rp. 23,569,000.00	Rp. 23,569,000.00	117.88	Rp. 3,569,000.00	BAPEBALDA	
1.004.1.2.02.13	RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH PADAT	Rp. 30,000,000.00	Rp. -	Rp. 108,467,500.00	Rp. 108,467,500.00	Rp. 108,467,500.00	Rp. 108,467,500.00	0.00	Rp. 108,467,500.00	KANTOR PERTAMBANGAN	
1.004.1.2.02.14	RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM BAHAN GALIAN	Rp. 60,000,000.00	Rp. -	Rp. 6,500,000.00	Rp. 6,500,000.00	Rp. 6,500,000.00	Rp. 6,500,000.00	0.00	Rp. 7,687,000.00	KANTOR PERTAMBANGAN	
1.004.1.2.02.15	RETRIBUSI BANDARA (PT. ANGKASA PURA)	Rp. 7,500,000.00	Rp. -	Rp. 44,000,000.00	Rp. 44,000,000.00	Rp. 44,000,000.00	Rp. 44,000,000.00	73.33	Rp. (16,000,000.00)	BANDARA TEMBUNG	
	JUMLAH 1.2.2	Rp. 2,241,750,000.00	Rp. 172,927,521.60	Rp. 1,946,149,535.00	Rp. 2,119,077,863.00	Rp. 2,119,077,863.00	Rp. 2,119,077,863.00	94.53	Rp. (122,672,137.60)	DINAS PERHUBUNGAN	

REALISASI PENERIMAAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2007

KODE REKENING	JENIS PEMERINTAH	TARGET	DESEMBER 2007	30 NOVEMBER 2007	30 DESEMBER 2007	%	SEMA TARGET	INSTRANSI PEMERINTAH
1. .04.1.2.03.	RETRIBUSI PERUBAHAN TERTENTU	Rp. 10.000.000,00	Rp. 789.702.025,00	Rp. 11.202.020.518,00	Rp. 11.802.322.135,00	110,02	Rp. 1.802.322.135,00	
1. .04.1.2.03.01	RETRIBUSI LAIN MEMORANDUM BANGUNAN	Rp. 9.000.000,00	Rp. 395.746.025,00	Rp. 10.907.619.510,00	Rp. 11.603.350.135,00	128,07	Rp. 2.003.350.135,00	DISKUMBAKROKOT
	a. IMB	Rp. 395.000,00	Rp. 13.862.000,00	Rp. 373.250.000,00	Rp. 387.182.000,00	98,02	Rp. (7.808.000,00)	DISKUMBAKROKOT
	b. URUSAN PERUBAHAN / PERUBAHAN FUNGSI	Rp. 5.000,00	Rp. -	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00	35,60	Rp. (3.220.000,00)	DISKUMBAKROKOT
	c. SURAT IZIN PEMERINTAH (SIP)	Rp. 999.899,00	Rp. 52.500,00	Rp. 859.259.999,99	Rp. 841.250.000,00	161,18	Rp. 19.759.999,99	
1. .04.1.2.03.01	RETRIBUSI LAIN TERPENT PERALAMAN BERALKOHOL	Rp. 825.000,00	Rp. 52.500,00	Rp. 789.750.000,00	Rp. 841.250.000,00	101,97	Rp. 18.250.000,00	DISPERINDAG
	a. LABEL MINUMAN BERALKOHOL	Rp. 75.000,00	Rp. -	Rp. 69.500,00	Rp. 69.500,00	92,67	Rp. (5.500.000,00)	BAGIAN PERKOTAMAAN
	b. IZIN TEMPAT	Rp. 2.500.000,00	Rp. 161.308.980,00	Rp. 2.894.860.980,00	Rp. 2.894.115.646,00	116,84	Rp. 498.115.646,00	BAGIAN PERKOTAMAAN
1. .04.1.2.03.03	RETRIBUSI LAIN GANGGUAN (HO)	Rp. 85.000,00	Rp. 140.000,00	Rp. 20.722.500,00	Rp. 23.817.500,00	60,46	Rp. (10.810.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN
1. .04.1.2.03.04	RETRIBUSI LAIN TRAYEK	Rp. 50.000,00	Rp. 3.095.000,00	Rp. 20.722.500,00	Rp. 23.817.500,00	47,64	Rp. (28.182.500,00)	DINAS PERHUBUNGAN
1. .04.1.2.03.06	RETRIBUSI USAHA ANGGUTAN SUNGAI	Rp. -	Rp. 84.000,00	Rp. 20.318.000,00	Rp. 20.400.000,00	0,00	Rp. 20.400.000,00	
1. .04.1.2.03.07	RETRIBUSI ANGGUTAN ORANG (SUKAB)	Rp. 150.000,00	Rp. -	Rp. 156.460.000,00	Rp. 156.460.000,00	104,31	Rp. 6.460.000,00	DISPERINDAG
1. .04.1.2.03.07	RETRIBUSI IZIN PEMBIATAN BADAN KAPAL	Rp. 450.000,00	Rp. 31.050.000,00	Rp. 485.550.000,00	Rp. 518.000.000,00	114,60	Rp. 68.000.000,00	DISPERINDAG
1. .04.1.2.03.09	RETRIBUSI IZIN USAHA PERAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	Rp. 7.500,00	Rp. -	Rp. 8.098.250,00	Rp. 8.098.250,00	106,78	Rp. 508.250,00	KANTOR KESSOS
1. .04.1.2.03.09	RETRIBUSI KEGIATAN PENGUSHAAN DIBANDING KESEJAHTERAAN SOS.	Rp. 60.000,00	Rp. 5.250.000,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.250.000,00	100,42	Rp. 250.000,00	KANTOR INKOM
1. .04.1.2.03.10	RET. IZIN USAHA PENYELenggaraAN PELAYANAN INFORMASI DAN PROMOSI	Rp. 40.000,00	Rp. 650.000,00	Rp. 34.075.000,00	Rp. 34.725.000,00	88,81	Rp. (5.275.000,00)	DINAS BINA MARGA PENGANGKARAN
1. .04.1.2.03.11	RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SUKA)	Rp. 30.195.000,00	Rp. 3.320.000,00	Rp. 33.865.000,00	Rp. 37.185.000,00	123,15	Rp. 6.890.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1. .04.1.2.03.12	RETRIBUSI IZIN PERKURSIAN PENGUNAAN TANAH	Rp. 600.000,00	Rp. -	Rp. 805.884.250,00	Rp. 805.884.250,00	134,32	Rp. 205.884.250,00	BAGIAN PERKOTAMAAN
1. .04.1.2.03.14	RETRIBUSI USAHA KEPERAWISATAN	Rp. 100.000,00	Rp. 9.650.000,00	Rp. 114.777.450,00	Rp. 124.377.450,00	124,38	Rp. 24.377.450,00	KANTOR PARMISAKATA
1. .04.1.2.03.15	RETRIBUSI TEMPAT PENALUNGAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp. 50.000,00	Rp. 3.135.000,00	Rp. 28.174.910,00	Rp. 31.309.910,00	62,62	Rp. (18.899.190,00)	DINAS PENDAPATAN
1. .04.1.2.03.16	RETRIBUSI PERSEDIAAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN LUTAN	Rp. 2.500.000,00	Rp. 92.480.500,00	Rp. 445.739.500,00	Rp. 539.219.000,00	21,53	Rp. (1.981.789.200,00)	DINAS PERTANAHAN
1. .04.1.2.03.17	RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA KOPERASI	Rp. 10.000,00	Rp. -	Rp. 13.476.000,00	Rp. 13.476.000,00	134,76	Rp. 3.476.000,00	KANTOR KOPERASI DAN URUM
1. .04.1.2.03.18	RETRIBUSI TEMPAT PENAMPILAN KAYU BUNDAKRAYU MASA	Rp. 10.000,00	Rp. 21.842.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. 54.942.000,00	569,42	Rp. 46.942.000,00	DINAS PERTANAHAN
	JUMLAH 1.2.3	Rp. 17.542.885.000,00	Rp. 1.094.307.045,06	Rp. 17.391.835.918,00	Rp. 18.395.342.821,68	104,86	Rp. 852.847.821,68	
	RETRIBUSI							
1. .04.1.3. . .	HASIL PENKELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPERBAHARUKAN	Rp. 4.186.755.000,00	Rp. -	Rp. 3.753.502.821,33	Rp. 3.753.502.821,33	89,81	Rp. (485.252.818,67)	
1. .04.1.3.01.	BAGIAN LABA ATAS PERTERTIAN MODAL PADA PERUBAHAN MILIK DAERAH / BUMD	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	PO PAU
1. .04.1.3.01.01	PERUSAHAAN DAERAH PENGUDANGAN & ANEKA USAHA (POPAU)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	POJAM
1. .04.1.3.01.02	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	BPR PELAKOT
1. .04.1.3.01.03	BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)	Rp. 4.186.755.000,00	Rp. -	Rp. 3.753.502.821,33	Rp. 3.753.502.821,33	89,81	Rp. (485.252.818,67)	BPD KALTIMA
1. .04.1.3.01.04	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
	JUMLAH 1.3	Rp. 4.186.755.000,00	Rp. -	Rp. 3.753.502.821,33	Rp. 3.753.502.821,33	89,81	Rp. (485.252.818,67)	

REALISASI PENERIMAAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2007

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	DESEMBER 2007		80 NOVEMBER 2007		80 DESEMBER 2007		%	SBA TARGET	DISTRIBUSI PEMBIYUT
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%			
1. 004.1.4.01.29	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BAH	Rp. 38.319.267,220.00	Rp. 4.899.813,445.75	Rp. 37.832.246,191.88	Rp. 17.584,163,622.49	Rp. 20.855,949,255.49	Rp. 20.855,949,255.49	100.00	Rp. 11,713,393,216.83	BAGI PERLENGKAPAN	
1. 004.1.4.01	PENERIMAAN LAIN-LAIN :	Rp. 1.294.267,320.00	Rp. 2.471,745,833.90	Rp. 17.584,163,622.49	Rp. 17.584,163,622.49	Rp. 20.855,949,255.49	Rp. 20.855,949,255.49	100.00	Rp. 19,851,873,195.49	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.01	a. KONTRAK POS	Rp. 993,569,663.00	Rp. 728,324,200.00	Rp. 1.423,034,666.00	Rp. 2,157,259,066.00	Rp. 2,157,259,066.00	Rp. 2,157,259,066.00	100.00	Rp. 1,205,698,693.00	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.01	b. SISA ULEP	Rp. -	Rp. -	Rp. 10,224,067,385.06	Rp. 10,224,067,385.06	Rp. 10,224,067,385.06	Rp. 10,224,067,385.06	100.00	Rp. 10,224,067,385.06	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.01	c. SETORAN DAN HUTANG PUNJAMAN	Rp. 40,899,037.00	Rp. 8,169,470.00	Rp. 68,465,797.73	Rp. 74,599,267.73	Rp. 74,599,267.73	Rp. 74,599,267.73	100.00	Rp. 39,901,230.73	PT. PELINDO	
1. 004.1.4.01	d. LEGAS DAN BAYAR ADMINISTRASI	Rp. 200,000,000.00	Rp. 18,408,000.00	Rp. 106,147,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. (73,445,060.00)	PELID	
1. 004.1.4.01.19	e. PENGEMBALIAN MODAL KOPERASI	Rp. 10,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. (10,000,000.00)	KANTOR KOPERASI DAN UKUM	
1. 004.1.4.01.19	f. PENERIMAAN LAIN-LAIN	Rp. -	Rp. 1,716,221,183.00	Rp. 5,755,568,403.70	Rp. 1,050,000.00	Rp. 7,471,869,568.70	Rp. 7,471,869,568.70	100.00	Rp. 7,471,869,568.70	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.02	g. DENGA	Rp. -	Rp. 600,000.00	Rp. 1,050,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. 1,550,000.00	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.02	PEREMBAHAN JASA GERO	Rp. 8,549,819,800.00	Rp. 698,416,859.10	Rp. 7,757,274,378.87	Rp. 8,353,631,236.97	Rp. 8,353,631,236.97	Rp. 8,353,631,236.97	98.43	Rp. (139,308,763.03)	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.02.01	a. JASA GERO KAS DAERAH	Rp. 8,500,000,000.00	Rp. 608,416,859.10	Rp. 7,757,274,378.87	Rp. 8,353,631,236.97	Rp. 8,353,631,236.97	Rp. 8,353,631,236.97	98.43	Rp. (139,308,763.03)	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.02.02	b. JASA GERO PEMANGKAS	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.02.03	c. JASA GERO JAWA CADANGAN	Rp. 21,899,899,800.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	DPENDIA	
1. 004.1.4.03	d. PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO	Rp. 20,000,000,000.00	Rp. 1,690,242,465.65	Rp. 12,135,410,157.65	Rp. 13,135,753,423.30	Rp. 13,135,753,423.30	Rp. 13,135,753,423.30	65.68	Rp. (6,894,248,576.70)	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.03.01	e. PENGANGKUTAN DEPOSITO PADA BANK BPD KALTIMA	Rp. 615,000,000.00	Rp. 21,397,289.89	Rp. 455,349,132.87	Rp. 477,275,421.07	Rp. 477,275,421.07	Rp. 477,275,421.07	77.61	Rp. (197,724,578.93)	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.13	f. PENGUNCIAN DAN ANGSURAN / CICILAN PERJALANAN	Rp. 450,000,000.00	Rp. 19,394,640.00	Rp. 275,491,722.00	Rp. 294,688,392.00	Rp. 294,688,392.00	Rp. 294,688,392.00	65.53	Rp. (155,133,636.00)	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.13.01	g. ANGSURAN / CICILAN PERJALANAN RUMAH	Rp. 450,000,000.00	Rp. 1,922,640.00	Rp. 180,498,410.07	Rp. 182,409,059.07	Rp. 182,409,059.07	Rp. 182,409,059.07	110.55	Rp. 17,409,059.07	BAGI KEUANGAN	
1. 004.1.4.13.02	h. ANGSURAN / CICILAN PERJALANAN KENDARAAN	Rp. 30,319,267,620.00	Rp. 4,899,813,445.75	Rp. 37,592,846,881.88	Rp. 42,892,689,236.93	Rp. 42,892,689,236.93	Rp. 42,892,689,236.93	132.63	Rp. 11,713,393,216.83	BAGI KEUANGAN	
J U M L A H 1.4											
1. 004.2	DAWA PERBANGKALAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	BAGI KEUANGAN	
1. 004.2.1	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUNGA PAJAK	Rp. 91,500,889,800.00	Rp. 33,142,629,622.60	Rp. 103,150,291,784.16	Rp. 138,292,839,882.16	Rp. 138,292,839,882.16	Rp. 138,292,839,882.16	139.78	Rp. 39,782,839,882.16	BAGI KEUANGAN	
1. 004.2.1.01	BAGI HASIL PAJAK	Rp. 70,000,000,000.00	Rp. 27,423,423,682.00	Rp. 72,869,189,501.00	Rp. 100,303,622,163.00	Rp. 100,303,622,163.00	Rp. 100,303,622,163.00	143.29	Rp. 30,303,622,163.00	NP-PBB / DPENDIA	
1. 004.2.1.01.01	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	Rp. 12,500,000,000.00	Rp. 3,127,572,690.00	Rp. 5,127,572,690.00	Rp. 5,127,572,690.00	Rp. 5,127,572,690.00	Rp. 5,127,572,690.00	180.94	Rp. 10,118,022,138.16	BPN / NP-PBB / DPENDIA	
1. 004.2.1.01.02	BAGI HASIL DARI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	Rp. 15,000,000,000.00	Rp. 2,597,632,510.00	Rp. 10,773,553,973.00	Rp. 13,371,198,481.00	Rp. 13,371,198,481.00	Rp. 13,371,198,481.00	89.14	Rp. (1,628,613,517.00)	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.01.03	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25 DAN PASAL 29	Rp. 15,000,000,000.00	Rp. 2,597,632,510.00	Rp. 10,773,553,973.00	Rp. 13,371,198,481.00	Rp. 13,371,198,481.00	Rp. 13,371,198,481.00	89.14	Rp. (1,628,613,517.00)	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.01.03	WALUB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPh PASAL 21	Rp. 97,500,889,800.00	Rp. 33,142,629,622.60	Rp. 103,150,291,784.16	Rp. 138,292,839,882.16	Rp. 138,292,839,882.16	Rp. 138,292,839,882.16	139.78	Rp. 39,782,839,882.16	BAGI KEUANGAN	
J U M L A H 2.1.01											
1. 004.2.1.02	BAGI HASIL BUNGA PAJAK / SUMBER DAYA ALAM	Rp. 622,138,255,140.00	Rp. 105,761,324,953.00	Rp. 278,132,293,252.06	Rp. 384,883,683,905.68	Rp. 384,883,683,905.68	Rp. 384,883,683,905.68	61.85	Rp. (37,235,651,235.00)	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02	SUMBER DAYA ALAM	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.01	SEKTOR KEHUTANAN : IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN	Rp. 2,000,000,000.00	Rp. 1,535,640,468.00	Rp. 6,767,687,597.00	Rp. 6,333,523,063.00	Rp. 6,333,523,063.00	Rp. 6,333,523,063.00	320.52	Rp. 5,733,523,063.00	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.02	SEKTOR KEHUTANAN : PROVISI SUMBER DAYA HUTAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.03	SEKTOR KEHUTANAN : DANA REBOISASI	Rp. 281,228,540.00	Rp. 31,874,652.00	Rp. 165,315,940.00	Rp. 227,190,792.00	Rp. 227,190,792.00	Rp. 227,190,792.00	80.79	Rp. (54,037,148.00)	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.04	SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM : IURAN TETAP (LANDRENT)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.05	SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM : IURAN EKSPLORASI	Rp. 46,482,720,600.00	Rp. 13,892,520,970.00	Rp. 54,826,018,343.00	Rp. 68,708,539,313.00	Rp. 68,708,539,313.00	Rp. 68,708,539,313.00	147.82	Rp. 22,225,916,713.00	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.05	SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM : IURAN EKSPLOITASI (ROYALTY)	Rp. 464,545,000.00	Rp. 37,538,164.00	Rp. 447,635,616.00	Rp. 468,473,668.00	Rp. 468,473,668.00	Rp. 468,473,668.00	108.60	Rp. 30,828,980.00	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.06	PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERUKAMAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	BAGI KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.07	PUNGUTAN HASIL PERUKAMAN	Rp. 19,068,742,000.00	Rp. 28,322,773,821.00	Rp. 54,235,795,281.00	Rp. 62,559,569,112.00	Rp. 62,559,569,112.00	Rp. 62,559,569,112.00	104.37	Rp. 3,459,827,112.00	BAGI KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.08	PENERIMAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	Rp. 293,213,019,000.00	Rp. 62,950,972,360.00	Rp. 161,829,335,205.00	Rp. 224,580,307,845.00	Rp. 224,580,307,845.00	Rp. 224,580,307,845.00	76.59	Rp. (68,652,711,355.00)	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.09	PENERIMAAN PERTAMBANGAN GAS BUMI	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0.00	Rp. -	DPENDIA / BAG. KEUANGAN	
1. 004.2.1.02.10	PENERIMAAN PERTAMBANGAN PANAS BUMI	Rp. 422,138,255,140.00	Rp. 105,761,324,953.00	Rp. 278,132,293,252.06	Rp. 384,883,683,905.68	Rp. 384,883,683,905.68	Rp. 384,883,683,905.68	91.16	Rp. (37,235,651,235.00)	BAGI KEUANGAN	
J U M L A H 2.1.02											

REALISASI PENERIMAAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2007

NODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	DESEMBER 2007	30 NOVEMBER 2007	30 DESEMBER 2007	%	SSA TARGET	INSTANSI PEMERINTAH
1 004.2.2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Rp. 268.000.000,00	Rp. 24.087.063.337,00	Rp. 240.670.653.330,00	Rp. 264.737.616.687,00	91,87	Rp. (24.087.063.333,00)	DPENDATA / BAG. KEUANGAN
JUMLAH 2.2		Rp. 268.000.000,00	Rp. 24.087.063.337,00	Rp. 240.670.653.330,00	Rp. 264.737.616.687,00	91,87	Rp. (24.087.063.333,00)	
1 004.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Rp. 19.428.331.400,00	Rp. 2.741.200.048,00	Rp. 14.482.591.889,00	Rp. 17.144.131.008,00	88,24	Rp. (2.284.200.880,00)	DPENDATA / BAG. KEUANGAN
1 004.2.3.01	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Rp. -	Rp. -	Rp. 11.288.331.000,00	Rp. 11.288.331.000,00	0,00	Rp. 11.288.331.000,00	
a. D.A.K - DR		Rp. 19.428.331.000,00	Rp. 2.741.200.000,00	Rp. 3.138.060.000,00	Rp. 5.877.800.000,00	30,25	Rp. (13.950.531.000,00)	
b. D.A.K - Non DR		Rp. -	Rp. -	Rp. 14.482.591.889,00	Rp. 17.144.131.008,00	88,24	Rp. (2.284.200.880,00)	
JUMLAH 2.3		Rp. 19.428.331.400,00	Rp. 2.741.200.048,00	Rp. 14.482.591.889,00	Rp. 17.144.131.008,00	88,24	Rp. (2.284.200.880,00)	
1 004.3.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
1 004.3.1.01	PENDAPATAN REBAH BAGI PEMERINTAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
1 004.3.1.01.01	PEMERINTAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
JUMLAH 3.1		Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
1 004.3.1.02	DANA DARURAT	Rp. -	Rp. 4.686.000.000,00	Rp. -	Rp. 4.000.000.000,00	0,00	Rp. 4.000.000.000,00	
1 004.3.1.02.01	PENANGGULANGAN KORBAN/KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM	Rp. -	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. -	Rp. 4.000.000.000,00	0,00	Rp. 4.000.000.000,00	
JUMLAH 3.1		Rp. -	Rp. 4.686.000.000,00	Rp. -	Rp. 4.000.000.000,00	0,00	Rp. 4.000.000.000,00	
1 004.3.3	BAGI HASIL PAJAK & BANTUAN KEUANGAN DARI PROPRESI	Rp. 48.000.000.000,00	Rp. 26.230.211.860,00	Rp. 55.848.888.888,00	Rp. 62.178.828.888,00	132,84	Rp. 44.178.828.888,00	
1 004.3.3.01	BAGI HASIL PAJAK	Rp. 13.500.000.000,00	Rp. 5.054.784.000,00	Rp. 15.751.572.000,00	Rp. 20.805.358.000,00	154,12	Rp. 7.300.358.000,00	DPENDATA / BAG. KEUANGAN
1 004.3.3.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	DPENDATA / BAG. KEUANGAN
1 004.3.3.01.02	PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR	Rp. 11.500.000.000,00	Rp. 5.885.383.000,00	Rp. 10.533.641.000,00	Rp. 16.418.034.000,00	0,00	Rp. -	
1 004.3.3.01.03	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBKB)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
1 004.3.3.01.04	BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
1 004.3.3.01.05	PAJAK PENGAMBILAN & PENANFAATAN AIR BAWAH TANAH	Rp. 22.500.000.000,00	Rp. 15.220.756.000,00	Rp. 39.451.648.000,00	Rp. 54.672.404.000,00	242,88	Rp. 32.172.404.000,00	DPENDATA / BAG. KEUANGAN
1 004.3.3.01.06	PAJAK PENGAMBILAN & PENANFAATAN AIR PERMUKAAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	KTR PERTAMBANGAN & ENERGI
1 004.3.3.01.07	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPRESI	Rp. 500.000.000,00	Rp. 69.278.000,00	Rp. 212.748.000,00	Rp. 282.028.000,00	56,41	Rp. (212.974.000,00)	
1 004.3.3.01.08	PAJAK PENGAMBILAN & PENANFAATAN AIR PERMUKAAN	Rp. 384.867.585.500,00	Rp. 117.165.888.588,00	Rp. 159.567.585.588,00	Rp. 276.733.182.888,00	91,01	Rp. (27.334.313.588,88)	DPENDATA / BAG. KEUANGAN
1 004.3.3.01.09	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPRESI	Rp. 304.087.585.500,00	Rp. 117.165.888.500,00	Rp. 159.567.585.500,00	Rp. 276.733.182.888,00	91,01	Rp. (27.334.313.500,00)	DPENDATA / BAG. KEUANGAN
1 004.3.3.01.10	BANTUAN KEUANGAN/SUBSIDSI PEMBANGUNAN PROPRESI	Rp. 352.967.585.500,00	Rp. 147.395.887.588,00	Rp. 225.517.114.588,00	Rp. 372.913.872.000,00	105,82	Rp. 20.845.588.588,00	
JUMLAH 3.3		Rp. 788.300.000.000,00	Rp. 788.300.000.000,00	Rp. 1.437.759.372.288,38	Rp. 1.759.105.121.388,11	88,95	Rp. (218.534.602.518,89)	
1 004.3	PEMBAYARAN DAERAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
1 004.3.01	PEMBAYARAN DAERAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
1 004.3.01.01	SSA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	Rp. 488.428.518.354,00	Rp. -	Rp. 476.202.451.888,73	Rp. 476.202.451.888,73	97,98	Rp. (10.224.067.354,27)	
1 004.3.01.02	TRANSFER DARI DANA CADANGAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
1 004.3.01.03	PERUBAHAN PERALIHAN DAERAH	Rp. 213.874.045.777,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. (213.874.045.777,00)	
1 004.3.01.04	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG DIPISAHKAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,00	Rp. -	
JUMLAH 3.01		Rp. 702.302.564.131,00	Rp. -	Rp. 476.202.451.888,73	Rp. 476.202.451.888,73	68,00	Rp. (224.098.113.131,27)	
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rp. 702.302.564.131,00	Rp. -	Rp. 476.202.451.888,73	Rp. 476.202.451.888,73	68,00	Rp. (224.098.113.131,27)	
JUMLAH DAMA PERUBAHAN		Rp. 7.247.880.583,81	Rp. -	Rp. 99.874.385.822,41	Rp. 105.222.175.058,22	108,77	Rp. 9.513.107.886,22	
JUMLAH LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH		Rp. 352.967.585.500,00	Rp. 165.712.233.012,00	Rp. 225.517.114.588,00	Rp. 372.913.872.000,00	105,82	Rp. 20.845.588.588,00	
JUMLAH PEMBERAYAN		Rp. 788.300.000.000,00	Rp. 788.300.000.000,00	Rp. 1.437.759.372.288,38	Rp. 1.759.105.121.388,11	88,95	Rp. (218.534.602.518,89)	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		Rp. 1.977.848.723.891,00	Rp. 321.955.889.045,81	Rp. 1.437.759.372.288,38	Rp. 1.759.105.121.388,11	88,95	Rp. (218.534.602.518,89)	

PLT. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KOTA SAMARINDA

KABUPATEN PEABURUAN  
DARI BAGI HASIL

KABUPATEN  
DARI PELUPORAN

BENDAHARA KHUSUS PEMERINTAH